



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FEBRUARI 2024



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FEBRUARI 2024



Publikasi ini dapat diakses secara *online* pada:
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>

Salinan publikasi dalam bentuk *hardcopy* dapat diperoleh di:
Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Gajah Mada No. 1
Samarinda 75122, Kalimantan Timur
Telp: 0542 – 741 022, 741 023
Fax : 0542 – 732 644

KATA PENGANTAR

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan hasil asesmen mengenai perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Laporan ini memuat informasi terkini mengenai kondisi ekonomi makro daerah, keuangan pemerintah, inflasi, stabilitas sistem keuangan daerah, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta prospek perekonomian ke depan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi *stakeholders*, baik untuk tujuan penyusunan kajian, sosialisasi, maupun perumusan kebijakan.

Secara umum, kinerja ekonomi Kaltim pada triwulan IV 2023 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan juga lebih tinggi dibandingkan kinerja ekonomi nasional. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh Lapangan Usaha (LU) Pertambangan dan Konstruksi yang mencatatkan andil pertumbuhan tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatatkan pertumbuhan tertinggi meskipun relatif melambat dibandingkan triwulan IV 2023 di tengah komponen lainnya yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Adapun sepanjang tahun 2023, LU Konstruksi mencatatkan pertumbuhan tertinggi dari sisi LU seiring lebih masifnya pembangunan berbagai infrastruktur IKN di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, akselerasi pembangunan IKN di tahun 2023 yang meningkatkan investasi pemerintah dan swasta serta belanja pemerintah untuk barang dan jasa pendukung pembangunan IKN turut mendorong pertumbuhan komponen Konsumsi Pemerintah dan PMTB lebih tinggi di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Analisis dalam laporan ini menggunakan berbagai data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan laporan, survei, dan liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur termasuk berbagai data sekunder dan informasi yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak eksternal, baik dari kalangan Pemerintah maupun swasta. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini. Kami sangat menyadari bahwa laporan ini merupakan salah satu wujud dari hubungan kemitraan strategis yang telah terjalin dengan baik selama ini dan semoga dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Berbagai masukan, saran dan kritikan merupakan umpan balik yang sangat kami harapkan untuk penyempurnaan kualitas laporan ke depan.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran dan kesuksesan kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi Kalimantan Timur guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya menuju Indonesia maju.

Samarinda, Februari 2024
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ttd.

Budi Widihartanto
Kepala Perwakilan

VISI BANK INDONESIA

“Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan yang Berkontribusi Nyata Terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju”

MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia;
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan;
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah;
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

NILAI-NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii	III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	29
Visi Bank Indonesia	iv	3.1. Gambaran Umum	30
Misi Bank Indonesia	iv	3.1.1. Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	31
Nilai-Nilai Strategis Bank Indonesia	iv	3.1.2. Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kota IHK	32
Daftar Isi	v	3.1.3. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan I 2024	33
Daftar Tabel	vii	3.2. Program Pengendalian Inflasi Daerah	36
Daftar Grafik	viii	3.2.1. Keterjangkauan Harga	36
Daftar Gambar	xiii	3.2.2. Ketersediaan Pasokan	36
Tabel Indikator Makroekonomi	xiv	3.2.3. Kelancaran Distribusi	37
Ringkasan Eksekutif	xvii	3.2.4. Komunikasi Efektif	37
I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH	1	IV. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	39
1.1. Gambaran Umum	2	4.1. Gambaran Umum	40
1.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	3	4.2. Stabilitas Keuangan Daerah	40
1.3. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran	11	4.2.1. Perkembangan Penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga di Kalimantan Timur	40
II. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	19	4.2.2. Perkembangan Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Syariah	44
2.1. Gambaran Umum	20	4.2.3. Asesmen Stabilitas Keuangan Korporasi di Kaltim	47
2.2. APBD Pemerintah Provinsi	21		
2.3. APBD Kabupaten/Kota	25		
2.4. APBN di Wilayah Kaltim	26		

4.2.4. Asesmen Stabilitas Keuangan		5.1.3. Perkembangan Transaksi	
Rumah Tangga	49	Nontunai Melalui Kanal QRIS	60
4.2.5. Perkembangan Dana Pihak Ketiga		5.2. Pengelolaan Uang Rupiah	61
Pemerintah Daerah	51	BOKS V.i : Potensi QRIS TUNTAS di	
4.3. Perkembangan Penyaluran Kredit		Kalimantan Timur	63
UMKM	51		
4.3.1. Perkembangan Kredit UMKM		VI. KETENAGAKERJAAN DAN	
Spasial	52	KESEJAHTERAAN	67
V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN		6.1. Gambaran Umum	68
DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH	55	6.2. Ketenagakerjaan	68
5.1. Transaksi Nontunai di Provinsi		6.3. Kesejahteraan	71
Kalimantan Timur	56	BOKS VI.1 : Dampak IKN terhadap	
5.1.1. Transaksi Sistem Pembayaran		Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan	
melalui Bank Indonesia	56	di Kaltim	75
5.1.2. Transaksi Alat Pembayaran		VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	79
Menggunakan Kartu (APMK)	57	7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi	80
		7.2. Prospek Inflasi	82
		DAFTAR ISTILAH	85
		TIM PENYUSUN LAPORAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan IV 2023 Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)	3	Tabel II.11	Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN di Kalimantan Timur s.d Desember 2023	28
Tabel I.2	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy) Sepanjang Tahun 2023	4	Tabel III.1	Kelompok Barang Pembentuk Inflasi Gabungan 2 Kota IHK di Kaltim Triwulan IV Tahun 2023 (yoy)	31
Tabel I.3	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan IV 2023 Berdasarkan Pengeluaran (yoy)	11	Tabel III.2	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Tahunan Gabungan 2 Kota IHK Kaltim Triwulan III & IV Tahun 2023	32
Tabel I.4	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Tahun 2023 Berdasarkan Pengeluaran (% yoy)	12	Tabel III.3	Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk (yoy)	33
Tabel II.1	APBD Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 & 2023	20	Tabel III.4	Inflasi Kota Pembentuk IHK di Kaltim Menurut Kelompok Barang (yoy)	33
Tabel II.2	Pagu Pendapatan Pemerintah Kota/ Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	20	Tabel III.5	Inflasi Gabungan 2 Kota Kaltim Menurut Kelompok Barang	35
Tabel II.3	Pagu Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2022 & 2023	21	Tabel III.6	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kaltim Januari 2024	36
Tabel II.4	Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Kab/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur	21	Tabel III.7	Program Pengendalian Inflasi Daerah Kaltim Periode Oktober – Desember 2024	37
Tabel II.5	Realisasi APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023	22	Tabel VI.1	Angkatan Kerja dan Pengangguran Kaltim	68
Tabel II.6	Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023	22	Tabel VI.2	TPT Provinsi di Kalimantan dan Nasional	68
Tabel II.7	Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023	24	Tabel VI.3	Perbandingan Jumlah Penduduk yang Bekerja berdasarkan Pendidikan	70
Tabel II.8	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/ Kota Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023	25	Tabel VI.4	Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Status Usaha Kaltim	70
Tabel II.9	Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023	25	Tabel VI.5	Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim	71
Tabel II.10	Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN di Kalimantan Timur s.d Desember 2023	26	Tabel VI.6	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Ribu Jiwa)	72
			Tabel VI.7	Persentase Komoditas Makanan terhadap GKM	73
			Tabel VI.8	Persentase Komoditas Non Makanan terhadap GKNM	73
			Tabel VII.1	Proyeksi Pertumbuhan Global dan Domestik	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Pertumbuhan Tahunan Ekonomi Kaltim, Kalimantan & Nasional	2	Grafik I.20	Kredit dan NPL Industri Pengolahan	9
Grafik I.2	Pertumbuhan Tahunan Ekonomi Kaltim, Kalimantan & Nasional Sepanjang Tahun 2023	2	Grafik I.21	Perkembangan Rata-Rata Curah Hujan Kaltim	9
Grafik I.3	Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Kalimantan Sepanjang Tahun 2023	3	Grafik I.22	Nilai Tukar (NTP), Indeks Diterima (IT) serta Indeks Dibayarkan (I) Petani Kaltim	9
Grafik I.4	Pertumbuhan Ekonomi sisi Lapangan Usaha Utama Kaltim (% yoy)	4	Grafik I.23	Harga TBS Kaltim	9
Grafik I.5	Pangsa PDRB Kaltim Triwulan IV 2023 Berdasarkan Lapangan Usaha*)	4	Grafik I.24	Kredit dan NPL Pertanian Kaltim	10
Grafik I.6	Pertumbuhan Ekonomi sisi Lapangan Usaha Utama Kaltim Sepanjang Tahun 2023	5	Grafik I.25	Indeks Penjualan Riil	10
Grafik I.7	Perkembangan Volume Ekspor Batu Bara Kaltim	5	Grafik I.26	Indeks Penjualan Riil Kaltim Berdasarkan Kelompok	10
Grafik I.8	Harga Batu Bara Acuan (HBA)	5	Grafik I.27	Kredit dan NPL Lapangan Usaha Perdagangan	11
Grafik I.9	Perkembangan Volume Ekspor Batu Bara Ke Negara Tujuan Utama	6	Grafik I.28	Pertumbuhan Ekonomi sisi Pengeluaran Utama Kaltim Triwulan IV 2023 (% yoy)	12
Grafik I.10	Kredit dan NPL Pertambangan	6	Grafik I.29	Pangsa PDRB Kaltim Triwulan IV 2023 Berdasarkan Pengeluaran*)	12
Grafik I.11	Alokasi APBN IKN	6	Grafik I.30	Perkembangan Volume Ekspor Kaltim	13
Grafik I.12	Pengadaan Semen Kaltim	7	Grafik I.31	Perkembangan Nilai Ekspor Kaltim	13
Grafik I.13	Kredit dan NPL Industri Pengolahan	7	Grafik I.32	Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Kaltim	13
Grafik I.14	Perkembangan Ekspor Migas	7	Grafik I.33	Perkembangan Nilai Ekspor Migas Kaltim	13
Grafik I.15	Rata-rata Harga Minyak Dunia	7	Grafik I.34	Perkembangan Volume Impor Kaltim	14
Grafik I.16	Indeks Produksi Pupuk	8	Grafik I.35	Perkembangan Nilai Impor Kaltim	14
Grafik I.17	Perkembangan Harga CPO Kaltim	8	Grafik I.36	Perkembangan Impor Non-Migas Kaltim	14
Grafik I.18	Perkembangan Ekspor CPO Kaltim	8	Grafik I.37	Perkembangan Impor Migas Kaltim	14
Grafik I.19	Perkembangan Ekspor CPO Kaltim ke Negara Tujuan	8	Grafik I.38	Pertumbuhan Impor Barang Modal, Bahan Baku, dan Konsumsi	14
			Grafik I.39	Penanaman Modal Asing (PMA) Kaltim	15

Grafik I.40	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kaltim	15	Grafik III.2	Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di seluruh Provinsi di Kalimantan, Q3 dan Q4 2023	30
Grafik I.41	Pertumbuhan PMA Kaltim Berdasarkan Sektor	15	Grafik III.3	Kelompok Utama Pendorong Inflasi Gabungan 2 Kota IHK Kaltim	31
Grafik I.42	Pertumbuhan PMDN Kaltim berdasarkan Sektor	15	Grafik III.4	Inflasi Samarinda & Balikpapan	31
Grafik I.43	Perkembangan Indeks Penjualan Riil Kaltim	16	Grafik III.5	Inflasi Tahunan Kaltim	35
Grafik I.44	Perkembangan Indeks Penjualan Riil Kaltim Berdasarkan Komponennya	16	Grafik III.6	Inflasi Bulanan Kaltim	35
Grafik I.45	Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini	16	Grafik IV.1	Perkembangan Kredit Kaltim dan Nasional	41
Grafik I.46	LS <i>Liaison</i> Domestik	16	Grafik IV.2	Perkembangan Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaannya	41
Grafik I.47	Pertumbuhan Realisasi Belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur	17	Grafik IV.3	Pangsa Penyaluran Kredit Berdasarkan Debitur	41
Grafik I.48	Perkembangan Belanja Barang APBD Provinsi Kalimantan Timur	17	Grafik IV.4	Perkembangan NPL Berdasarkan Penggunaannya	41
Grafik II.1	Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim (dalam %)	23	Grafik IV.5	Perkembangan Kredit Sektoral Kaltim	42
Grafik II.2	Komponen Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023 (dalam %)	23	Grafik IV.6	<i>Share</i> Kredit Berdasarkan Sektor	42
Grafik II.3	Derajat Otonomi Fiskal Pemprov Kaltim	23	Grafik IV.7	Perkembangan NPL Berdasarkan Sektor	42
Grafik II.4	Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023 (dalam %)	24	Grafik IV.8	Pertumbuhan Kredit Spasial Kabupaten/ Kota di Wilayah Kaltim	43
Grafik II.5	Kinerja Pendapatan APBN Kaltim	27	Grafik IV.9	Perkembangan NPL Spasial Kabupaten/ Kota di Wilayah Kaltim	43
Grafik II.6	Kinerja Pendapatan APBN Kaltim	27	Grafik IV.10	Pangsa Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim	43
Grafik III.1	Inflasi Kaltim dan Nasional	30	Grafik IV.11	Perkembangan DPK Kaltim dan Nasional	44
			Grafik IV.12	Pangsa DPK Kaltim Berdasarkan Sumbernya	44

Grafik IV.13	Perkembangan DPK Kaltim Berdasarkan Sumber	44	Grafik IV.28	Perkembangan NPL Korporasi Kaltim	48
Grafik IV.14	Pangsa DPK Kaltim Berdasarkan Golongan Nasabah	44	Grafik IV.29	Perkembangan DPK Korporasi Kaltim	48
Grafik IV.15	Perkembangan Pembiayaan Syariah Kaltim	44	Grafik IV.30	Perkembangan DPK Korporasi Kaltim Berdasarkan Komponennya	48
Grafik IV.16	Perkembangan Pangsa Pembiayaan Syariah Kaltim	45	Grafik IV.31	Pangsa DPK Korporasi Kaltim	49
Grafik IV.17	Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan	45	Grafik IV.32	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim	49
Grafik IV.18	Pangsa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Debitur	45	Grafik IV.33	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaannya	49
Grafik IV.19	Perkembangan NPF Kaltim Berdasarkan Penggunaannya	45	Grafik IV.34	NPL Kredit Rumah Tangga Kaltim	50
Grafik IV.20	Pertumbuhan Pembiayaan Syariah Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	46	Grafik IV.35	NPL Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaannya	50
Grafik IV.21	Perkembangan NPF Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	46	Grafik IV.36	Perkembangan DPK Rumah Tangga Kaltim	50
Grafik IV.22	Pangsa Pembiayaan Syariah Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim	46	Grafik IV.37	Perkembangan Komponen DPK Rumah Tangga Kaltim	50
Grafik IV.23	Perkembangan DPK Syariah Kaltim dan DPK Syariah Nasional	47	Grafik IV.38	Pangsa DPK Rumah Tangga Kaltim	50
Grafik IV.24	Perkembangan DPK Syariah Kaltim berdasarkan Komponen Pembentuk	47	Grafik IV.39	Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Kaltim	51
Grafik IV.25	Pangsa DPK Syariah Kaltim berdasarkan Komponen Pembentuk	47	Grafik IV.40	Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Kaltim Berdasarkan Komponennya	51
Grafik IV.26	Pangsa DPK Syariah Kaltim dan Non Syariah	47	Grafik IV.41	Pangsa DPK Pemerintah Daerah Kaltim Berdasarkan Komponennya	51
Grafik IV.27	Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim	48	Grafik IV.42	Perkembangan Kredit UMKM Kaltim dan Nasional	52
			Grafik IV.43	Perkembangan Kredit UMKM Kaltim berdasarkan Jenis Penggunaan	52
			Grafik IV.44	Perkembangan NPL UMKM Kaltim	52

Grafik IV.45	Perkembangan NPL UMKM Kaltim berdasarkan Jenis Penggunaan	52	Grafik V.10	Porsi Nominal Transaksi Kartu Kredit secara spasial di Wilayah Kaltim Tw IV 2023	58
Grafik IV.46	Pertumbuhan Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	53	Grafik V.11	Porsi Volume Transaksi Kartu Kredit secara spasial di Wilayah Kaltim Tw IV 2023	58
Grafik IV.47	Perkembangan NPL UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	53	Grafik V.12	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit di Kaltim	59
Grafik IV.48	Pangsa Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim	53	Grafik V.13	Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit di Kaltim	59
Grafik V.1	Perkembangan Nominal Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Kaltim	56	Grafik V.14	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit di Kaltim Tw IV 2023	59
Grafik V.2	Perkembangan Volume Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Kaltim (% yoy)	56	Grafik V.15	Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit di Kaltim Tw IV 2023	59
Grafik V.3	Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Kaltim Berdasarkan Infrastruktur	56	Grafik V.16	Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik di Kaltim	60
Grafik V.4	Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Kaltim	57	Grafik V.17	Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik di Kaltim	60
Grafik V.5	Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Kaltim	57	Grafik V.18	Perkembangan Jumlah Akun Uang Elektronik di Kaltim	60
Grafik V.6	Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI di Kaltim	57	Grafik V.19	Jumlah Pengguna QRIS di Kaltim	61
Grafik V.7	Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Kaltim	57	Grafik V.20	Jumlah <i>Merchant</i> QRIS di Kaltim	61
Grafik V.8	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Kaltim	58	Grafik V.21	Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Kaltim	61
Grafik V.9	Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Kaltim	58	Grafik V.22	Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Kaltim	61
			Grafik V.23	Pengedaran Uang Kartal di Kaltim	61
			Grafik V.24	Uang Kartal di Kaltim – Spasial	62
			Grafik V.25	<i>Dropping</i> ULE dan <i>Inflow</i> UTLE	62

Grafik V.26	Penarikan Uang Tidak Layak Edar di Kaltim	62	Grafik VI.4	Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur	71
Grafik V.27	Penarikan Uang Tidak Layak Edar terhadap <i>Inflow</i> di Kaltim	62	Grafik VI.5	Garis Kemiskinan Kalimantan Timur	72
Grafik VI.1	Tenaga Kerja Kaltim Berdasarkan Sektor Formal dan Informal	69	Grafik VI.6	Pertumbuhan GKM dan GKNM	72
Grafik VI.2	Perbandingan TPAK Provinsi se- Kalimantan	69	Grafik VI.7	Perkembangan NTP, IT, dan IB Kaltim	73
Grafik VI.3	Pangsa Tenaga Kerja Sektoral Kaltim	71	Grafik VI.8	Perkembangan NTP Sub-Lapangan Usaha	74
			Grafik VII.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2024	



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Pertumbuhan Ekonomi Tiap Provinsi di Kalimantan	2	Gambar BOKS V.3 <i>Merchant</i> QRIS di Kalimantan Timur dan Skema Harga QRIS TUNTAS	64
Gambar III.1	Peta Prakiraan Curah Hujan Indonesia Maret 2024	34	Gambar BOKS V.4 Skema Interoperabilitas QRIS TUNTAS antar PJSP	65
Gambar III.2	Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir Indonesia Maret 2024	34	Gambar BOKS V.5 Nominal, Volume, dan Distribusi Transaksi QRIS Kalimantan Timur	65
Gambar III.3	Peta Anomali Suhu Muka Laut Dasarian I Februari 2024	34	Gambar BOKS VI.1 Perkembangan Laju dan Distribusi Sektor Konstruksi di Kab. PPU	77
Gambar BOKS V.1	Jumlah Pengguna QRIS Nasional dan Kalimantan Timur	63	Gambar BOKS VI.1 Perbandingan TPAK	77
Gambar BOKS V.2	Jumlah Akun dan Transaksi UE di Kalimantan Timur	64	Gambar BOKS VI.1 Perbandingan TPT	77

TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI

• PERTUMBUHAN EKONOMI

Komponen PDRB	2022				2023					
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	IV	IV
	%yoy	andil %	share %							
PDRB TOTAL	2,40	3,62	5,34	6,47	6,95	6,84	5,29	5,76	5,76	100,00
Berdasarkan Lapangan Usaha										
Pertanian	-0,15	2,80	2,92	2,27	2,43	0,58	2,17	3,49	0,22	8,27
Pertambangan	1,68	2,77	3,69	5,74	4,92	4,69	2,74	7,17	3,31	40,01
Industri Pengolahan	1,64	3,67	3,63	5,31	7,04	5,59	7,84	0,12	0,02	18,30
Listrik dan Gas	3,43	3,63	-2,04	10,09	19,57	20,12	16,72	9,39	0,01	0,07
Air	8,42	9,96	5,03	7,11	7,09	6,47	5,17	9,05	0,00	0,05
Konstruksi	3,95	6,85	9,28	10,71	17,36	22,12	16,26	12,63	1,06	11,52
Perdagangan	4,92	4,56	7,66	9,98	9,98	6,50	4,57	4,11	0,25	6,60
Transportasi dan Pergudangan	8,23	11,12	13,91	14,40	12,28	15,04	9,38	4,36	0,13	4,29
Akomodasi dan Makan Minum	7,65	7,37	13,05	8,66	8,83	8,27	9,27	8,59	0,08	1,06
Informasi dan Komunikasi	8,53	8,63	7,64	7,19	6,89	8,03	8,93	4,62	0,09	1,46
Jasa Keuangan	8,76	2,74	16,02	10,05	12,87	20,27	2,79	12,60	0,20	1,93
Real Estate	2,04	1,67	2,32	4,01	3,84	3,45	3,31	3,22	0,03	0,80
Jasa Perusahaan	4,13	4,19	6,95	6,09	9,21	6,89	4,62	6,06	0,01	0,21
Adm. Pemerintahan	2,98	-3,23	27,15	6,39	8,34	12,94	0,78	10,48	0,19	2,07
Jasa Pendidikan	-0,94	1,22	7,79	6,12	4,88	4,97	3,77	5,74	0,08	1,75
Jasa Kesehatan dan Sosial	3,84	4,02	4,64	6,87	6,73	8,96	6,94	4,42	0,04	0,90
Jasa lainnya	4,74	5,05	9,97	8,15	7,16	8,31	8,79	7,60	0,04	0,72
Berdasarkan Penggunaan										
Konsumsi Rumah Tangga	1,41	2,23	5,02	4,99	5,08	5,13	4,52	5,22	0,75	17,09
Konsumsi LNPRT	3,10	2,99	4,40	1,68	5,02	5,94	0,53	11,02	0,05	0,54
Konsumsi Pemerintah	2,85	-0,48	13,88	13,09	3,44	34,74	34,10	38,15	1,94	8,98
PMTB	5,12	2,43	5,81	8,32	11,17	14,25	12,06	8,58	2,49	35,08
Ekspor	1,90	2,21	4,92	5,52	11,81	5,15	1,78	6,03	6,61	111,05
Impor*)	2,42	-0,25	5,12	5,81	18,67	7,95	3,10	10,37	6,07	72,81

*) Sejak tahun 2020, perhitungan PDRB ekspor impor mengalami perubahan dari komponen ekspor luar negeri (LN), impor luar negeri (LN), dan net ekspor antar daerah (AD) menjadi komponen ekspor dan impor. sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

• EKSPOR DAN IMPOR

Ekspor dan Impor	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy						
EKSPOR TOTAL	7,66	64,83	147,38	132,34	50,96	101,78	59,35	15,38	29,29	-33,02	-44,89	-31,87
Ekspor Migas	-77,38	-2,80	120,58	251,93	407,97	170,75	98,97	12,77	32,58	-21,58	-18,93	-26,00
Ekspor Nonmigas	19,19	71,79	149,46	124,12	41,77	97,77	56,66	15,66	28,99	-33,93	-47,14	-32,49
TOTAL IMPOR	-38,65	257,61	85,95	109,85	131,83	34,88	113,58	38,85	19,24	17,98	-8,63	-5,88
Impor Migas	-79,72	475,55	51,59	485,60	583,05	53,55	294,17	47,61	30,58	18,77	-3,55	2,64
Impor Nonmigas	34,13	135,13	113,84	-10,34	10,93	9,20	9,71	20,57	0,53	15,79	-19,15	-27,67

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

• INFLASI

	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kaltim	0,74	1,22	1,68	2,15	2,86	4,38	5,69	5,35	5,24	3,76	3,06	3,46
Samarinda	0,87	1,60	1,66	2,05	2,58	3,97	5,27	5,22	5,03	3,67	3,14	3,37
Balikpapan	0,57	0,71	1,77	2,28	3,23	4,93	6,26	5,52	5,51	3,87	2,96	3,60
Nasional	1,37	1,33	1,60	1,87	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,28	2,61
Kalimantan	1,13	1,41	1,88	2,26	3,37	4,97	6,37	5,94	5,44	3,85	2,64	2,79
Kalsel	2,02	2,37	2,56	2,55	3,65	5,95	7,35	6,99	6,56	4,29	2,72	2,43
Kalbar	1,02	0,69	2,01	1,45	3,13	4,31	5,71	6,30	5,06	4,10	2,26	2,02
Kalteng	1,02	1,35	2,12	3,32	4,34	6,40	8,12	6,32	5,63	3,55	1,88	2,64
Kaltara	1,13	1,69	0,37	2,73	4,61	5,17	6,64	4,74	4,17	2,91	2,16	2,44

*) Sejak tahun 2020, perhitungan Inflasi Kaltim menggunakan SBH 2018
Sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

• PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran	2021				2022				2023			
	I %yoy	II %yoy	III %yoy	IV %yoy	I %yoy	II %yoy	III %yoy	IV %yoy	I %yoy	II %yoy	III %yoy	IV %yoy
DPK dan ASET												
Dana Pihak Ketiga (KC/KCP)	7,57	9,17	12,04	11,49	13,60	19,23	12,87	24,75	25,69	17,39	18,53	6,45
Giro	10,13	24,97	27,13	21,17	34,77	58,45	35,50	88,58	57,92	23,62	28,35	-6,95
Tabungan	10,11	10,44	12,61	10,99	12,66	11,79	11,11	11,05	10,81	10,96	9,26	9,50
Deposito	2,77	-1,72	1,41	5,25	1,49	0,83	-3,37	-6,41	21,36	20,48	21,82	23,16
Aset	4,95	4,72	7,03	11,72	12,42	17,63	15,70	23,43	27,47	24,21	19,81	11,79
KREDIT												
Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek)	-4,54	-1,94	-6,34	13,68	15,15	22,14	33,71	19,28	19,22	16,34	10,93	12,60
NPL (%)	3,95	4,09	4,08	3,11	3,40	2,82	2,60	1,77	1,44	1,38	1,32	1,11
Berdasarkan Jenis Penggunaan												
Modal Kerja	-4,65	-2,19	-10,51	2,20	9,28	13,82	48,41	41,11	20,46	21,45	1,22	17,62
Investasi	-5,54	-2,74	-7,29	28,97	25,93	37,34	36,90	10,37	21,90	14,97	19,00	9,03
Konsumsi	-2,20	0,19	2,45	-0,22	1,61	3,76	6,78	8,52	10,16	11,14	9,53	11,95
Berdasarkan Sektor Ekonomi												
Pertanian dan Kehutanan	2,23	5,32	6,13	51,41	35,23	41,15	27,81	4,14	11,55	-0,47	-1,44	-8,76
Perikanan	29,41	33,82	31,32	28,34	24,02	19,08	15,98	12,25	7,14	6,96	6,36	6,81
Pertambangan (% yoy)	-24,05	-25,29	-27,77	29,23	70,50	106,16	194,61	74,73	34,44	33,38	3,91	40,59
Industri Pengolahan	-4,00	20,24	9,83	31,87	31,50	38,87	51,46	58,08	83,56	68,74	67,25	18,73
Listrik, Gas dan Air	-13,49	-4,94	-83,53	-1,55	-1,25	1,33	474,68	3,73	-0,35	-2,27	-0,36	-2,11
Konstruksi	23,46	9,61	-17,29	-4,95	-6,96	-9,58	18,31	2,55	-0,97	-0,16	0,18	-2,60
Perdagangan Besar dan Eceran	0,05	5,07	-5,48	1,48	-3,08	-0,79	8,17	7,03	15,18	20,57	22,34	12,43
Akomodasi dan Makan Minum	-1,08	7,22	-3,24	-5,06	-0,96	-3,52	2,39	6,88	-0,70	-0,69	-0,03	0,28
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	-14,29	-8,94	52,89	-16,82	-16,41	-11,84	-46,98	19,25	27,82	33,04	53,75	41,38
Jasa Keuangan	-37,43	-39,15	-19,93	-16,59	-68,42	-35,26	-32,50	-40,15	61,22	30,64	15,54	279,70
Real Estate dan Jasa Perusahaan	-21,92	-27,63	-28,22	-20,69	-13,15	3,45	15,68	9,36	9,22	-3,75	-9,04	-11,81
Administrasi Pemerintahan	-89,79	-89,73	-54,33	-12,97	402,06	15,07	27,67	-55,00	-90,78	-60,59	-62,76	227,89
Jasa Pendidikan	-7,08	2,74	2,78	10,66	24,74	16,72	18,48	10,52	9,70	5,55	31,48	39,42
Jasa Kesehatan dan Sosial	-26,35	-26,38	-3,65	14,32	27,22	23,06	-10,11	-14,68	-11,89	0,08	24,66	35,97
Jasa Kemasyarakatan	-7,98	7,52	7,51	15,78	23,02	11,73	20,84	29,15	25,57	27,72	24,22	17,42
Jasa Perorangan	7,67	34,61	-13,55	-0,74	-2,91	-30,69	-11,91	-11,52	-8,80	-2,54	0,98	8,48
Badan Internasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya	49,87	-46,25	-92,10	-91,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Tangga	-2,20	0,19	2,45	-0,22	1,61	3,76	6,78	8,52	10,16	11,14	9,53	11,95
SISTEM PEMBAYARAN												
Inflow	19,34	13,34	-20,61	-23,96	-24,47	-16,88	10,08	21,74	29,90	19,89	18,43	3,41
Outflow	-31,49	23,19	16,29	-6,69	10,20	-7,45	19,91	14,25	27,35	22,54	-1,20	15,02
Net	218,21	51,76	-393,60	1,46	-53,68	12,96	49,42	11,61	35,01	26,76	-44,62	19,49



Halaman ini sengaja dikosongkan



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FEBRUARI 2024

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global dan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang, **perekonomian Kalimantan Timur mampu tumbuh tinggi**. Pada Triwulan IV 2023, Kalimantan Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan maupun Nasional. Pada periode tersebut, perekonomian Kalimantan Timur tumbuh sebesar 5,76% (yoy) dengan lapangan usaha (LU) Pertambangan memberikan andil sebesar 3,31% (yoy) seiring masih tingginya permintaan batu bara dari Tiongkok sebagaimana terlihat dari volume ekspor batu bara yang lebih tinggi. LU konstruksi juga berkontribusi cukup besar, mencapai 1,06% (yoy) sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan infrastruktur penunjangnya. Dari sisi pengeluaran, kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbangkan andil tertinggi terutama bersumber dari investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, gedung pemerintahan) dan investasi swasta (antara lain pabrik, rumah sakit, perhotelan, dsb). Selain itu, konsumsi pemerintah juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan terutama bersumber dari belanja pemerintah untuk barang dan jasa.

Keuangan Pemerintah Daerah

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu mesin penggerak fiskal di Kalimantan Timur terutama pembangunan Infrastruktur Dasar Ibu Kota Nusantara. Pendapatan dan belanja APBD Pemprov Kaltim menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga triwulan IV 2023 terutama berasal dari pajak daerah dan retribusi. Di sisi belanja, anggaran untuk belanja operasional dan modal Pemprov Kaltim juga menunjukkan peningkatan signifikan dan terjadi secara bersamaan di seluruh Kabupaten/Kota. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Kutai Timur yang mencapai 85,07%. Realisasi pendapatan APBN juga tumbuh signifikan terutama didorong oleh sektor batu bara dan pertambangan. Sementara itu, belanja APBN mengalami peningkatan seiring dengan alokasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara yang mencapai hampir 3,5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dana transfer dari APBN turut mengalami kenaikan signifikan, terutama untuk pembangunan infrastruktur.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi di Kalimantan Timur relatif terjaga dalam rentang target inflasi nasional. Pada triwulan IV 2023, inflasi di Kalimantan Timur tercatat sebesar 3,46% (yoy), relatif tinggi dibandingkan dengan triwulanan

sebelumnya maupun nasional. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan konsumsi seiring dengan meningkatnya aktivitas MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) dan momentum HBKN Nataru. Dari sisi penawaran, tingginya inflasi disebabkan oleh peningkatan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, penerapan tarif batas atas angkutan udara, serta minimnya pasokan cabai dan bawang merah dari luar Kalimantan Timur. Kenaikan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bahan bakar bensin pasca pengumuman penurunan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM), terjaganya harga komoditas pangan lainnya, serta upaya stabilisasi harga yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi di Kalimantan Timur.

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Intermediasi perbankan menunjukkan kinerja positif seiring peningkatan penyaluran kredit dengan risiko yang relatif terjaga, dan pertumbuhan positif dana pihak ketiga. Penyaluran kredit, termasuk kredit UMKM dan pembiayaan syariah pada triwulan IV 2023 tumbuh stabil di atas 10% sejalan dengan pertumbuhan kredit selama beberapa triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan penyaluran kredit utamanya didorong oleh kredit modal kerja kepada korporasi dan rumah tangga. Secara sektoral, pertumbuhan penyaluran kredit Kaltim bersumber dari sektor pertambangan sejalan dengan meningkatnya ekspor batu bara ke Tiongkok. Meski mengalami peningkatan, penyaluran kredit ke sektor pertambangan juga diimbangi dengan upaya mitigasi risiko kredit untuk memastikan risiko kredit yang rendah. Dari sisi pendanaan, kinerja positif juga terlihat dari pertumbuhan positif dana pihak ketiga (DPK), yang bersumber dari peningkatan jumlah tabungan.

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Transaksi sistem pembayaran tumbuh positif, meski transaksi tunai mengalami *net outflow*. Pada Triwulan IV tahun 2023, transaksi nontunai mengalami pertumbuhan baik secara nominal maupun volume, dan terjadi pada seluruh jaringan sistem pembayaran yang dikelola Bank Indonesia (SKNBI dan RTGS). Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas dan konsumsi masyarakat khususnya terkait dengan perayaan HBKN Nataru seiring membaiknya optimisme konsumen sebagaimana terlihat dari terjaganya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Pada periode yang sama, transaksi menggunakan instrumen pembayaran APMK berupa ATM/Debit, Kredit, UE (Uang Elektronik) juga mengalami pertumbuhan. Kanal pembayaran QRIS mengalami pertumbuhan

signifikan sejalan dengan gencarnya kegiatan edukasi dan sosialisasi transaksi nontunai kepada masyarakat. Pada bagian lain, transaksi tunai mencatatkan posisi *net outflow* sejalan dengan aktivitas masyarakat di luar Kaltim untuk mengisi hari libur natal dan tahun baru.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Membaiknya kinerja ekonomi turut mendorong perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada triwulan III 2023 mencatatkan penurunan. Derajat ketimpangan masyarakat turut membaik terlihat dari penurunan rasio gini, dan Nilai Tukar Petani (NTP) yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Prospek Perekonomian Daerah

Di tengah berlanjutnya konflik geopolitik dan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global, perekonomian Kalimantan Timur di 2024 diperkirakan masih dapat tumbuh pada rentang 4,80%-5,60% (yoy). Prakiraan tersebut didasarkan pada kinerja LU Pertambangan, Industri Pengolahan, dan Konstruksi. Masih tingginya permintaan batu bara dari mitra dagang tradisional yaitu Tiongkok dan India menjadi pendorong utama kinerja LU Pertambangan. Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan akan meningkat seiring pembangunan pabrik baru amonium nitrat untuk mendukung peningkatan alokasi APBN untuk subsidi pupuk. LU konstruksi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan sejalan dengan pembangunan proyek strategis pemerintah khususnya IKN dan proyek-proyek korporasi yang ditargetkan selesai di pertengahan 2024. Kinerja investasi dan pembangunan infrastruktur juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan positif Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB).

Inflasi tahunan di 2024 diperkirakan masih berada dalam rentang target pada kisaran 2,5±1% (yoy). Pada triwulan I 2024, potensi inflasi diperkirakan masih tetap tinggi terutama menjelang HBKN Ramadan, terutama disebabkan oleh peningkatan permintaan komoditas pangan, khususnya beras, di tengah keterbatasan pasokan di tengah masa tanam yang sedang berlangsung. Tekanan inflasi yang lebih tinggi diperkirakan akan tertahan oleh seiring moderasi potensi El-Nino dan terkendalinya ekspektasi masyarakat sejalan dengan program sosialisasi belanja bijak yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).



BAB 1

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

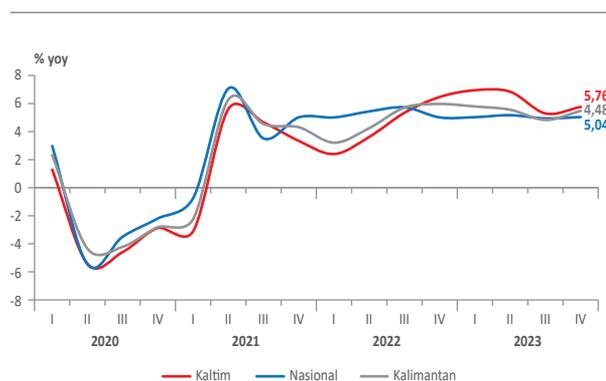
RINGKASAN EKSEKUTIF

- *Ekonomi Kalimantan Timur periode triwulan IV 2023 melanjutkan pertumbuhan yang tertinggi di regional Kalimantan.*
- *Pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari LU Pertambangan seiring tingginya permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama serta LU konstruksi sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).*
- *Dari sisi pengeluaran, meski pertumbuhannya melambat, komponen investasi masih menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan seiring bertambahnya investasi pemerintah dan swasta di IKN, sementara komponen lain tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.*

1.1. Gambaran Umum

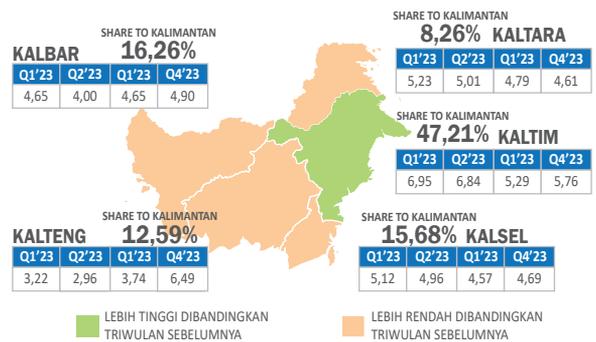
Pertumbuhan positif perekonomian Kalimantan Timur periode triwulan IV 2023 utamanya didorong oleh LU Pertambangan dari sisi lapangan usaha dan investasi dari sisi pengeluaran. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 5,76% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 5,29% (yoy) (Grafik I.1). Dari sisi LU, kontribusi terbesar pertumbuhan bersumber dari LU Pertambangan dan Penggalian. Laju pertumbuhan LU Pertambangan dan Penggalian terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya seiring peningkatan permintaan batu bara dari mitra dagang utama. Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatatkan andil pertumbuhan tertinggi sejalan dengan tingginya investasi di Kaltim utamanya di IKN, meski mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh faktor *baseline*.

Secara regional, pertumbuhan ekonomi Kaltim di triwulan IV 2023 merupakan yang tertinggi kedua di wilayah Kalimantan. Selain mencatatkan kinerja cukup tinggi, perekonomian Kaltim juga berperan strategis dalam perekonomian regional Kalimantan mengingat pangsa ekonomi Kaltim yang mencapai 47,21% dari total perekonomian di wilayah Kalimantan (Gambar I.1).



Sumber: BPS, diolah

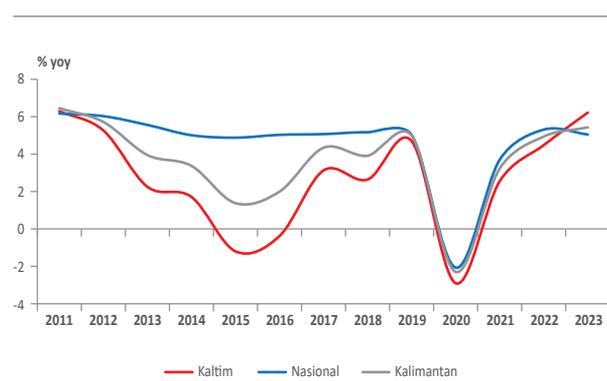
Grafik I.1 Pertumbuhan Tahunan Ekonomi Kaltim, Kalimantan & Nasional



Sumber: BPS, diolah

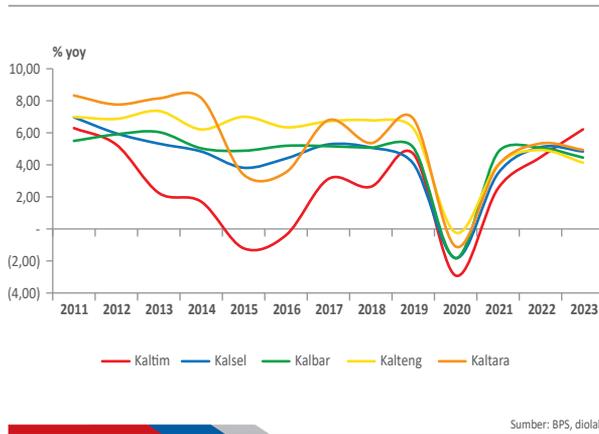
Gambar I.1 Pertumbuhan Ekonomi Tiap Provinsi di Kalimantan

Pertumbuhan ekonomi Kaltim sepanjang tahun 2023 menguat sejalan dengan penguatan ekonomi di wilayah Kalimantan. Ekonomi Kaltim sepanjang tahun 2023 tumbuh 6,22% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 4,48% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan sepanjang tahun 2023 terutama didorong oleh sektor konstruksi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan positif perekonomian Kaltim sejalan dengan kinerja ekonomi nasional yang masih tumbuh positif sebesar 5,05% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya yakni 5,31% (Grafik I.2). Penguatan ekonomi Kaltim menjadi pendukung kinerja ekonomi Kalimantan pada tahun 2023 yang secara agregat tercatat meningkat meski beberapa provinsi lainnya mengalami pelemahan (Grafik I.3).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.2 Pertumbuhan Tahunan Ekonomi Kaltim, Kalimantan & Nasional Sepanjang Tahun 2023



Grafik I.3 Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Kalimantan Sepanjang Tahun 2023

1.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Pada triwulan IV 2023, seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif. Kontribusi tertinggi berasal dari LU Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 7,17% (yoy), lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya sebesar 2,74% (yoy). LU Konstruksi dan Perdagangan merupakan lapangan usaha

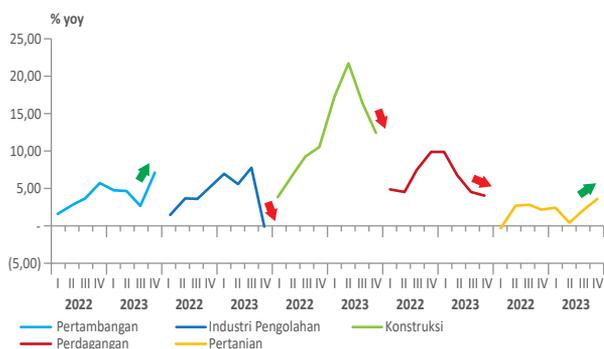
yang berkontribusi tertinggi kedua dan ketiga meski pertumbuhannya melambat. Sementara itu, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,17% (yoy). LU Industri Pengolahan juga masih tumbuh positif meskipun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan memiliki kontribusi terendah di antara 5 (lima) lapangan usaha utama perekonomian Kaltim (Tabel I.1 dan Grafik I.4).

Sejalan dengan kontribusi yang tinggi dalam pertumbuhan, distribusi PDRB tertinggi juga berasal dari LU Pertambangan. Pada triwulan IV 2023, pangsa LU Pertambangan mencapai 40,01% dari total PDRB Kaltim diikuti oleh LU Industri Pengolahan sebesar 18,30%, LU Konstruksi sebesar 11,52%, dan LU Pertanian serta LU Perdagangan masing-masing sebesar 8,27% dan 6,60%. Kelima lapangan usaha utama tersebut menguasai 84,70% dari total perekonomian Kaltim pada periode laporan (Tabel I.1 dan Grafik I.5).

Tabel I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan IV 2023 Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)

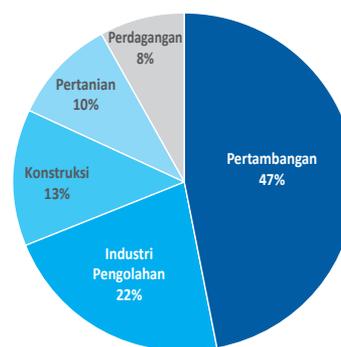
Berdasarkan Lapangan Usaha	2021				2022				2023					
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	IV	IV
	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy	yoy	yoy	yoy	andil
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3,58	0,70	2,97	-0,24	-0,15	2,80	2,92	2,27	2,43	0,58	2,17	3,49	0,22	8,27
Pertambangan dan Penggalian	-4,41	4,89	6,28	2,73	1,68	2,77	3,69	5,74	4,92	4,69	2,74	7,17	3,31	40,01
Industri Pengolahan	-3,55	8,74	2,79	2,49	1,64	3,67	3,63	5,31	7,04	5,59	7,84	0,12	0,02	18,30
Pengadaan Listrik, Gas	0,22	-0,18	3,14	5,83	3,43	3,63	-2,04	10,09	19,57	20,12	16,72	9,39	0,01	0,07
Pengadaan Air	3,64	1,05	6,37	5,82	8,42	9,96	5,03	7,11	7,09	6,47	5,17	9,05	0,00	0,05
Konstruksi	-0,03	-0,54	6,25	10,00	3,95	6,85	9,28	10,71	17,36	22,12	16,26	12,63	1,06	11,52
Perdagangan Besar & Eceran	-0,17	6,68	5,25	5,29	4,92	4,56	7,66	9,98	9,98	6,50	4,57	4,11	0,25	6,60
Transportasi dan Pergudangan	-6,74	17,57	-0,12	3,25	8,23	11,12	13,91	14,40	12,28	15,04	9,38	4,36	0,13	4,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,90	12,19	1,23	5,50	7,65	7,37	13,05	8,66	8,83	8,27	9,27	8,59	0,08	1,06
Informasi dan Komunikasi	8,75	6,74	6,95	9,01	8,53	8,63	7,64	7,19	6,89	8,03	8,93	4,62	0,09	1,46
Jasa Keuangan	-2,97	3,63	9,37	0,75	8,76	2,74	16,02	10,05	12,87	20,27	2,79	12,60	0,20	1,93
Real Estate	-2,98	-0,88	-0,07	1,12	2,04	1,67	2,32	4,01	3,84	3,45	3,31	3,22	0,03	0,80
Jasa Perusahaan	-4,59	6,29	3,76	4,73	4,13	4,19	6,95	6,09	9,21	6,89	4,62	6,06	0,01	0,21
Administrasi Pemerintahan	-3,39	10,97	-8,54	8,79	2,98	-3,23	27,15	6,39	8,34	12,94	0,78	10,48	0,19	2,07
Jasa Pendidikan	7,72	6,40	-1,66	-2,23	-0,94	1,22	7,79	6,12	4,88	4,97	3,77	5,74	0,08	1,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,74	18,22	8,24	5,77	3,84	4,02	4,64	6,87	6,73	8,96	6,94	4,42	0,04	0,90
Jasa lainnya	-4,20	7,73	-1,01	2,72	4,74	5,05	9,97	8,15	7,16	8,31	8,79	7,60	0,04	0,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-3,10	5,62	4,66	3,33	2,40	3,62	5,34	6,47	6,95	6,84	5,29	5,76	5,76	100,00

Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.4 Pertumbuhan Ekonomi sisi Lapangan Usaha Utama Kaltim (% yoy)



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.5 Pangsa PDRB Kaltim Triwulan IV 2023 Berdasarkan Lapangan Usaha*)

* pangsa diperoleh dari angka PDRB Triwulan IV 2023

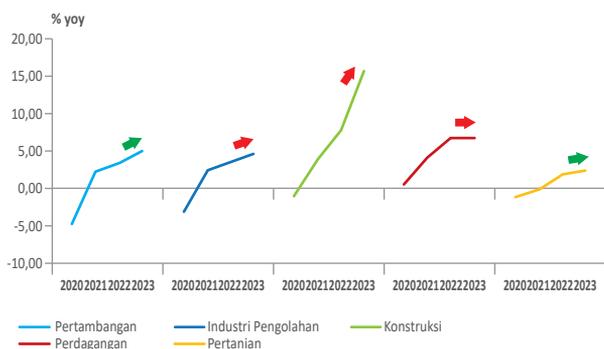
Diantara beberapa LU utama dalam perekonomian Kaltim, selama tahun 2023 LU Konstruksi mencatatkan pertumbuhan tertinggi. Sepanjang tahun 2023, LU Konstruksi tercatat tumbuh 15,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2022 yang sebesar 7,79% (yoy). Kenaikan kinerja LU Konstruksi tersebut tidak terlepas dari masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kinerja LU Konstruksi juga diikuti oleh LU Pertambangan dan Perdagangan yang masing-masing tumbuh sebesar 5,18% (yoy) dan 6,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 3,49% (yoy) untuk LU Pertambangan dan 6,81% (yoy) untuk LU Perdagangan. Penguatan kinerja LU Pertambangan didorong oleh peningkatan produksi khususnya batu bara sebagaimana terindikasi dari pertumbuhan volume ekspor batu bara. Meningkatnya ekspor batu bara juga menjadi faktor pendorong kinerja LU Perdagangan. Sementara itu, LU Industri Pengolahan dan Pertanian masing-masing tumbuh sebesar 4,71% (yoy) dan 2,49% (yoy), menguat dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya (Tabel I.2 dan Grafik I.6).

Tabel I.2 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy) Sepanjang Tahun 2023

Berdasarkan Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.32	7.63	6.76	6.78	4.55	0.46	5.66	6.14	3.88	(0.98)	(0.08)	1.96	2.49
Pertambangan dan Penggalian	10.64	8.01	1.86	(0.40)	(4.89)	(3.52)	1.79	1.07	6.89	(4.61)	2.28	3.49	5.18
Industri Pengolahan	(3.77)	(3.49)	(1.82)	0.45	2.66	5.46	2.80	0.69	0.19	(2.99)	2.45	3.58	4.71
Pengadaan Listrik, Gas	14.62	13.27	3.40	21.24	30.43	8.32	6.78	9.76	8.65	11.47	2.34	3.84	16.05
Pengadaan Air	4.42	2.63	6.26	4.55	2.56	6.57	8.37	3.22	5.56	5.33	4.24	7.58	7.64
Konstruksi	4.75	6.21	4.91	6.33	(0.94)	(3.86)	5.76	7.91	5.62	(0.87)	3.94	7.79	15.82
Perdagangan Besar & Eceran	10.40	5.59	3.31	5.13	1.42	3.20	8.22	7.16	5.20	0.57	4.24	6.81	6.85
Transportasi dan Pergudangan	9.91	7.25	6.51	7.26	2.76	3.05	6.46	5.80	2.11	(6.58)	2.91	11.96	9.59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.21	9.68	3.07	5.65	7.74	6.79	8.37	8.70	6.12	(5.34)	2.07	9.16	7.69
Informasi dan Komunikasi	8.84	12.10	9.11	8.45	7.66	7.45	7.79	4.38	6.86	7.56	7.86	7.98	6.88
Jasa Keuangan	5.83	12.46	14.20	2.41	2.05	1.84	(0.72)	4.05	3.03	2.47	2.55	9.46	11.72
Real Estate	5.48	8.27	8.23	8.29	3.59	(0.83)	3.35	4.83	2.12	0.69	(0.72)	2.51	4.39
Jasa Perusahaan	14.35	8.54	8.22	8.29	(3.75)	(4.25)	3.54	4.96	1.43	(3.14)	2.46	5.36	6.64
Administrasi Pemerintahan	8.65	1.89	4.74	9.29	3.64	(3.27)	(3.47)	3.11	4.25	(3.83)	1.98	7.63	8.03
Jasa Pendidikan	23.03	19.09	18.74	12.23	9.88	7.06	6.73	7.73	4.64	2.96	2.42	3.49	4.84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.02	10.43	5.12	9.03	10.53	9.31	7.16	8.05	6.99	20.22	13.43	4.86	6.89
Jasa lainnya	6.24	3.66	3.38	7.38	8.81	7.81	6.44	9.02	8.16	(3.01)	1.17	6.96	7.97
PDRB	6.30	5.26	2.25	1.71	(1.20)	(0.38)	3.13	2.64	4.70	(2.90)	2.55	4.48	6.22

Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

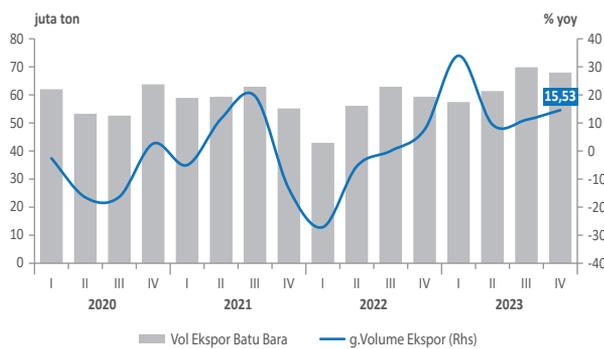
Grafik I.6 Pertumbuhan Ekonomi sisi Lapangan Usaha Utama Kaltim Sepanjang Tahun 2023

Pertambangan dan Penggalian

LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan IV 2023 tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. LU Pertambangan tumbuh sebesar 7,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,74% (yoy). Dengan pangsa sebesar 40,01% (yoy), LU Pertambangan memberikan andil pertumbuhan sebesar 3,31% (yoy) terhadap ekonomi Kaltim pada triwulan IV 2023.

Kinerja LU Pertambangan didorong oleh peningkatan permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama. Pada triwulan IV 2023, volume ekspor batu bara menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi meski harga acuan global masih dalam tren penurunan (Grafik I.7 dan I.8). Meski harga batu bara acuan terkontraksi 58,60% (yoy) dan berada pada level 127,05 USD/mt, namun harga tersebut masih berada di atas rata-rata harga sebelum tahun 2022, periode awal kenaikan harga batu bara yang cukup tajam (Grafik I.8).

Berdasarkan negara tujuannya, ekspor batu bara ke India mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2023 dibandingkan dengan negara tujuan ekspor lainnya. Pertumbuhan volume ekspor batu bara ke India pada triwulan IV 2023 mencapai sebesar 67,92% (yoy), setelah terkontraksi sebesar 9,79% (yoy) di triwulan



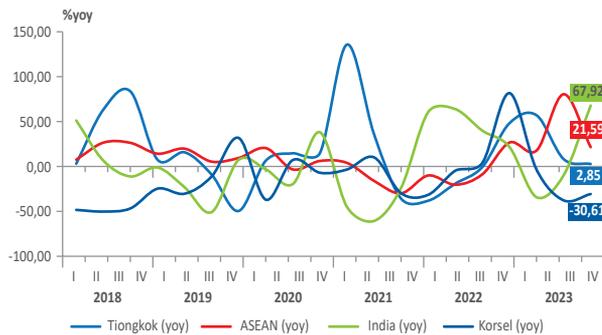
Grafik I.7 Perkembangan Volume Ekspor Batu Bara Kaltim



Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik I.8 Harga Batu Bara Acuan (HBA)

sebelumnya. Peningkatan volume ekspor tersebut didorong oleh tingginya permintaan dari negara tersebut untuk keperluan pembangkit listrik. Sementara itu, volume ekspor batu bara ke Korea Selatan juga membaik meski masih terkontraksi di angka 30,61% (yoy). Sebaliknya, pertumbuhan volume ekspor ke ASEAN dan Tiongkok melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada periode laporan, ekspor batu bara ke Tiongkok mengalami perlambatan dari yang semula tumbuh 8,34% (yoy) menjadi 2,85% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan oleh perlambatan ekonomi Tiongkok yang diikuti dengan lonjakan pasokan batu bara seiring upaya negara tersebut untuk meningkatkan cadangan batu bara di berbagai *power plant* yang dimiliki (Grafik I.9).



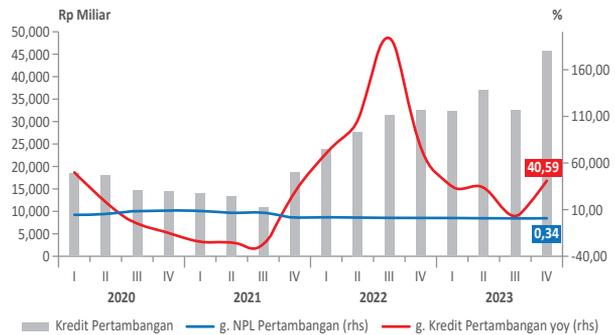
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.9 Perkembangan Volume Ekspor Batu Bara Ke Negara Tujuan Utama

Kinerja positif LU Pertambangan diikuti dengan pertumbuhan penyaluran kredit ke LU pertambangan yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2023, penyaluran kredit pertambangan tumbuh positif sebesar 40,59% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yakni 3,91% (yoy). Dari sisi kualitas, penyaluran kredit ke LU Pertambangan mengalami perbaikan dari 0,75% menjadi 0,34% (Grafik I.10).

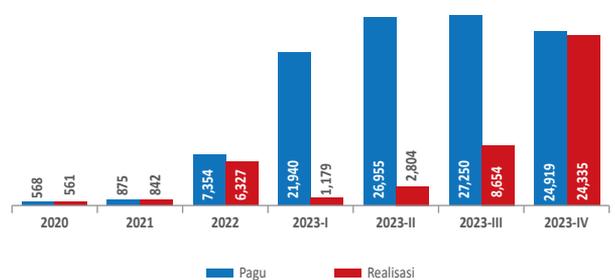
Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi selama triwulan IV 2023 tumbuh positif meski melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, kinerja LU Konstruksi tumbuh sebesar 12,63% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,26% (yoy). Dengan pangsa sebesar 11,52%, LU Konstruksi memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,06% (yoy). Tingginya kontribusi dan pangsa LU Konstruksi sejalan dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek strategis nasional (PSN) lainnya seperti *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Balikpapan. Dari sisi anggaran, realisasi APBN untuk IKN di triwulan IV 2023 tercatat sebesar 97,7% dari pagu dan meningkat relatif signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik I.11).



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik I.10 Kredit dan NPL Pertambangan



Sumber: DJPb Kaltim

Grafik I.11 Alokasi APBN IKN

Perlambatan yang dialami LU Konstruksi pada triwulan IV 2023 disebabkan oleh *high baseline factor*. Pertumbuhan LU Konstruksi di triwulan IV 2022 tercatat relatif tinggi seiring dengan pembangunan berbagai proyek di IKN pada periode tersebut. Perlambatan LU Konstruksi juga terkonfirmasi dari penjualan semen yang meskipun secara volume tercatat meningkat namun pertumbuhannya menurun dari sebesar 71,60% (yoy) di triwulan III 2023 menjadi 61,13% (yoy) di triwulan IV 2023 (Grafik I.12).

Sejalan dengan perlambatan kinerja LU Konstruksi, pertumbuhan kredit konstruksi juga tercatat mengalami kontraksi. Pertumbuhan kredit konstruksi pada triwulan IV 2023 berkontraksi sebesar 2,60% (yoy), setelah tumbuh sebesar 0,18% (yoy) pada triwulan



Sumber: ASI, diolah

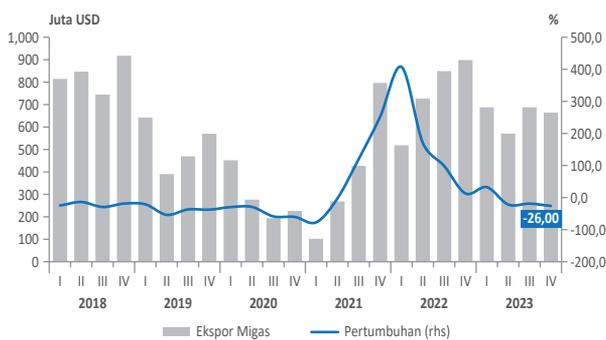
Grafik I.12 Pengadaan Semen Kaltim

sebelumnya. Meskipun demikian, risiko kredit konstruksi yang tergambar melalui NPL masih relatif rendah (Grafik I.21).

Industri Pengolahan

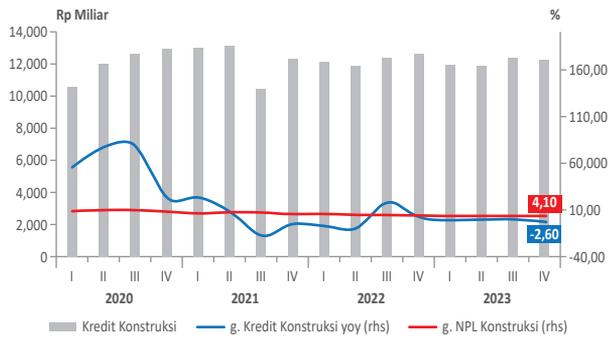
Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2023 melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. LU Industri Pengolahan mencatat pertumbuhan sebesar 0,12% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 7,84% (yoy). Dengan pangsa sebesar 18,30% (yoy), LU Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,02% (yoy) terhadap ekonomi Kaltim.

Perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan disebabkan penurunan nilai ekspor migas di



Sumber: BPS, diolah

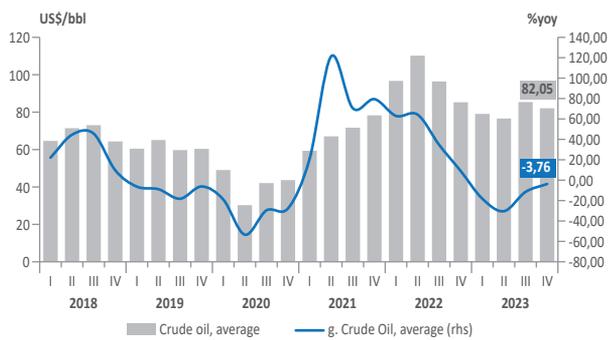
Grafik I.14 Perkembangan Ekspor Migas



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

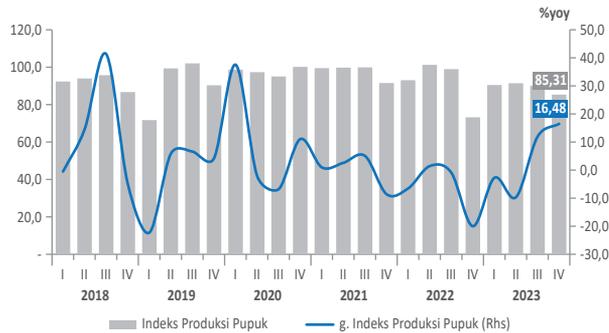
Grafik I.13 Kredit dan NPL Industri Pengolahan

tengah harga komoditas minyak yang masih terkontraksi serta penurunan indeks produksi pupuk. Pada periode laporan kinerja ekspor migas menunjukkan kontraksi yang semakin dalam, dari 18,93% (yoy) menjadi 26,00% (yoy) (Grafik I.14). Sejalan dengan hal tersebut, rata-rata harga minyak dunia juga turun dari 85,31 US dollar/bbl menjadi 82,05 US dollar/bbl, dengan pertumbuhan yang terkontraksi sebesar 3,76% (yoy) (Grafik I.15). Selain itu, indeks produksi pupuk juga menunjukkan penurunan dari 90,00 menjadi 85,31, meskipun pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik I.16).



Sumber: World Bank, diolah

Grafik I.15 Rata-rata Harga Minyak Dunia

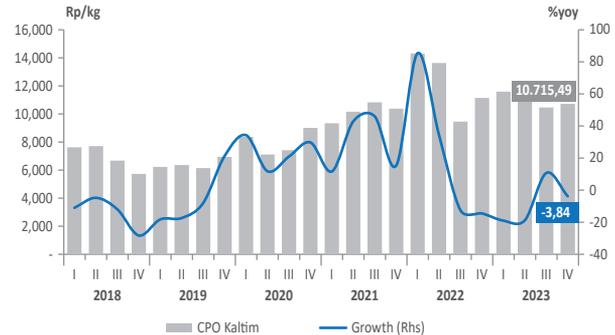


Grafik I.16 Indeks Produksi Pupuk

Perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan juga disebabkan melemahnya kinerja ekspor CPO dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Harga CPO Kaltim pada triwulan IV 2023 berkontraksi sebesar 3,84% (yoy), setelah tumbuh positif di triwulan sebelumnya sebesar 10,68% (yoy) (Grafik I.17). Penurunan harga CPO sejalan dengan penurunan harga minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai serta penurunan minyak mentah dunia. Jika dilihat dari penjualan CPO ke pasar global, ekspor CPO Kaltim berkontraksi sebesar 1,36% (yoy) setelah tumbuh positif sebesar 4,87% (yoy) di triwulan sebelumnya (Grafik I.18). Melambatnya



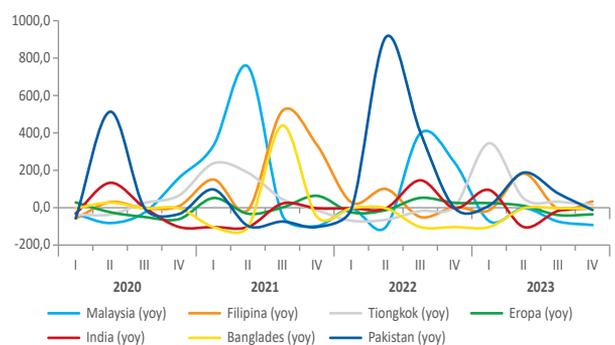
Grafik I.18 Perkembangan Ekspor CPO Kaltim



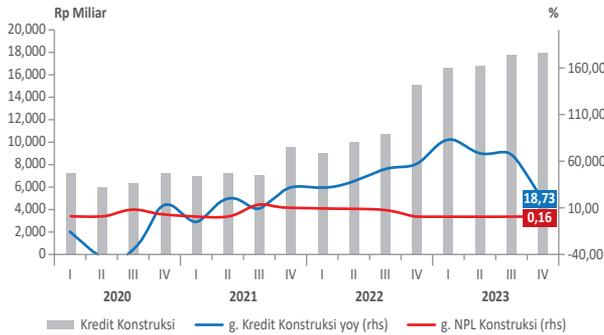
Grafik I.17 Perkembangan Harga CPO Kaltim

pertumbuhan ekspor CPO Kaltim dipicu oleh menurunnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama yaitu Tiongkok yang memegang pangsa pasar tertinggi ekspor CPO Kaltim (Grafik I.19).

Penyaluran kredit ke LU Industri Pengolahan menunjukkan perlambatan. Pada triwulan IV 2023, penyaluran kredit ke LU Industri Pengolahan masih tumbuh positif sebesar 18,73% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 67,25% (yoy). Berdasarkan kualitasnya, risiko kredit ke LU Industri Pengolahan masih berada pada level rendah sebesar 0,16% (Grafik I.20).



Grafik I.19 Perkembangan Ekspor CPO Kaltim ke Negara Tujuan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik I.20 Kredit dan NPL Industri Pengolahan



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.22 Nilai Tukar (NTP), Indeks Diterima (IT) serta Indeks Dibayarkan (I) Petani Kaltim

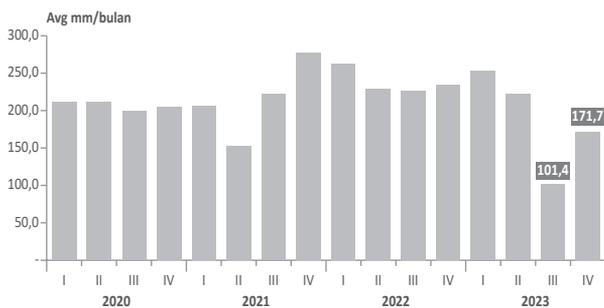
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya. Secara tahunan, kinerja LU Pertanian pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 3,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,17% (yoy). Dengan pangsa 8,27%, LU Pertanian mencatatkan berkontribusi sebesar 0,22% (yoy).

Membbaiknya kinerja LU Pertanian didorong oleh moderasi dampak El Nino dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Dampak El Nino mulai mengalami moderasi yang ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata curah hujan, dari 101,4 mm/bulan pada triwulan III 2023 menjadi 171,7 mm/bulan pada triwulan IV 2023 (Grafik I.21). Moderasi dampak El Nino tersebut juga

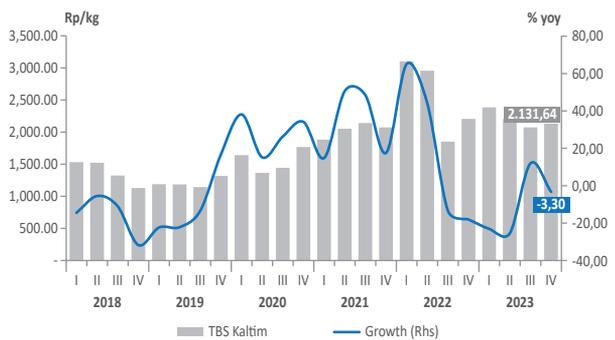
mendorong peningkatan NTP yang didorong oleh peningkatan indeks yang diterima petani (IT) seiring peningkatan kualitas panen dibandingkan triwulan sebelumnya. NTP pada triwulan IV 2023 tercatat 130,02, meningkat dari 126,49 pada triwulan sebelumnya. Indeks yang diterima petani juga tercatat meningkat dari sebesar 146,47 pada triwulan III 2023 menjadi 151,59 di triwulan IV 2023 (Grafik I.22).

Kinerja LU Pertanian juga tercermin dari produksi Tandan Buah Segar (TBS) sawit sebagai komoditas subsektor perkebunan. Berdasarkan harganya, pada triwulan IV 2023, harga TBS Kaltim tercatat meningkat meskipun pertumbuhannya masih terkontraksi sebesar 3,30% (yoy) dari pertumbuhan sebelumnya yang sebesar 11,87% (yoy) (Grafik I.23).



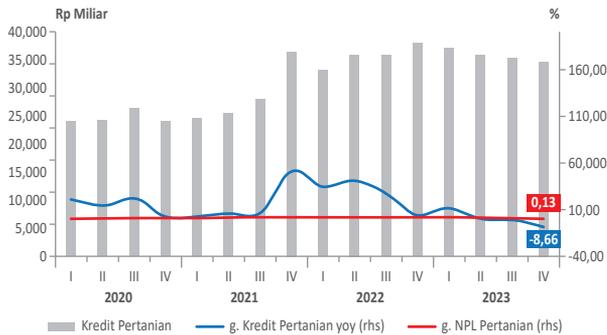
Sumber: BMKG, diolah

Grafik I.21 Perkembangan Rata-Rata Curah Hujan Kaltim



Sumber: Disbun Kaltim, diolah

Grafik I.23 Harga TBS Kaltim



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik I.24 Kredit dan NPL Pertanian Kaltim

Berbeda dengan kinerja LU pertanian yang lebih tinggi, kredit ke LU Pertanian terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit ke sektor pertanian dan kehutanan terkontraksi 8,66% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 1,39% (yoy). Namun jika dilihat berdasarkan risiko, risiko kredit LU Pertanian masih berada pada level yang rendah. Rasio NPL LU Pertanian dan Kehutanan tercatat sebesar 0,13%, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik I.24).

Perdagangan Besar & Eceran

LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh positif meski sedikit melambat dari triwulan sebelumnya. LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat tumbuh 4,11% (yoy), lebih rendah daripada triwulan sebelumnya sebesar 4,57% (yoy). Dengan pangsa sebesar 6,60%, LU Perdagangan memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 0,25% (yoy).

Menurunnya Kinerja LU Perdagangan sejalan dengan melambatnya pertumbuhan indeks penjualan riil Kaltim. Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia menunjukkan bahwa indeks penjualan riil di Kaltim secara umum tumbuh 4,1% (yoy), mengalami perlambatan setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 10,1% (yoy) (Grafik

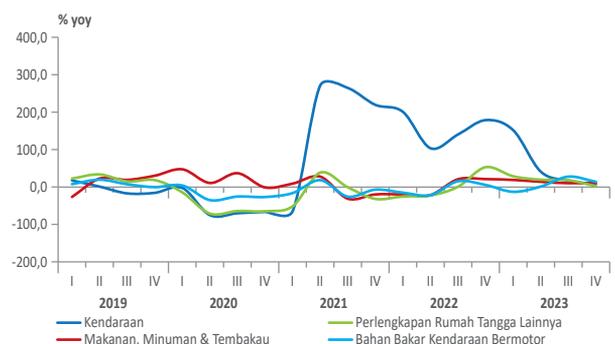


Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Grafik I.25 Indeks Penjualan Riil

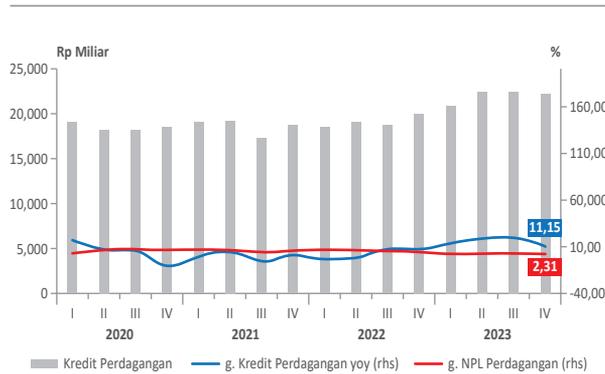
I.25). Hampir seluruh kelompok menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari delapan kelompok pembentuk, hanya kelompok suku cadang dan aksesoris serta makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi (Grafik I.26).

Penyaluran kredit ke LU Perdagangan tumbuh melambat sejalan dengan kinerja LU Perdagangan. Penyaluran kredit ke sektor perdagangan hanya tumbuh sebesar 11,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 20,57% (yoy). Meski demikian, risiko kredit ke sektor perdagangan membaik dan tercatat sebesar 2,31% (Grafik I.27).



Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Grafik I.26 Indeks Penjualan Riil Kaltim Berdasarkan Kelompok



Grafik I.27 Kredit dan NPL Lapangan Usaha Perdagangan

1.3. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran

Selama triwulan IV 2023, hampir seluruh komponen pengeluaran PDRB mencatatkan pertumbuhan positif yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatatkan pertumbuhan tertinggi. Komponen PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 8,58% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 12,06% (yoy). Perlambatan tersebut antara lain disebabkan oleh *high base effect*. Meski

demikian, PMTB tetap mencatatkan kontribusi yang tinggi seiring masifnya investasi di Kaltim, baik yang berasal dari pemerintah dalam pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, gedung pemerintahan), maupun investasi swasta (antara lain pabrik, rumah sakit, perhotelan). Sementara itu, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah secara berturut-turut mencatatkan kontribusi tertinggi kedua dan ketiga dengan pertumbuhannya yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Net Ekspor¹ juga mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya meski memiliki kontribusi yang relatif kecil dibandingkan 3 (tiga) komponen sebelumnya (Tabel I.3 dan Grafik I.28).

Distribusi pangsa PDRB tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari komponen Net Ekspor dan PMTB. Komponen Net Ekspor pada triwulan IV 2023 mencatatkan pangsa sebesar 38,24% dari total PDRB Kaltim diikuti oleh PMTB dengan pangsa sebesar 35,08%. Selain ketiga komponen tersebut, Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah juga memegang pangsa yang relatif tinggi masing-masing sebesar 17,09% dan 8,98% dari total PDRB Kaltim (Tabel I.3 dan Grafik I.29).

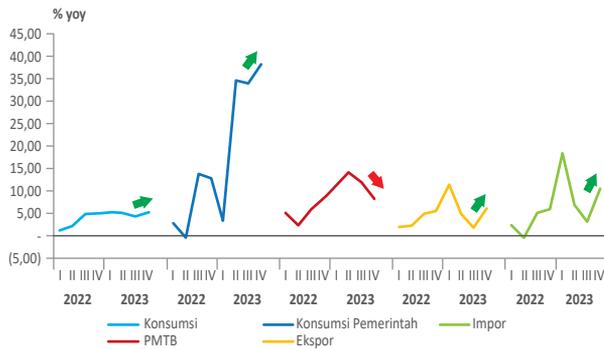
Tabel I.3 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan IV 2023 Berdasarkan Pengeluaran (yoy)

Berdasarkan Pengeluaran	2021				2022				2023					
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	IV	IV
	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy	yoy	yoy	andil	share
Konsumsi RT	-0,60	4,47	0,12	1,01	1,41	2,23	5,02	4,99	5,28	5,13	4,52	5,22	0,75	17,09
Konsumsi LNPRT	-0,01	0,34	0,76	1,49	3,10	2,99	4,40	1,68	5,02	5,94	0,53	11,02	0,05	0,54
Konsumsi Pemerintah	-4,71	14,30	-8,95	8,39	2,85	-0,48	13,88	13,09	3,44	34,74	34,10	38,15	1,94	8,98
PMTB	6,17	7,56	7,83	9,33	5,12	2,43	5,81	8,32	11,21	14,25	12,06	8,58	2,49	35,08
Perubahan Inventori	-65,14	0,07	-98,75	-92,77	-87,87	-15,26	978,35	660,10	667,17	-28,48	134,62	-2,29	0,00	0,07
Ekspor*)	-7,46	9,94	9,80	2,13	1,90	2,21	4,92	5,52	11,77	4,66	1,78	6,03	6,61	111,05
Impor*)	-7,41	15,36	14,00	3,34	2,42	-0,25	5,12	5,81	18,67	6,98	3,10	10,37	6,07	72,81
PDRB	-3,10	5,62	4,66	3,33	2,40	3,62	5,34	6,47	6,95	6,84	5,29	5,76	5,76	100,00

Sumber: BPS, diolah

* Nilai ekspor-impor yang digunakan mencakup ekspor-impor antar daerah dan luar negeri.

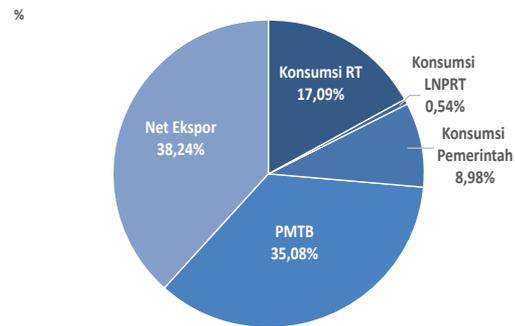
1. Net ekspor merupakan ekspor yang telah dikurangi dengan impor



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.28 Pertumbuhan Ekonomi sisi Pengeluaran Utama Kaltim Triwulan IV 2023 (% yoy)

Berdasarkan pertumbuhan masing-masing komponen pengeluaran, selama tahun 2023 Konsumsi Pemerintah dan PMTB mencatatkan pertumbuhan tertinggi. Konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh 36,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhannya tahun 2022 sebesar 9,54% (yoy). Sementara itu, PMTB tumbuh sebesar 11,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,19% (yoy). Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari masifnya pembangunan IKN pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif kedua komponen tersebut juga diikuti oleh komponen ekspor dan impor yang masing-masing tumbuh menguat dari 3,23% (yoy) dan 2,35% (yoy) menjadi 5,70% (yoy) dan 9,29% (yoy). Kinerja perdagangan juga membaik didorong oleh peningkatan volume ekspor. Dari sisi impor, meningkatnya importasi bahan baku pembangunan IKN dari luar wilayah Kaltim turut mendorong kinerja komponen ini. Sementara itu, konsumsi RT tumbuh sebesar 4,99% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhannya di tahun sebelumnya yakni 3,50% (yoy) seiring semakin membaiknya konsumsi masyarakat pasca pandemi Covid-19 pada 2 (dua) tahun yang lalu (Tabel I.4).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.29 Pangsa PDRB Kaltim Triwulan IV 2023 Berdasarkan Pengeluaran*)

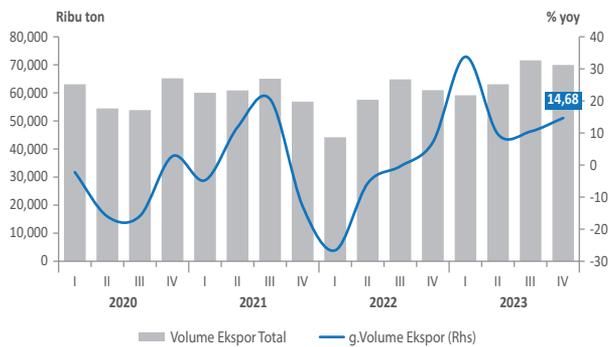
* pangsa diperoleh dari angka PDRB Triwulan IV 2023

Tabel I.4 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Tahun 2023 Berdasarkan Pengeluaran (% yoy)

Berdasarkan Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi RT	3.15	(0.43)	1.14	3.50	4.99
Konsumsi LNPRT	6.77	(1.00)	0.31	3.40	5.63
Konsumsi Pemerintah	8.11	(1.95)	2.03	9.54	36.40
PMTB	4.81	(1.06)	8.03	5.19	11.48
Perubahan Inventori	(49.91)	75.42	(70.02)	1.50	34.65
Ekspor*)	5.13	(3.22)	3.27	3.23	5.70
Impor*)	5.20	(1.86)	6.03	2.35	9.29
PDRB	4.70	(2.90)	2.55	4.48	6.22

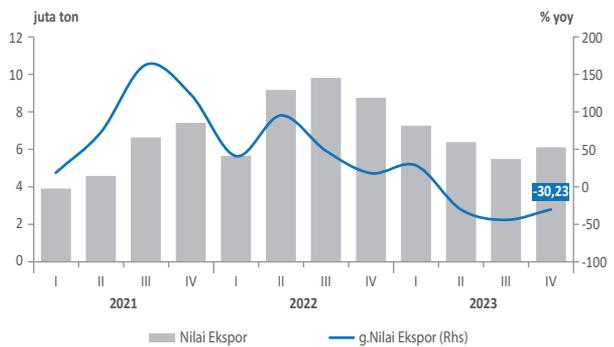
Ekspor

Komponen ekspor pada triwulan IV 2023 mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meski terjadi peningkatan ketidakpastian di perekonomian global, kinerja ekspor Kaltim tercatat meningkat dari 1,78% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 6,03% (yoy). Peningkatan komponen ekspor terutama didorong oleh pertumbuhan volume ekspor Kaltim. Meskipun demikian, total nilai ekspor Kaltim seluruh komoditas masih berkontraksi sebesar 30,23% (yoy), membaik dibandingkan total nilai ekspor di triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 47,14% (yoy) (Grafik I.31). Perbaikan nilai ekspor Kaltim bersumber dari ekspor nonmigas.



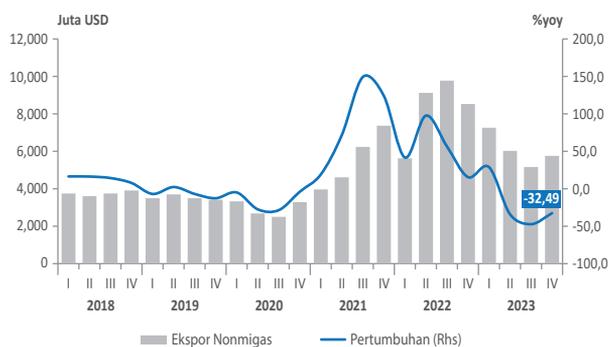
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.30 Perkembangan Volume Ekspor Kaltim



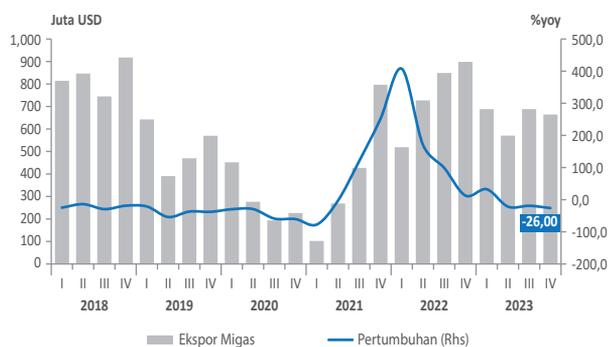
Sumber: Ditjen Bea Cukai diolah

Grafik I.31 Perkembangan Nilai Ekspor Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.32 Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.33 Perkembangan Nilai Ekspor Migas Kaltim

Meski masih berkontraksi, ekspor non migas Kaltim tumbuh sebesar 32,49% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 47,17% (yoy) (Grafik I.32). Membaiknya kinerja ekspor nonmigas terutama bersumber dari ekspor batu bara yang secara volume menguasai lebih dari 90% dari total volume ekspor Kaltim. Sementara itu, ekspor migas berkontraksi semakin dalam sebesar 26% (yoy) setelah sebelumnya berkontraksi sebesar 18,93% (yoy) (Grafik I.33).

Impor

Kinerja impor tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2023, impor Kaltim tumbuh 10,37% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,10% (yoy). Secara volume impor Kaltim menunjukkan peningkatan meski pertumbuhannya berkontraksi karena faktor *high base effect* volume impor triwulan IV 2022 yang cukup tinggi. Meski demikian kontraksi pertumbuhan tersebut tidak lebih dalam dibandingkan dengan triwulan lalu (Grafik I.34). Sejalan dengan pertumbuhan dari sisi volume, nilai impor juga berkontraksi sebesar 27,66% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 18,70% (yoy) (Grafik I.35). Penurunan terjadi pada nilai impor terutama bersumber dari impor non-migas yang berkontraksi sebesar 27,67% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan lalu yang berkontraksi sebesar 19,15% (yoy) (Grafik I.36).

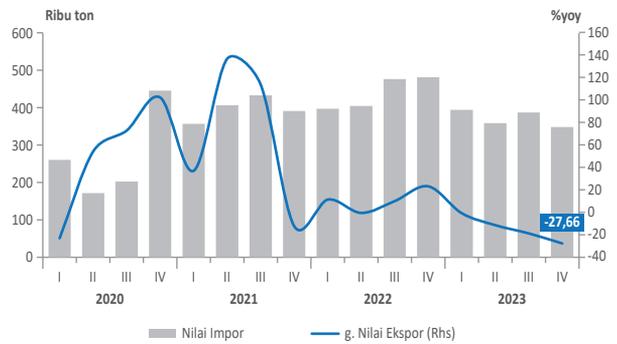
Sementara itu, impor migas tumbuh sebesar 2,64% (yoy) setelah berkontraksi sebesar 3,55% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik I.37). Jika dilihat berdasarkan jenis barang, kinerja impor didorong oleh impor barang konsumsi

yang tumbuh tinggi serta perbaikan kinerja impor barang bahan baku sementara impor barang modal mengalami perlambatan (Grafik I.38).



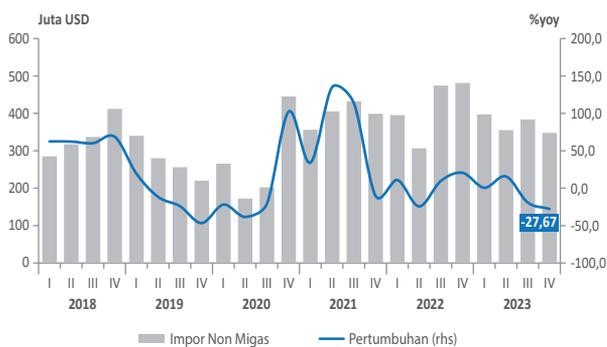
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.34 Perkembangan Volume Impor Kaltim



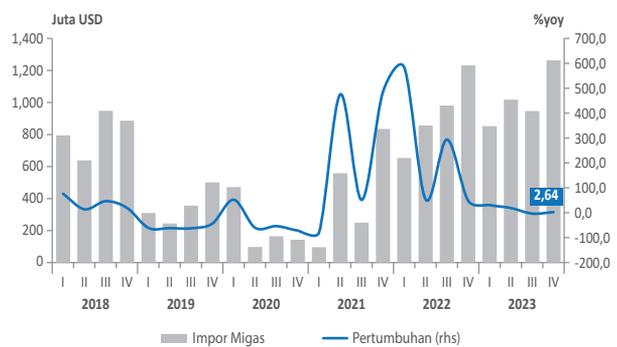
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.35 Perkembangan Nilai Impor Kaltim



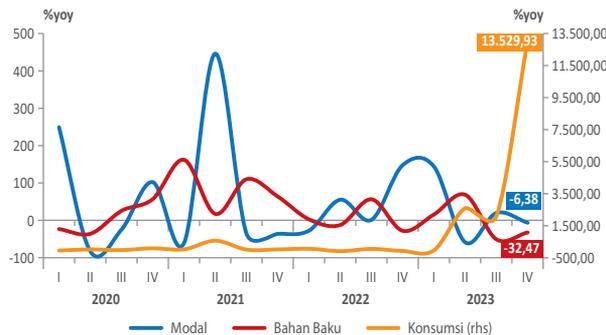
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.36 Perkembangan Impor Non-Migas Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.37 Perkembangan Impor Migas Kaltim



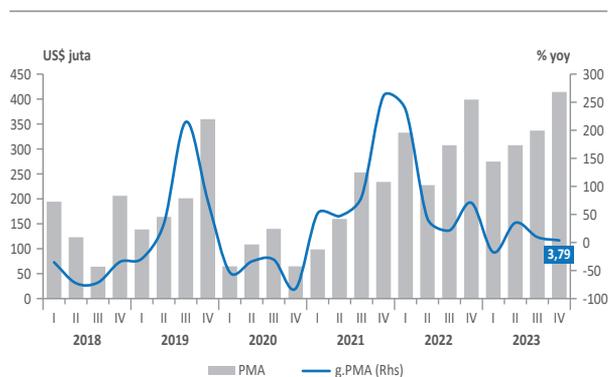
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.38 Pertumbuhan Impor Barang Modal, Bahan Baku, dan Konsumsi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - Investasi

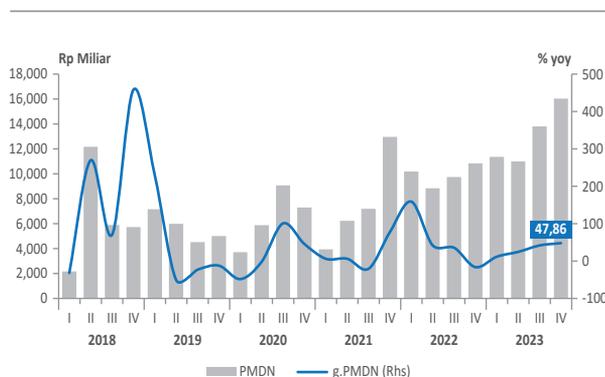
Kinerja PMTB (investasi) Kaltim tumbuh positif seiring berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional meskipun melambat akibat *high base effect*. PMTB (Investasi) pada triwulan IV 2023 tercatat tumbuh sebesar 8,58% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 12,06% (yoy). Peningkatan investasi terutama bersumber dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh 47,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 41,63% (yoy) (Grafik I.39). Penanaman Modal Asing (PMA) juga tumbuh positif sebesar 3,79% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 9,58% (yoy) (Grafik I.40).

Kenaikan investasi baik PMA maupun PMDN bersumber dari investasi pada LU sekunder, sementara LU primer mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan PMA dan PMDN di LU sekunder masing-masing sebesar 20,64% (yoy) dan 0,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 7,41% (yoy) dan 0,44% (yoy). Sementara itu, investasi di LU primer mengalami perlambatan sebesar 8,72% (yoy) dari 45,69% (yoy) untuk investasi asing (PMA) dan sebesar 0,14% (yoy) dari 78,69% (yoy) untuk investasi dalam negeri (PMDN). Untuk investasi di LU tersier tercatat meningkat untuk PMA yakni dari 167,06% (yoy) menjadi 322,8% (yoy), namun untuk PMDN mengalami perlambatan dari 220,12% (yoy) menjadi 1,36% (yoy) (Grafik



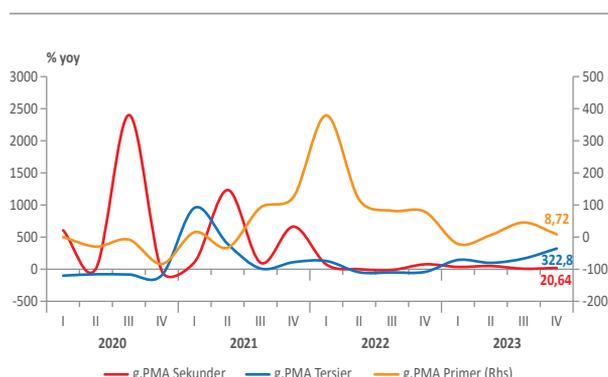
Sumber: BKPM, diolah

Grafik I.39 Penanaman Modal Asing (PMA) Kaltim



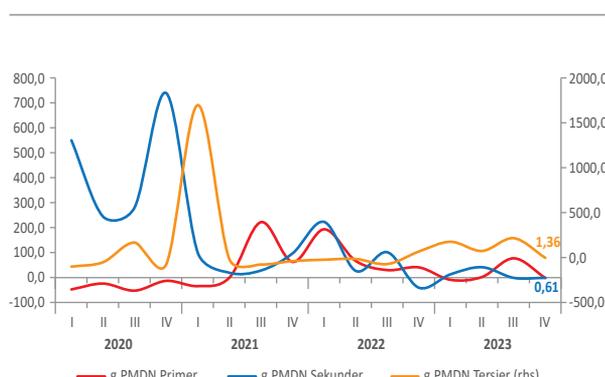
Sumber: BKPM, diolah

Grafik I.40 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kaltim



Sumber: BKPM, diolah

Grafik I.41 Pertumbuhan PMA Kaltim Berdasarkan Sektor



Sumber: BKPM, diolah

Grafik I.42 Pertumbuhan PMDN Kaltim berdasarkan Sektor

1.41 dan 1.42). Tingginya pertumbuhan pada PMA tersier tidak terlepas dari meningkatnya investasi di bidang konstruksi seiring masifnya pembangunan proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Pertamina.

Konsumsi Rumah Tangga

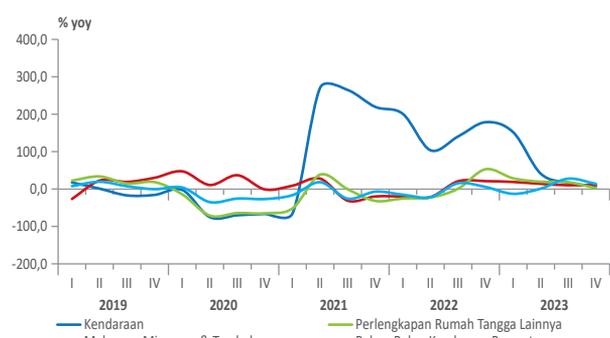
Konsumsi rumah tangga (RT) pada triwulan IV 2023 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan momen HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru). Konsumsi RT mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,22% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,52% (yoy) didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat menjelang HBKN Nataru sebagaimana juga tercermin

dari peningkatan Indeks Penjualan Riil (IPR), meskipun pertumbuhannya melambat yang disebabkan oleh *high base effect* dari triwulan IV tahun sebelumnya (Grafik 1.43). Berdasarkan komponennya, makanan, minuman, dan tembakau mengalami pertumbuhan IPR di tengah perlambatan sebagian besar komponen lain (Grafik 1.44). Membaiknya konsumsi rumah tangga tidak terlepas dari optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini yang tergambar melalui indeks kondisi ekonomi yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi pada triwulan IV 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.45). Membaiknya konsumsi masyarakat juga sejalan dengan hasil *liaison* Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan peningkatan *likert scale* (LS) permintaan domestik (Grafik 1.46).



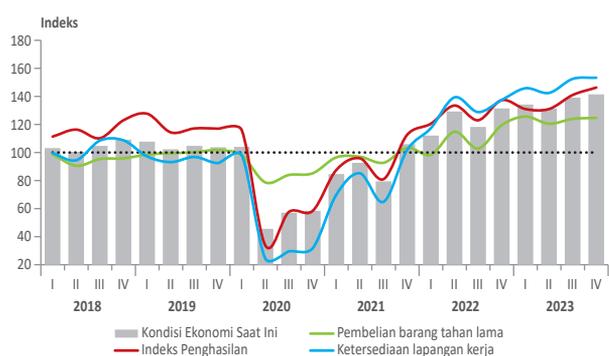
Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.43 Perkembangan Indeks Penjualan Riil Kaltim



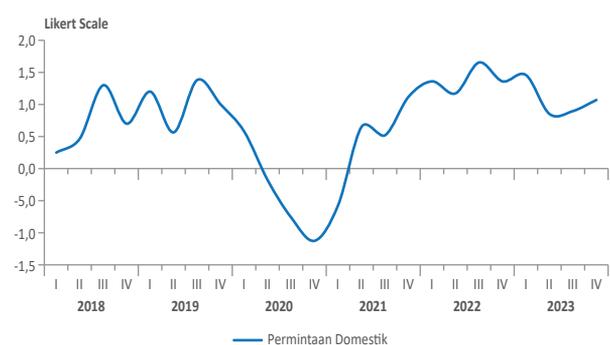
Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.44 Perkembangan Indeks Penjualan Riil Kaltim Berdasarkan Komponennya



Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.45 Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini



Sumber: Liaison Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.46 LS Liaison Domestik

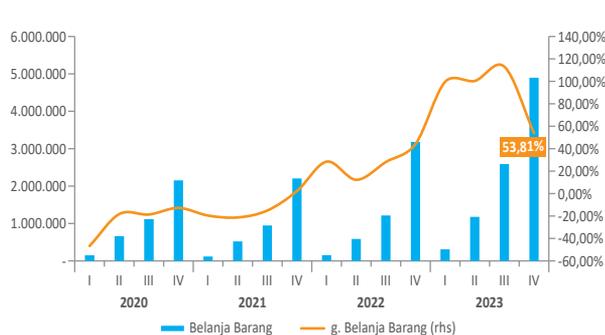
Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah tumbuh positif pada triwulan IV 2023, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring peningkatan realisasi belanja pemerintah. Konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 38,15% (yoy), terakselerasi dari kinerja triwulan sebelumnya sebesar 34,10% (yoy). Peningkatan konsumsi pemerintah tidak terlepas dari peningkatan realisasi belanja pemerintah di triwulan IV 2023 yang lebih

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun pertumbuhannya melambat (Grafik I.47). Jika dilihat berdasarkan komponen belanja operasional, belanja barang mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 53,81% (yoy) sejalan dengan meningkatnya belanja barang untuk mendukung pembangunan IKN seperti untuk keamanan atau dukungan manajemen satuan kerja pelaksana pembangunan IKN (Grafik I.48).



Grafik I.47 Pertumbuhan Realisasi Belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur



Grafik I.48 Perkembangan Belanja Barang APBD Provinsi Kalimantan Timur



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 2

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Secara umum, pagu pendapatan dan belanja APBD 2023 di tingkat Provinsi mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- Kinerja keuangan Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota di Kaltim turut mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, baik realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah.
- Capaian realisasi APBN di wilayah Kaltim hingga triwulan IV 2023 meningkat di tengah berlanjutnya pembangunan berbagai proyek pemerintah.

2.1. Gambaran Umum

Pada tahun 2023, pagu pendapatan Pemprov Kaltim yang bersumber dari APBD meningkat sebesar 49,95% (yoy). Berdasarkan nilai nominal, pagu pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp14,62 triliun di APBD awal 2023, meningkat menjadi 18,69 triliun pada APBD perubahan 2023. Nilai pagu tersebut meningkat 49,95% (yoy) terutama berasal dari peningkatan pagu pendapatan dari hampir seluruh komponen. Pertumbuhan pagu PAD didorong oleh peningkatan pagu pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sebaliknya, pagu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercatat lebih rendah dibandingkan dengan pagu tahun 2022. Pagu pendapatan transfer Pemprov Kaltim pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, lain-lain pendapatan yang sah juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 didorong oleh komponen pendapatan lainnya (Tabel II.1).

Pagu pendapatan pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Kaltim juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan pagu pendapatan tahun 2022. Total pagu pendapatan daerah yang

Tabel II.2 Pagu Pendapatan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	2022	2023	% Perubahan (yoy)
	APBD-P Rp Miliar	APBD-P Rp Miliar	
PENDAPATAN			
Kota Samarinda	3.019,19	3.850,62	27,54
Kota Balikpapan	2.827,40	3.723,31	31,69
Kota Bontang	1.566,98	2.160,86	37,90
Kab. Kutai Kartanegara	5.719,59	9.088,86	58,91
Kab. Kutai Barat	2.666,24	3.602,67	35,12
Kab. Kutai Timur	4.461,07	8.256,14	85,07
Kab. Paser	2.547,80	3.565,79	39,96
Kab. Penajam Paser Utara	1.688,79	2.151,10	27,38
Kab. Berau	2.856,00	4.377,45	53,27
Kab. Mahakam Ulu	1.330,64	1.769,55	32,98
Total Kab/Kota Kaltim	28.683,70	42.546,34	48,33

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

semula sebesar Rp35,78 triliun di APBD murni 2023, meningkat menjadi Rp42,55 triliun pada APBD perubahan 2023. Pagu pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kaltim mengalami peningkatan sebesar 48,33% (yoy) dari tahun 2022. Peningkatan pagu pendapatan terbesar terjadi di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp8,26 triliun atau meningkat 85,07% (yoy) dari pagu pendapatan tahun 2022 (Tabel II.2).

Tabel II.1 APBD Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 & 2023

	2022	2023	% Perubahan (yoy)
	APBD-P Rp Juta	APBD-P Rp Juta	
PENDAPATAN (I+II+III)	12.469.541	18.698.659	49,95%
I. PAD	7.073.974	9.245.939	30,70%
Pajak daerah	5.844.145	7.739.500	32,43%
Retribusi daerah	15.858	17.841	12,50%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	334.220	249.739	-25,28%
Lain-lain PAD yang sah	879.750	1.238.859	40,82%
II. Pendapatan Transfer (a+b)	5.382.824	9.369.707	74,07%
a. Dana Perimbangan	5.382.824	9.369.707	74,07%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak & Dana Alokasi Umum/Khusus	5.345.654	9.369.707	75,28%
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	37.169	-	-
Dana Penyesuaian	37.169	-	-
III. Lain-lain Pendapatan yang sah	12.744	83.013	551,39%
Pendapatan Hibah	12.744	13.859	8,75%
Pendapatan Lainnya	-	69.154	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Pagu APBD Belanja

Sejalan dengan peningkatan pagu pendapatan, pagu belanja yang bersumber dari APBD pada 2023 turut mengalami peningkatan. Pagu anggaran belanja tercatat sebesar Rp21,64 triliun, meningkat sebesar 47,48% (yoy) dari tahun 2022, meningkat dari target pada APBD murni 2023 sebesar Rp17,10 triliun. Peningkatan pagu belanja bersumber dari belanja operasional, modal, dan transfer. Pada tahun 2023, pagu belanja operasional tercatat sebesar Rp10,18 triliun, meningkat 28,61% (yoy) dari tahun sebelumnya terutama didorong oleh pagu belanja barang dan belanja hibah. Sementara itu, pagu belanja modal tercatat Rp5,71 triliun, meningkat sebesar 115,73% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2022 didorong oleh pagu belanja tanah dan jalan, irigasi, dan jaringan (Tabel II.3).

Pagu anggaran belanja pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Nilai pagu belanja meningkat dari target pada APBD murni 2023 sebesar Rp37,70 triliun menjadi Rp51,87 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, peningkatan pagu belanja mencapai 62,92% (yoy) terutama didorong oleh peningkatan pagu belanja pada Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Tabel II.4).

Tabel II.4 Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	2022	2022	% Perubahan (yoy)
	APBD-P Rp Miliar	APBD-P Rp Miliar	
PENDAPATAN			
Kota Samarinda	3.334,53	4.839,22	45,12
Kota Balikpapan	3.273,13	4.280,18	30,77
Kota Bontang	1.656,44	2.532,27	52,87
Kab. Kutai Kartanegara	6.558,21	11.789,13	79,76
Kab. Kutai Barat	3.171,73	4.510,94	42,22
Kab. Kutai Timur	4.512,13	9.788,71	116,94
Kab. Paser	2.919,49	4.513,40	54,60
Kab. Penajam Paser Utara	1.660,01	2.283,60	37,51
Kab. Berau	3.395,93	5.177,88	52,47
Kab. Mahakam Ulu	1.358,29	2.159,29	58,97
Total Kab/Kota Kaltim	31.840,59	51.874,62	62,92

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

2.2. APBD Pemerintah Provinsi

Gambaran Umum Realisasi APBD Pemprov Kaltim

Realisasi pendapatan dan belanja APBD Pemprov Kaltim lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi pendapatan bersumber dari komponen PAD dan lain-lain pendapatan yang sah, sementara peningkatan realisasi belanja terutama bersumber dari belanja modal dan operasional (Tabel II.5).

Tabel II.3 Pagu Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2022 & 2023

	2022	2023	% Perubahan (yoy)
	APBD-P Rp Juta	APBD-P Rp Juta	
BELANJA (I+II+III+IV)	14.679.878	21.649.509	47,48%
I. Belanja Operasional	7.919.760	10.185.606	28,61%
Belanja Pegawai	3.076.714	2.781.022	-9,61%
Belanja Barang	3.461.342	5.505.555	59,06%
Belanja Hibah	471.135	686.905	45,80%
Belanja Bantuan sosial	52.725	14.624	-72,26%
Belanja Bantuan Keuangan	857.845	1.197.500	39,59%
II. Belanja Modal	2.648.734	5.714.130	115,73%
Belanja Tanah	118.295	333.883	182,25%
Belanja Peralatan Mesin	1.002.333	1.864.506	86,02%
Belanja Bangunan dan Gedung	673.863	1.408.766	109,06%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	835.585	2.056.356	146,10%
Belanja Aset Tetap Lainnya	18.657	36.068	93,32%
III. Belanja tidak terduga	597.316	381.701	-36,10%
Belanja tidak terduga	597.316	381.701	-36,10%
IV. Transfer	3.514.068	5.368.073	52,76%
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	3.514.068	5.368.073	52,76%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Tabel II.5 Realisasi APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023

	2022			2023			Selisih	%
	APBD-P	Realisasi Tw-IV		APBD-P	Realisasi Tw-IV			
	Rp Juta	Rp Juta	%	Rp Juta	Rp Juta	%		
PENDAPATAN (I+II+III)	12.469.541	16.813.694	134,84	18.698.659	17.657.851	94,43	844.157	5,02
I. PAD	7.073.974	9.006.263	127,32	9.245.939	10.334.559	111,77	1.328.296,00	14,75
II. Pendapatan Transfer	5.382.824	7.790.284	144,72	9.369.707	6.914.043	73,79	-876.241,00	-11,25
III. Lain-lain Pendapatan yang sah	12.744	17.147	134,55	83.013	409.249	492,99	392.102,00	2.286,71
	2022			2023			Selisih	%
	APBD-P	Realisasi Tw-IV		APBD-P	Realisasi Tw-IV			
	Rp Juta	Rp Juta	%	Rp Juta	Rp Juta	%		
BELANJA (I+II+III+IV)	14.679.878	12.393.746	84,43	21.649.509	19.625.334	90,65	7.231.588	58,35
I. Belanja Operasional	7.919.760	6.864.325	86,67	10.185.606	9.371.659	92,01	2.507.334	36,53
II. Belanja Modal	2.648.734	1.980.010	74,75	5.714.130	5.017.154	87,80	3.037.144	153,39
III. Belanja tidak terduga	597.316	6.689	1,12	381.701	50.441	13,21	43.752	654,09
IV. Transfer	3.514.068	3.542.722	100,82	5.368.073	5.186.080	96,61	1.643.358	46,39

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan APBD Pemprov Kaltim tercatat meningkat. Realisasi pendapatan hingga triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp17,65 triliun atau meningkat 5,02% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi pendapatan terutama bersumber dari peningkatan realisasi komponen PAD dan lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi PAD hingga triwulan IV 2023 tercatat Rp10,33, meningkat 14,75% (yoy) dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terutama bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, realisasi pendapatan transfer hingga

triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp6,91 triliun, terkontraksi 11,25% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer terjadi pada seluruh komponen. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah hingga triwulan IV 2023 sebesar Rp402,9 miliar sejalan dengan kenaikan realisasi pendapatan hibah dan pendapatan lainnya (Tabel II.6).

Berdasarkan pada komponen APBD, PAD pada APBD memiliki pangsa terbesar dibandingkan dengan komponen lainnya. Pangsa pendapatan PAD terhadap total pendapatan mencapai 58,53%, merupakan komponen dengan

Tabel II.6 Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023

	2022			2023			Selisih	% Perubahan Realisasi (yoy)
	APBD-P	Realisasi Tw-IV		APBD-P	Realisasi Tw-IV			
	Rp Juta	Rp Juta	%	Rp Juta	Rp Juta	%		
PENDAPATAN (I+II+III)	12.469.541	16.813.694	134,84	18.698.659	17.658.251	94,44	844.557	5,02
I. PAD	7.073.974	9.006.263	127,32	9.245.939	10.334.959	111,78	1.328.696	14,75
Pajak daerah	5.844.145	7.632.597	130,60	7.739.500	8.698.125	112,39	1.065.528	13,96
Retribusi daerah	15.858	19.981	126,00	17.841	67.985	381,06	48.004	240,25
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	334.220	310.263	92,83	249.739	260.236	104,20	(50.027)	100,00
Lain-lain PAD yang sah	879.750	1.043.422	118,60	1.238.859	1.308.612	105,63	265.190	25,42
II. Pendapatan Transfer (a+b)	5.382.824	7.790.284	144,72	9.369.707	6.914.043	73,79	(876.241)	-11,25
a. Dana Perimbangan	5.382.824	7.753.115	144,03	9.369.707	6.914.043	73,79	(839.072)	-10,82
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak & Dana Alokasi Umum/Khusus	5.345.654	7.753.115	145,04	9.369.707	6.914.043	73,79	(839.072)	-10,82
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	37.169	37.169	100	-	-	-	(37.169)	-100,00
Dana Penyesuaian	37.169	37.169	100	-	-	-	(37.169)	-100,00
III. Lain-lain Pendapatan yang sah	12.744	17.147	134,55	83.013	409.249	492,99	392.102	2.286,71
Pendapatan Hibah	12.744	17.147	134,55	13.859	340.094	2.453,96	322.947	1.883,40
Pendapatan Lainnya	-	-	-	69.154	69.154,00	100,00	69.154	0,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Grafik II.1 Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim (dalam %)

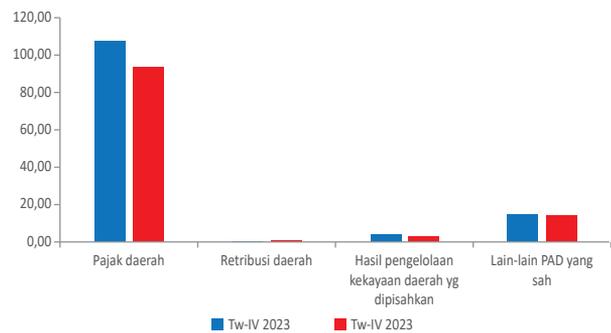
pangsa terbesar dibandingkan dengan pangsa pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah masing-masing sebesar 39,15% dan 2,32% (Grafik II.1). Sumber utama pendapatan PAD berasal dari pajak daerah dengan pangsa sebesar 94,08%, diikuti oleh lain-lain PAD yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Grafik II.2).

Tingkat kemandirian fiskal pada triwulan IV 2023 masih berada pada level positif. Hal tersebut tercermin dari Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Kaltim yang tercatat sebesar 58,53% sejalan dengan realisasi PAD Kaltim dalam periode tersebut, lebih tinggi dibandingkan



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Grafik II.3 Derajat Otonomi Fiskal Pemprov Kaltim



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Grafik II.2 Komponen Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023 (dalam %)

dengan triwulan IV 2022 sebesar 53,57% (Grafik II.3). DOF merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mencari pendapatan yang bersumber dari daerahnya masing-masing. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Pemprov Kaltim memiliki ketergantungan yang relatif rendah terhadap dana transfer dari pusat.

Realisasi Belanja

Realisasi belanja tercatat meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun didorong oleh belanja tidak terduga dan belanja modal yang lebih tinggi. Realisasi belanja hingga triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp19,62 triliun, meningkat 58,35% dibandingkan triwulan IV 2022 (yoy) (Tabel II.7). Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi belanja tidak terduga dan belanja modal. Realisasi belanja tidak terduga tercatat sebesar Rp50,44 miliar, meningkat 654,09% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp5,01 triliun, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 153,39% (yoy).

Tabel II.7 Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023

	2022			2023			Selisih	% Perubahan Realisasi (yoy)
	APBD-P	Realisasi Tw-IV		APBD-P	Realisasi Tw-IV			
	Rp Juta	Rp Juta	%	Rp Juta	Rp Juta	%		
BELANJA (I+II+III+IV)	14.679.878	12.393.746	84,43	21.649.509	19.625.333	90,65	7.231.587	58,35
I. Belanja Operasional	7.919.760	6.864.325	86,67	10.185.606	9.371.659	92,01	2.507.334	36,53
Belanja Pegawai	3.076.714	2.334.586	75,88	2.781.022	2.661.188	95,69	326.602	13,99
Belanja Barang	3.461.342	3.184.224	91,99	5.505.555	4.897.588	88,96	1.713.364	53,81
Belanja Hibah	471.135	432.032	91,70	686.905	603.504	87,86	171.472	39,69
Belanja Bantuan sosial	52.725	50.939	96,61	14.624	11.879	81,23	(39.060)	-76,68
Belanja Bantuan Keuangan	857.845	862.545	100,55	1.197.500	1.197.500	100,00	334.955	38,83
II. Belanja Modal	2.648.734	1.980.010	74,75	5.714.130	5.017.154	87,80	3.037.144	153,39
Belanja Tanah	118.295	85.070	71,91	333.883	215.878	64,66	130.808	153,77
Belanja Peralatan Mesin	1.002.333	755.306	75,35	1.864.506	1.649.479	88,47	894.173	118,39
Belanja Bangunan dan Gedung	673.863	421.589	62,56	1.408.766	1.189.662	84,45	768.073	182,19
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	835.585	702.084	84,02	2.056.356	1.914.792	93,12	1.212.708	172,73
Belanja Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya	18.657	15.961	85,55	36.068	47.347	131,27	31.386	196,64
III. Belanja tidak terduga	597.316	6.689	1,12	381.701	50.441	13,21	43.752	654,09
Belanja tidak terduga	597.316	6.689	1,12	381.701	50.441	13,21	43.752	100,00
IV. Transfer	3.514.068	3.542.722	100,82	5.368.073	5.186.080	96,61	1.643.358	46,39
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	3.514.068	3.542.722	100,82	5.368.073	5.186.080	96,61	1.643.358	46,39

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

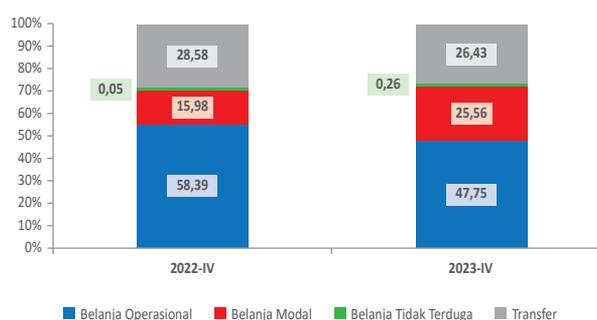
Komponen belanja tidak terduga mengalami peningkatan. Realisasi belanja tidak terduga hingga triwulan IV 2023 sebesar Rp50,44 miliar, lebih tinggi 654,09% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2022 yang mencapai Rp6,68 miliar.

Peningkatan realisasi belanja operasional didorong oleh peningkatan belanja barang dan hibah. Realisasi belanja operasional hingga triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp9,37 triliun (Tabel II.7), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp6,84 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan komponen belanja barang dan hibah yang masing-masing tumbuh 53,81% (yoy) dan 39,69% (yoy).

Realisasi belanja tumbuh lebih tinggi didukung oleh peningkatan realisasi belanja bangunan dan gedung, serta belanja aset tetap lainnya dan aset lainnya. Realisasi belanja modal hingga triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp5,01 triliun, meningkat 153,39% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel II.7). Peningkatan tersebut terutama bersumber dari realisasi belanja bangunan dan gedung dan belanja aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Realisasi komponen transfer turut mengalami peningkatan terutama bersumber dari realisasi bagi hasil pajak ke kabupaten/kota/desa. Realisasi transfer hingga triwulan IV 2023 sebesar Rp5,18 triliun, tumbuh 46,39% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel II.7). Peningkatan realisasi transfer ini disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja bagi hasil pajak ke kabupaten/kota/desa.

Berdasarkan komponen APBD, belanja operasional APBD memiliki pangsa terbesar dibandingkan dengan komponen lainnya.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Grafik II.4 Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023 (dalam %)

Pangsa belanja operasional APBD Pemprov Kaltim terhadap total belanja daerah mencapai 47,75% merupakan komponen dengan pangsa terbesar dibandingkan dengan pangsa belanja daerah lainnya (Grafik II.4). Pangsa belanja operasional yang besar pada tahun 2023 terutama didorong peningkatan realisasi belanja pegawai dan belanja barang.

2.3. APBD Kabupaten/Kota

Realisasi Pendapatan

Hingga triwulan IV 2023, peningkatan realisasi pendapatan didorong oleh peningkatan yang terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Realisasi pendapatan APBD kabupaten/kota di Kaltim hingga triwulan IV 2023 mengalami peningkatan mencapai Rp42,20 triliun,

meningkat 27,66% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara spasial, peningkatan realisasi pendapatan terbesar pada Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat (Tabel II.8).

Realisasi Belanja

Secara umum, realisasi belanja APBD kabupaten/kota juga tercatat meningkat. Hingga triwulan IV 2023 realisasi belanja kabupaten/kota mencapai Rp43,82 triliun, meningkat 65,58% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Secara spasial, peningkatan realisasi belanja tertinggi tercatat pada Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Tabel II.9).

Tabel II.8 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	2022			2023			Selisih	% Perubahan (yoy)
	APBD-P	Realisasi Tw-IV		APBD-P	Realisasi Tw-IV			
	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%		
PENDAPATAN								
Kota Samarinda	3.019,19	3.671,11	121,59	3.850,62	4.023,70	104,49	352,59	9,60
Kota Balikpapan	2.827,40	2.869,13	101,48	3.723,31	3.326,62	89,35	457,49	15,95
Kota Bontang	1.566,98	1.797,91	114,74	2.160,86	2.429,84	112,45	631,93	35,15
Kab. Kutai Kartanegara	5.719,59	7.443,53	130,14	9.088,86	7.677,34	84,47	233,81	3,14
Kab. Kutai Barat	2.666,24	2.737,67	102,68	3.602,67	4.117,48	114,29	1.379,81	50,40
Kab. Kutai Timur	4.461,07	4.934,07	110,60	8.256,14	8.421,80	102,01	3.487,73	70,69
Kab. Paser	2.547,80	3.131,57	122,91	3.565,79	3.116,76	87,41	(14,81)	(0,47)
Kab. Penajam Paser Utara	1.688,79	1.757,84	104,09	2.151,10	2.232,48	103,78	474,64	27,00
Kab. Berau	2.856,00	3.169,40	110,97	4.377,45	4.678,62	106,88	1.509,22	47,62
Kab. Mahakam Ulu	1.330,64	1.543,58	116,00	1.769,55	2.173,26	122,81	629,68	40,79
Total Kab/Kota Kaltim	28.683,70	33.055,81	115,24	42.546,34	42.197,89	99,18	9.142,08	27,66

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim

Tabel II.9 Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan IV 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	2022			2023			Selisih	% Perubahan (yoy)
	APBD-P	Realisasi Tw-II (a)		APBD-P	Realisasi Tw-II (b)			
	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%		
PENDAPATAN								
Kota Samarinda	3.334,53	2.987,85	89,60	4.839,22	4.392,97	90,78	1.405,12	47,03
Kota Balikpapan	3.273,13	2.745,40	83,88	4.280,18	3.635,26	84,93	889,86	32,41
Kota Bontang	1.656,44	1.444,49	87,20	2.532,27	2.193,04	86,60	748,55	51,82
Kab. Kutai Kartanegara	6.558,21	5.475,96	83,50	11.789,13	10.077,70	85,48	4.601,74	84,04
Kab. Kutai Barat	3.171,73	2.091,67	65,95	4.510,94	3.212,77	71,22	1.121,10	53,60
Kab. Kutai Timur	4.512,13	3.557,84	78,85	9.788,71	8.179,70	83,56	4.621,86	129,91
Kab. Paser	2.919,49	2.540,65	87,02	4.513,40	3.918,82	86,83	1.378,17	54,24
Kab. Penajam Paser Utara	1.660,71	1.542,13	92,86	2.283,60	2.065,71	90,46	523,58	33,95
Kab. Berau	3.395,93	2.906,90	85,60	5.177,88	4.486,64	86,65	1.579,74	54,34
Kab. Mahakam Ulu	1.358,29	1.169,40	86,09	2.159,29	1.653,11	76,56	483,71	41,36
Total Kab/Kota Kaltim	31.840,59	26.462,28	83,11	51.874,62	43.815,72	84,46	17.353,44	65,58

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

2.4. APBN di Wilayah Kaltim

Gambaran Umum Kinerja APBN Kalimantan Timur s.d Desember 2023

Hingga triwulan IV 2023, realisasi APBN baik pendapatan maupun belanja mengalami akselerasi. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, pendapatan negara tumbuh 23,27% bersumber dari pajak batu bara dan pertambangan. Belanja tercatat tumbuh sebesar 58,48% dengan realisasi belanja 98,72% dari total pagu yang terdiri dari persentase realisasi belanja K/L sebesar 97,23% dan transfer ke daerah (TKD) sebesar 99,72%. Pagu belanja K/L lingkup Kaltim tahun 2023 senilai Rp35,12 triliun, dialokasikan sebesar Rp27,34 triliun (77,84%) untuk Kementerian PUPR dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar IKN yang sebagian besar berupa belanja modal. Alokasi untuk pembangunan IKN tersebut berkontribusi terhadap peningkatan signifikan pada alokasi belanja modal yang naik hampir 3,5 kali lipat dibandingkan dengan alokasi belanja modal pada tahun 2022. Transfer ke daerah

tumbuh 28,16% didominasi oleh kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) (Tabel II.10).

Kinerja Pendapatan APBN Kalimantan Timur

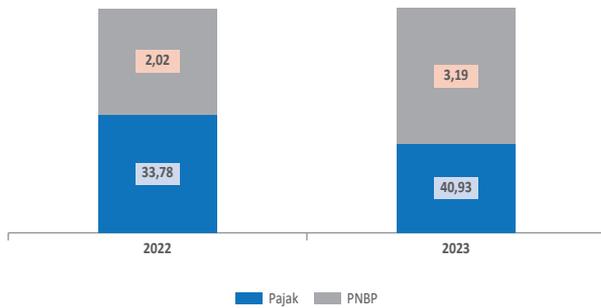
Realisasi pendapatan APBN wilayah Kaltim mencapai Rp44,12 triliun. Hingga triwulan IV 2023 capaian tersebut mencapai 107,49% dari pagu Rp41,05 triliun. Penerimaan Perpajakan sampai dengan bulan Desember meningkat 21,19% (yoy) bersumber dari penerimaan Pajak Dalam Negeri, sementara capaian pendapatan pajak internasional pada periode yang sama tercatat lebih rendah daripada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan juga didorong oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,19 triliun atau mencapai 191,82% dari total pagu (Grafik II. 5).

Membaiknya kinerja penerimaan pajak dalam negeri dipengaruhi oleh peningkatan kegiatan ekspor khususnya batu bara, perdagangan, transportasi dan pergudangan, industri

Tabel II.10 Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN di Kalimantan Timur s.d Desember 2023

	2022		2023			
	Target/ Pagu	Realisasi	Target/ Pagu	Realisasi	% Realisasi	Growth %
A. Pendapatan dan Hibah	19,08	35,79	41,05	44,12	107,49%	23,27%
I. Penerimaan Dalam Negeri	19,08	35,79	41,05	44,12	107,49%	23,27%
1. Penerimaan Perpajakan	17,62	33,78	39,38	40,93	103,93%	21,19%
a. Pajak Dalam Negeri	16,55	29,07	37,19	39,2	105,39%	34,82%
b. Pajak Perdagangan Internasional	1,07	4,7	2,19	1,74	79,26%	-63,08%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,47	2,02	1,66	3,19	191,82%	58,14%
B. Belanja Negara	63,26	54,37	87,27	86,15	98,72%	58,48%
I. Belanja Pemerintah Pusat	15,08	13,78	35,12	34,14	97,23%	147,73%
1. Belanja Pegawai	3,16	3,11	3,13	3,08	98,41%	-0,93%
2. Belanja Barang	3,42	3,25	4,63	4,43	95,55%	36,38%
3. Belanja Modal	8,48	7,42	27,34	26,62	97,38%	258,93%
4. Bantuan Sosial	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00%	21,48%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	48,18	40,58	52,16	52,01	99,72%	28,16%
1. Dana Bagi Hasil	38,79	31,53	42,74	42,74	99,99%	35,52%
2. Dana Alokasi Umum	5,34	5,34	5,64	5,62	99,72%	5,35%
3. Dana Transfer Khusus	3,07	2,73	2,82	2,71	96,04%	-1,03%
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0,96	0,87	0,7	0,66	94,79%	-24,07%
b. Dana Alokasi Khusus NonFisik	2,11	1,86	2,12	2,05	96,45%	9,70%
4. Dana Insentif Daerah	0,22	0,22	0,16	0,16	98,09%	-30,39%
5. Dana Desa	0,76	0,75	0,8	0,79	98,96%	5,06%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah



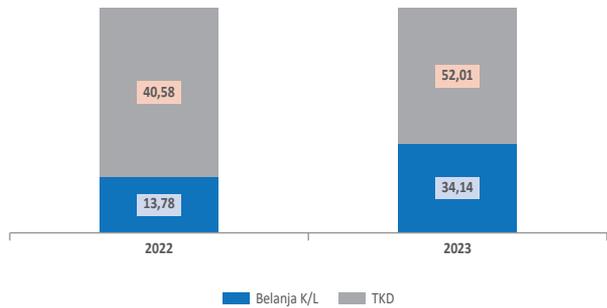
Sumber: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, diolah

Grafik II.5 Kinerja Pendapatan APBN Kaltim

pengolahan serta kepatuhan pembayaran pajak. Namun demikian, perlambatan Pajak Perdagangan Internasional disebabkan oleh penurunan penerimaan Bea Keluar akibat koreksi harga referensi komoditas batu bara serta CPO. Dari sisi PNBP, peningkatan didorong oleh peningkatan pada seluruh komponen PNBP, yakni PNBP lainnya dan Pendapatan BLU di akhir tahun.

Kinerja Belanja APBN Kalimantan Timur

Realisasi belanja APBN Provinsi Kaltim sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp86,15 triliun. Capaian ini tercatat 98,72% dari pagu sebesar Rp87,27 triliun. Realisasi didorong oleh belanja K/L sebesar Rp34,14 triliun (97,23% dari pagu), terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara. Pada tahun 2023, kinerja pelaksanaan anggaran di Kaltim sangat dipengaruhi oleh masifnya pembangunan IKN disebabkan besarnya alokasi anggaran yang dialokasikan. Sementara itu, belanja TKD mencapai Rp52,01 triliun (99,72% dari Pagu sebesar Rp52,16 triliun) didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Grafik II.6).



Sumber: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, diolah

Grafik II.6 Kinerja Pendapatan APBN Kaltim

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD)

Realisasi transfer ke daerah dan dana desa tercatat sebesar 99,72%. Hingga akhir Desember 2023, penyaluran TKD mencapai Rp52,01 triliun atau lebih tinggi daripada penyaluran pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp40,58 triliun. Realisasi TKD umumnya digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik daerah.

Realisasi penyaluran Dana Desa (DD) hingga triwulan IV 2023 tercatat sebesar 98,96%. Realisasi DD untuk 841 desa yang tersebar pada tujuh kabupaten di Provinsi Kaltim terserap cukup tinggi mencapai Rp793,06 miliar dari total pagu anggaran Rp801,39 miliar. Penyaluran DD tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran DD dilakukan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga tidak mampu senilai Rp33,32 miliar per triwulan untuk 841 desa di Kaltim. Secara spasial, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbesar (Tabel II.11).

Tabel II.11 Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN di Kalimantan Timur s.d Desember 2023

No.	Nama Pemda	Jml Desa	Alokasi Dana Desa 2023			Tahap III		BLT Triwulan IV		Realokasi		Total	
			Rp Juta	Rp Juta	%	Rp Juta	%	Rp Juta	%	Rp Juta	%		
1	KAB. P A S E R	139	122.311	25.081	20,51	4.212	3,44	3.910	3,2	120.380	98,42		
2	KAB. PENAJAM PASER UTARA	30	29.453	3.416	11,6	1.337	4,54	1.012	3,44	29.453	100		
3	KAB. KUTAI BARAT	190	162.209	27.632	17,03	7.359	4,54	5.306	3,27	162.209	100		
4	KAB. KUTAI KERTANEGARA	193	192.420	30.476	15,84	8.076	4,2	5.516	2,87	192.420	100		
5	KAB. KUTAI TIMUR	139	148.693	27.675	18,61	6.249	4,2	3.910	2,63	146.660	98,63		
6	KAB. MAHAKAM ULU	50	52.634	11.093	21,08	2.008	3,81	1.536	2,92	48.261	91,69		
7	KAB. B E R A U	100	93.677	17.181	18,34	4.085	4,36	2.932	3,13	93.677	100		
JUMLAH		841	801.399	142.554	17,79	33.325	4,16	24.123	3,01	793.061	98,96		

Sumber: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, diolah



BAB 3

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

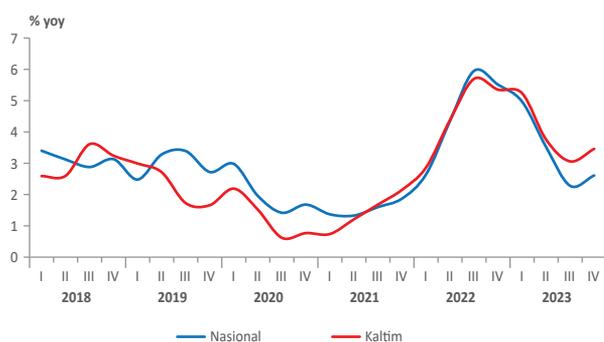
RINGKASAN EKSEKUTIF

- *Inflasi gabungan kota Samarinda dan kota Balikpapan pada triwulan IV 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.*
- *Peningkatan inflasi terutama didorong oleh peningkatan aktivitas MICE seiring dengan kepindahan IKN, meningkatnya permintaan moda transportasi angkutan udara, dan konsumsi bahan pangan seiring momentum HBKN Nataru. Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bensin seiring dengan penyesuaian tarif BBM oleh Pemerintah.*
- *Dua kota pembentuk IHK Kaltim, Samarinda dan Balikpapan, mencatatkan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan IV 2023 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan secara berturut-turut tercatat sebesar 3,37% (yoy) dan 3,60% (yoy). Komoditas yang menjadi pendorong inflasi di kedua kota tersebut adalah makanan, minuman, dan tembaku serta transportasi.*

3.1. Gambaran Umum

Pada triwulan IV 2023, inflasi gabungan 2 (dua) kota IHK di Kaltim (Samarinda dan Balikpapan) lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya. Inflasi pada periode tersebut tercatat sebesar 3,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,07% (yoy) (Grafik III.1) dan juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,61% (yoy). Faktor pendorong inflasi di kedua kota tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas MICE sebagai dampak dari kepindahan IKN. Meningkatnya aktivitas MICE mendorong peningkatan jumlah penumpang angkutan udara sebesar 25,61% (yoy) diiringi dengan peningkatan okupansi hotel yang mencapai 68% pada bulan Desember 2023, tertinggi sepanjang tahun 2023. Peningkatan konsumsi masyarakat seiring dengan momentum HBKN Nataru juga turut mendorong inflasi. Laju peningkatan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bensin pasca diumumkannya penurunan tarif BBM oleh Pemerintah.

Sepanjang tahun 2023, inflasi tahunan gabungan 2 (dua) kota IHK di Kaltim lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Inflasi gabungan 2 (dua) Kota IHK di Kaltim selama tahun 2022 tercatat sebesar 5,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama di tahun 2023 yang dipengaruhi oleh faktor *base effect*. Inflasi Kaltim sepanjang tahun



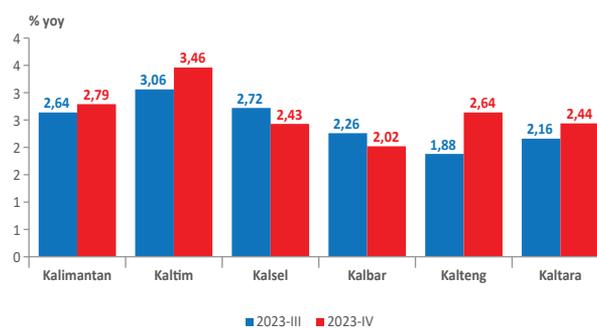
Sumber: BPS, diolah

Grafik III.1 Inflasi Kaltim dan Nasional

2022 tercatat relatif tinggi seiring dengan proses *recovery* ekonomi dan membaiknya penanganan COVID-19. Selain itu, penyesuaian berbagai harga komoditas seiring dengan peningkatan tarif PPN turut mendorong tekanan inflasi pada tahun 2022.

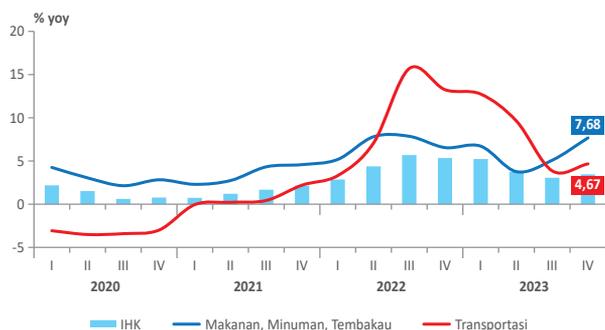
Peningkatan inflasi gabungan 2 kota IHK di Kaltim sejalan dengan inflasi gabungan kota IHK di 2 provinsi Kalimantan lainnya. Inflasi gabungan kota IHK di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing tercatat sebesar 2,44% (yoy), dan 2,64% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan inflasi gabungan kota IHK di kedua provinsi Kalimantan tersebut sejalan dengan inflasi gabungan kota IHK di Kaltim (Grafik III.2). Sementara itu, inflasi gabungan seluruh kota IHK di wilayah Kalimantan selama triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,64% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi memiliki kontribusi dan laju inflasi tertinggi dalam inflasi gabungan 2 kota IHK Kaltim. Pada triwulan IV 2023, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat memiliki laju inflasi sebesar 7,68% (yoy) dengan andil 2,14% (yoy). Sementara itu, laju inflasi transportasi tercatat sebesar 4,67% (yoy) dengan andil 0,63% (yoy) (Grafik III.3).



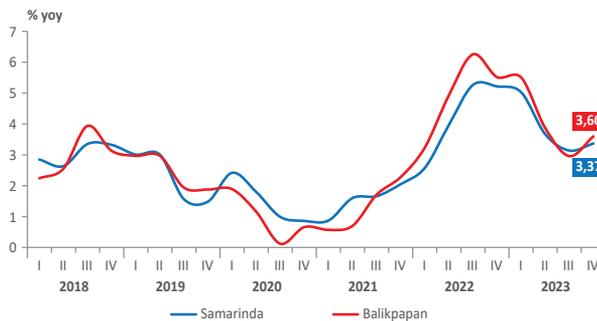
Sumber: BPS, diolah

Grafik III.2 Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di seluruh Provinsi di Kalimantan, Q3 dan Q4 2023



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.3 Kelompok Utama Pendorong Inflasi Gabungan 2 Kota IHK Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.4 Inflasi Samarinda & Balikpapan

Secara spasial, Kota Samarinda dan Balikpapan mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2023, Kota Samarinda mengalami inflasi sebesar 3,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,14% (yoy). Sementara itu, Kota Balikpapan mengalami inflasi sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,06% (yoy). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi masih menjadi penyumbang utama inflasi di kedua kota tersebut. Pergerakan inflasi di kedua kota IHK tersebut relatif sejalan, namun Kota Balikpapan mencatatkan inflasi IHK yang lebih tinggi sejak triwulan IV 2021 (Grafik III.4).

3.1.1. Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Inflasi gabungan 2 Kota IHK di Kaltim terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi. Pada triwulan IV 2023, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat memiliki laju inflasi sebesar 7,68% (yoy) dengan andil 2,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,09% (yoy). Sementara itu, kelompok transportasi tercatat memiliki laju inflasi sebesar 4,67% (yoy) dengan andil 0,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,86% (yoy) (Tabel III.1).

Tabel III.1 Kelompok Barang Pembentuk Inflasi Gabungan 2 Kota IHK di Kaltim Triwulan IV Tahun 2023 (yoy)

No	Kelompok Barang	Laju Inflasi Tahun 2022				Laju Inflasi Tahun 2022				Laju Inflasi Tahun 2023				Laju Inflasi Tahun 2023			
		Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV												
	UMUM / TOTAL	2,86	4,38	5,69	5,35	2,86	4,38	5,69	5,35	5,24	3,76	3,07	3,46	5,24	3,76	3,07	3,46
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	5,19	7,81	7,86	6,55	1,42	2,16	2,16	1,81	6,72	3,77	5,09	7,68	1,88	1,07	1,43	2,14
2	Pakaian Dan Alas Kaki	-1,64	-1,83	-1,46	-0,64	-0,07	-0,08	-0,06	-0,03	1,02	0,49	0,67	0,52	0,04	0,02	0,03	0,02
3	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	2,02	3,37	4,00	3,87	0,46	0,77	0,91	0,88	3,15	2,16	1,43	0,80	0,71	0,49	0,32	0,18
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	5,18	5,43	5,77	4,29	0,21	0,22	0,24	0,12	1,96	1,14	-0,35	0,16	0,08	0,05	-0,01	0,01
5	Kesehatan	0,97	1,82	0,93	1,71	0,03	0,06	0,03	0,05	2,23	1,61	1,43	1,09	0,07	0,05	0,04	0,03
6	Transportasi	3,31	7,08	15,71	13,26	0,42	0,88	1,96	1,68	12,75	9,62	3,86	4,67	1,61	1,23	0,53	0,63
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	-0,20	-0,66	-0,59	-0,37	-0,01	-0,04	-0,03	-0,02	-0,12	-0,11	0,19	0,25	-0,01	-0,01	0,01	0,01
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	1,20	2,05	2,80	3,35	0,02	0,03	0,05	0,06	3,30	2,75	2,25	1,92	0,05	0,04	0,04	0,03
9	Pendidikan	0,50	0,63	2,06	2,03	0,02	0,02	0,06	0,06	2,71	2,78	0,98	0,98	0,08	0,08	0,03	0,03
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/ Restoran	0,91	0,88	1,02	3,85	0,09	0,08	0,10	0,37	5,19	5,65	5,61	2,38	0,49	0,52	0,52	0,22
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya Balikpapan	5,15	4,93	5,12	5,61	0,28	0,27	0,28	0,31	3,95	3,61	2,53	2,69	0,22	0,20	0,14	0,15

Sumber: BPS, diolah

Peningkatan laju inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama didorong oleh komoditas beras. Peningkatan laju inflasi terutama disebabkan oleh komoditas beras disebabkan adanya gangguan pasokan di tengah fenomena El Nino. Namun laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga komoditas pangan menjelang akhir triwulan IV 2023, seperti minyak goreng, bawang merah, dan ikan layang (Tabel III.2).

Kelompok transportasi mencatatkan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi tersebut terutama didorong oleh normalisasi permintaan, khususnya pada komoditas angkutan udara seiring dengan momentum HBKN Nataru. Peningkatan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bensin pasca diumumkannya penurunan tarif BBM (Tabel III.2).

3.1.2. Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kota IHK

Inflasi di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan mengalami peningkatan pada triwulan IV 2023. Kota Samarinda tercatat mengalami inflasi sebesar 3,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,14% (yoy). Kota Balikpapan juga mengalami inflasi sebesar 3,60% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,96% (yoy) (Tabel III.3). Berdasarkan kelompok barang, baik di Samarinda maupun di Balikpapan, laju inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki pangsa terbesar dalam inflasi Kota Samarinda dengan laju dan pangsa yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan Kota

Tabel III.2 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Tahunan Gabungan 2 Kota IHK Kaltim Triwulan III & IV Tahun 2023

Jul-23	Aug-23	Sep-23
Komoditas Inflasi	Komoditas Inflasi	Komoditas Inflasi
BENSIN BERAS ROKOK KRETEK FILTER NASI DENGAN LAUK BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	BENSIN BERAS ANGKUTAN UDARA ROKOK KRETEK FILTER NASI DENGAN LAUK	BERAS ROKOK KRETEK FILTER ANGKUTAN UDARA NASI DENGAN LAUK BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA
Komoditas Deflasi	Komoditas Deflasi	Komoditas Deflasi
MINYAK GORENG CABAI RAWIT ANGKUTAN UDARA TOMAT BAWANG MERAH	MINYAK GORENG BAWANG MERAH CABAI RAWIT IKAN LAYANG/ IKAN BENGGOL SABUN CAIR/CUCI PIRING	MINYAK GORENG CABAI RAWIT BAWANG MERAH SABUN CAIR/CUCI PIRING SEMEN
Oct-23	Nov-23	Dec-23
Komoditas Inflasi	Komoditas Inflasi	Komoditas Inflasi
BERAS ANGKUTAN UDARA ROKOK KRETEK FILTER MOBIL SEWA RUMAH	BERAS ANGKUTAN UDARA ROKOK KRETEK FILTER CABAI RAWIT EMAS PERHIASAN	BERAS ANGKUTAN UDARA CABAI RAWIT ROKOK KRETEK FILTER EMAS PERHIASAN
Komoditas Deflasi	Komoditas Deflasi	Komoditas Deflasi
MINYAK GORENG BAWANG MERAH BAYAM SEMEN SABUN CAIR/CUCI PIRING	MINYAK GORENG IKAN LAYANG/ IKAN BENGGOL BAWANG MERAH SEMEN SABUN MANDI CAIR	MINYAK GORENG BAWANG MERAH SEMEN BAWANG MERAH IKAN LAYANG/ IKAN BENGGOL

Sumber: BPS, diolah

Tabel III.3 Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk (yoy)

Wilayah	2020				2021				2022				2023			
	I	II	III	IV												
Kaltim	2,19	1,52	0,62	0,77	0,74	1,21	1,68	2,15	2,86	4,38	5,69	5,35	5,24	3,76	3,06	3,46
Samarinda	2,42	1,80	0,99	0,86	0,87	1,60	1,66	2,05	2,58	3,97	5,27	5,22	5,03	3,67	3,14	3,37
Balikpapan	1,89	1,16	0,12	0,66	0,57	0,70	1,71	2,28	3,23	4,93	6,26	5,52	5,51	3,87	2,96	3,60

Sumber: BPS, diolah

Balikpapan. Laju dan pangsa inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Kota Samarinda masing-masing tercatat sebesar 8,42% (yoy) dan 2,31% (yoy), sementara di Kota Balikpapan masing-masing tercatat sebesar 6,76% (yoy) dan 1,47% (yoy) (Tabel III.4). Di kedua kota tersebut, laju dan pangsa inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan IV 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2023 terdampak oleh terganggunya pasokan komoditas beras akibat fenomena El Nino.

Sementara itu, laju dan pangsa inflasi juga tercatat cukup besar di Kota Samarinda dan Balikpapan. Laju dan pangsa inflasi kelompok transportasi di Kota Samarinda masing-masing tercatat sebesar 3,22% (yoy) dan 0,49% (yoy), sementara laju dan pangsa inflasi kelompok transportasi di Kota Balikpapan masing-masing tercatat sebesar 7,17% (yoy) dan 0,63% (yoy) (Tabel III.4). Laju dan pangsa inflasi kelompok transportasi di Kota Samarinda lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, sebaliknya

di Kota Balikpapan tercatat lebih tinggi. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh tarif angkutan antar kota yang mengalami penurunan di Kota Samarinda, sementara di Kota Balikpapan masih menunjukkan laju yang sama.

3.1.3. Tracking Inflasi Triwulan I 2024

Tekanan inflasi pada triwulan I 2024 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2023 dan berada pada rentang target sasaran inflasi. Laju inflasi yang lebih rendah terutama disebabkan oleh penyesuaian kembali harga-harga komoditas pasca momentum HBKN Nataru dan masa panen beberapa komoditas pangan di bulan Februari yang diperkirakan akan menurunkan harga sejumlah komoditas pangan. Normalisasi permintaan moda transportasi angkutan udara seiring dengan berakhirnya momentum HBKN Nataru turut mendorong penurunan inflasi triwulan I 2024. Meskipun demikian, kontraksi

Tabel III.4 Inflasi Kota Pembentuk IHK di Kaltim Menurut Kelompok Barang (yoy)

		Andil Inflasi Samarinda 2023-IV	Andil Inflasi Balikpapan 2023-IV	Laju Inflasi Samarinda 2023-IV	Laju Inflasi Balikpapan 2023-IV	Andil Inflasi Samarinda 2023-III	Andil Inflasi Balikpapan 2023-III	Laju Inflasi Samarinda 2023-III	Laju Inflasi Balikpapan 2023-III
	UMUM / TOTAL	3,37	3,60	3,37	3,60	3,14	2,96	3,14	2,96
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	2,31	1,47	8,42	6,76	1,60	0,92	5,83	4,17
2	Pakaian Dan Alas Kaki	0,03	0,01	0,69	0,30	0,06	-0,01	1,48	-0,34
3	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,04	0,27	0,22	1,44	0,27	0,29	1,31	1,56
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,03	-0,02	0,81	-0,59	-0,04	0,01	-0,97	0,39
5	Kesehatan	0,01	0,05	0,35	3,04	0,04	0,03	1,13	2,23
6	Transportasi	0,49	0,63	3,22	7,17	0,53	0,40	3,48	4,51
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	0,01	0,01	0,20	0,31	0,01	0,01	0,13	0,27
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	0,06	-0,01	3,84	-0,86	0,06	0,00	3,59	0,32
9	Pendidikan	0,03	0,03	0,84	1,16	0,03	0,03	0,84	1,16
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	0,21	0,18	2,17	2,69	0,45	0,46	4,65	7,05
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	0,14	0,13	2,52	2,91	0,13	0,12	2,33	2,77

Sumber: BPS, diolah

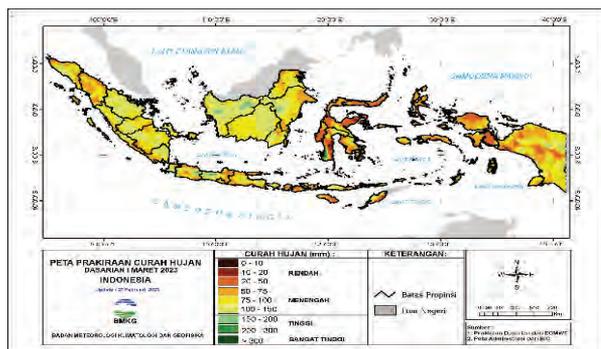
yang lebih dalam diperkirakan akan tertahan oleh potensi kenaikan harga memasuki bulan Ramadhan pada bulan Maret 2024.

Pada triwulan I 2024, sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan dan memiliki potensi banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan dengan intensitas menengah. Wilayah Kalimantan Timur juga diperkirakan akan mengalami curah hujan dengan intensitas menengah (Gambar III.1). BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi banjir dengan intensitas rendah dan menengah termasuk sebagian besar wilayah Kalimantan Timur (Gambar III.2). Curah hujan dan potensi banjir diperkirakan akan mulai mereda pada bulan Februari 2024. Indeks Nino 34 juga menunjukkan angka +118 yang mengindikasikan masih adanya potensi El Nino pada level moderat hingga rendah pada semester I 2024 (Gambar III.3).

Pada bulan Januari 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan penyesuaian tahun dasar dalam perhitungan inflasi menjadi tahun dasar 2022. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebagai salah satu dasar dalam penghitungan IHK. Penyesuaian tahun dasar dilakukan untuk menangkap perubahan

pola konsumsi masyarakat serta perkembangan jenis barang dan jasa yang digunakan. Selain itu, juga dilakukan penambahan cakupan wilayah penghitung inflasi. Untuk Provinsi Kaltim, Kabupaten/Kota penghitung inflasi bertambah menjadi 4 (empat) yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya, penamaan perhitungan inflasi Provinsi yang sebelumnya disebut sebagai inflasi gabungan Kota IHK disesuaikan menjadi inflasi Provinsi.

Inflasi Provinsi Kaltim secara tahunan dan bulanan menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada bulan Januari 2024 inflasi tahunan tercatat sebesar 2,95% (yoy), menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya



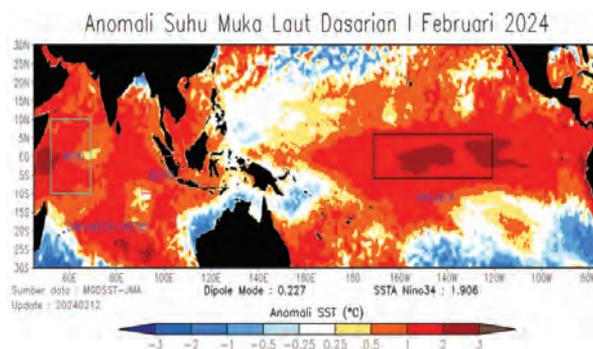
Sumber: bmgk.go.id, diolah

Gambar III.1 Peta Prakiraan Curah Hujan Indonesia Desember 2023



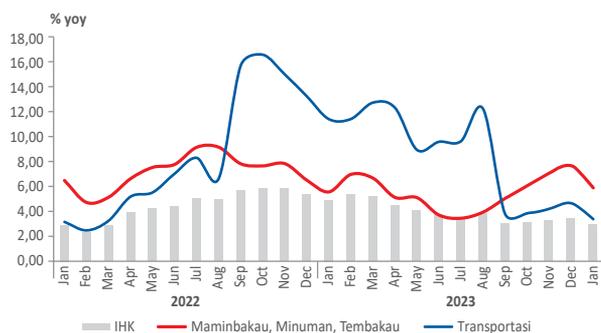
Sumber: bmgk.go.id, diolah

Gambar III.2 Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir Indonesia Maret 2024



Sumber: bmgk.go.id, diolah

Gambar III.3 Peta Anomali Suhu Muka Laut Dasarian I Februari 2024

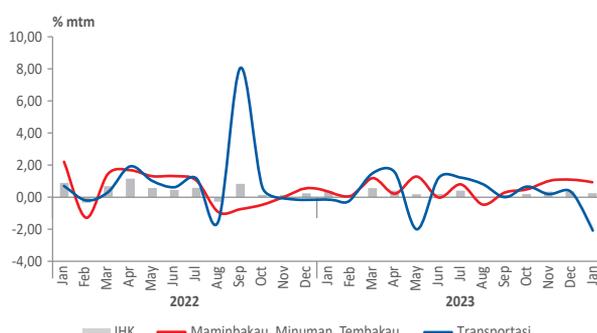


Sumber: BPS, diolah

Grafik III.5 Inflasi Tahunan Kaltim

sebesar 3,46% (yoy) (Grafik III.5). Sementara itu, inflasi bulanan pada periode yang sama tercatat sebesar 0,25% (mtm), menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,39% (mtm) (Grafik III.6). Peningkatan inflasi bulanan terutama disebabkan oleh peningkatan harga sejumlah komoditas pada kelompok makanan, minuman dan tembakau (maminbakau).

Jika dilihat berdasarkan kelompok barang, inflasi pada bulan Januari 2024 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, tembakau (maminbakau). Inflasi kelompok maminbakau memiliki pangsa sebesar 1,70% (yoy) dengan laju sebesar 5,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa dan laju pada bulan Januari 2023 yang masing-masing tercatat sebesar 1,57% (yoy) dan 5,62% (yoy) (Tabel III.5). Peningkatan



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.6 Inflasi Bulanan Kaltim

laju inflasi tahunan pada kelompok maminbakau didorong oleh peningkatan konsumsi seiring dengan semakin masifnya pembangunan IKN yang turut meningkatkan aktivitas MICE di Provinsi Kaltim (Tabel III.6).

Kelompok transportasi juga turut berkontribusi terhadap inflasi pada Januari 2024. Kelompok transportasi memiliki pangsa sebesar 0,46% (yoy) dengan laju sebesar 3,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pangsa dan laju inflasi kelompok transportasi bulan Januari 2023 yang masing-masing tercatat sebesar 1,44% (yoy) dan 11,44% (yoy) (Tabel III.5). Penurunan laju inflasi tahunan pada kelompok transportasi didorong oleh faktor *baseline* yang relatif tinggi di tahun 2023 seiring dengan normalisasi mobilitas masyarakat pasca pandemi Covid-19 (Tabel III.6).

Tabel III.5 Inflasi Gabungan 2 Kota Kaltim Menurut Kelompok Barang

Kelompok Pengeluaran	Desember 2023		Januari 2024	
	Andil Inflasi (%yoy)	Laju Inflasi (%yoy)	Andil Inflasi (%yoy)	Laju Inflasi (%yoy)
UMUM	3,46	3,46	2,95	2,95
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	2,14	7,68	1,70	5,95
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	0,02	0,52	0,12	2,57
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,18	0,80	0,20	1,18
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	0,01	0,16	-0,02	-0,49
KESEHATAN	0,03	1,09	0,15	5,02
TRANSPORTASI	0,63	4,67	0,46	3,44
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0,01	0,25	0,01	0,14
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0,03	1,92	0,02	1,21
PENDIDIKAN	0,03	0,98	0,06	1,32
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	0,22	2,38	0,15	1,44
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	0,15	2,69	0,10	1,72

Sumber: BPS, diolah

Tabel III.6 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kaltim Januari 2024

Januari 2024	
Komoditas Inflasi Bulanan (mtm)	Komoditas Inflasi Tahunan (yoy)
TOMAT	BERAS
BAWANG MERAH	TOMAT
TARIF RUMAH SAKIT	SIGARET KRETEK MESIN
SIGARET KRETEK MESIN	ANGKUTAN UDARA
DAGING AYAM RAS	DAGING AYAM RAS

Sumber: BPS, diolah

3.2. Program Pengendalian Inflasi Daerah

Koordinasi dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kalimantan Timur terus dilakukan baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota guna merumuskan berbagai langkah pengendalian inflasi di daerah. Secara nasional, strategi pengendalian inflasi dirumuskan dengan kerangka 4K, yaitu menciptakan kestabilan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan melakukan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Upaya pengendalian inflasi pangan juga dilaksanakan berdasarkan 7 (tujuh) program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk tahun 2023 yang meliputi operasi pasar murah, kerjasama antar daerah (KAD), subsidi ongkos angkut, gerakan tanam dan replikasi model bisnis, penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sarana produksi pertanian (saprota), digitalisasi data dan informasi, serta koordinasi dan komunikasi.

3.2.1. Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota terus bersinergi dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pelaksanaan program-program strategis untuk meminimalisir lonjakan harga, mengelola permintaan, program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Beberapa program yang telah dilakukan antaranya Gerakan Pangan

Murah dan Pasar Murah yang telah dilakukan lebih dari 15 kali selama triwulan IV 2023. Selain itu, juga dilakukan Operasi Pasar dalam rangka menyambut HBKN Nataru. Upaya pengendalian harga dan pasokan juga dilaksanakan melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) rutin di berbagai kecamatan di Balikpapan dan melalui mobil inflasi di Samarinda.

3.2.2. Ketersediaan Pasokan

Ketersediaan pasokan menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian inflasi. Mengingat karakteristik Provinsi Kaltim yang bukan sentra produksi maka diperlukan sinergi dan kerjasama untuk mendatangkan komoditas dari luar wilayah. Untuk menjaga ketersediaan pasokan, telah disusun beberapa program strategis antara lain meliputi penguatan cadangan pangan pemerintah, ketersediaan stok bahan pangan lokal dan juga memperkuat kelembagaan.

Untuk menjamin ketersediaan pasokan, telah dilakukan kegiatan Sidak Pasar atau *monitoring* stok baik yang dilaksanakan secara rutin maupun dalam rangka tindak lanjut atas isu strategis tertentu. Pada triwulan IV 2023 kegiatan sidak pasar dilakukan sebagai upaya *monitoring* dan evaluasi sehubungan dengan kenaikan harga komoditas beras dan beberapa bahan pokok penting lainnya. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura secara rutin melaksanakan pengkinian situasi pangan yang menampilkan informasi mengenai ketersediaan bahan pangan di Kalimantan Timur secara mingguan.

3.2.3. Kelancaran Distribusi

Dalam rangka memantau kelancaran distribusi, TPID wilayah Kalimantan Timur melakukan pemberian subsidi ongkos angkut skala mikro pada kegiatan Pasar Murah dan Pasar Tani. Selain itu, dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di 5 Kecamatan di Kutai Barat, dilakukan pemberian bantuan subsidi ongkos angkut dengan total bantuan sebesar Rp200.000.000.

ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Selama triwulan IV 2023 telah dilakukan 1 (satu) kali *High Level Meeting* (HLM) TPID, yaitu HLM TPID Kota Bontang. TPID wilayah Kalimantan Timur juga secara rutin mengikuti rapat melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan Kemendagri secara mingguan yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi di internal masing-masing TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selama periode laporan telah dilaksanakan 14 (empat belas) kali rapat koordinasi.

3.2.4. Komunikasi Efektif

Dalam rangka menciptakan komunikasi efektif, dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi perbaikan kualitas data, peningkatan koordinasi dan kapasitas SDM TPID, serta pengendalian

Tabel III.7 Program Pengendalian Inflasi Daerah Kaltim Periode Oktober – Desember 2024

KEGIATAN	FREKUENSI	KETERANGAN
<i>High Level Meeting</i>	1	<i>High Level Meeting</i> dilaksanakan beberapa kali oleh TPID Kota Bontang yang membahas mengenai pengendalian inflasi melalui optimalisasi kerjasama antar daerah.
Sidak Pasar	2	Sidak Pasar dilakukan sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi bahan pangan di pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, dan Operasi Pasar	19	Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, dan Operasi pasar yang dilakukan oleh TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memastikan ketersediaan pasokan serta untuk menjamin keterjangkauan harga pangan dan bapakting.

Sumber: TPID Wilayah Kalimantan Timur



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 4

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Stabilitas keuangan di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan perbaikan selama triwulan IV 2023. Hal tersebut tercermin dari peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit dengan tingkat risiko kredit yang terjaga.
- Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan pertumbuhan terutama didukung oleh DPK Korporasi dan Rumah Tangga.
- Pembiayaan terhadap UMKM mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan risiko kredit/NPL yang tetap terjaga. Penyaluran pembiayaan syariah juga meningkat dengan risiko pembiayaan/NPF yang terjaga.

4.1. Gambaran Umum

Stabilitas keuangan di Provinsi Kaltim melanjutkan perbaikan sebagaimana tercermin dari kinerja penyaluran kredit. Penyaluran kredit selama triwulan IV 2023 mengalami peningkatan terutama didorong oleh kredit modal kerja dan konsumsi. Berdasarkan kelompok debitur, kredit rumah tangga mencatatkan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan korporasi dan pemerintah, meskipun pangsa terbesar masih dikuasai oleh kredit korporasi. Secara spasial, pertumbuhan positif penyaluran kredit terjadi di seluruh kabupaten/kota dengan pangsa tertinggi terjadi di Kota Balikpapan dan Samarinda. Berdasarkan sektor ekonomi, sektor pertambangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejalan dengan pertumbuhan PDRB dari sektor tersebut.

Peningkatan penyaluran kredit diikuti dengan risiko kredit yang terjaga rendah. NPL di Kaltim tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terutama disebabkan oleh penurunan risiko kredit modal kerja dan konsumsi. Berdasarkan kelompok debitur, perbaikan risiko kredit terutama berasal dari penurunan NPL kredit rumah tangga. Berdasarkan sektor ekonomi, sejumlah sektor mencatatkan perbaikan risiko kredit seperti sektor pertambangan, industri pengolahan, dan pertanian. Secara spasial, risiko kredit terendah berada di Kutai Timur.

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan IV 2023 tumbuh positif melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan penghimpunan DPK secara nasional. Berdasarkan golongan nasabah, pertumbuhan DPK bersumber dari Korporasi dan Rumah Tangga. Jika dilihat berdasarkan sumbernya, pertumbuhan DPK didorong oleh tabungan dan deposito.

Peningkatan penyaluran kredit juga diikuti oleh peningkatan pembiayaan syariah. Pertumbuhan pembiayaan syariah lebih tinggi dibandingkan

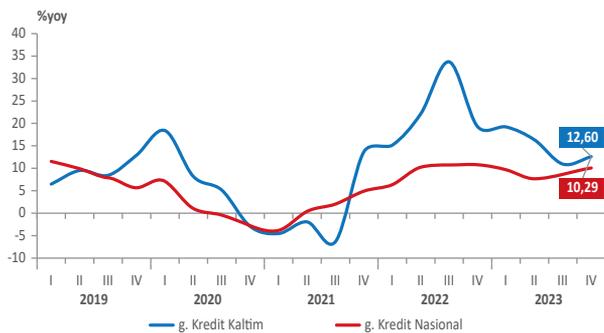
dengan triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan pembiayaan syariah tertinggi berasal dari pembiayaan modal kerja. Berdasarkan golongan debitur, debitur perseorangan mendominasi pangsa penyaluran pembiayaan syariah di Kaltim. Sementara itu, kinerja pembiayaan syariah juga menunjukkan perbaikan sebagaimana tercermin dari *non-performing financing* (NPF) yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Penyaluran kredit UMKM tumbuh positif. Pada triwulan IV 2023, penyaluran kredit kepada UMKM tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaannya, peningkatan terutama berasal dari kredit modal kerja meski pertumbuhan kredit modal kerja mengalami perlambatan. Secara spasial, peningkatan kinerja kredit UMKM bersumber dari pertumbuhan penyaluran kredit di seluruh kabupaten/kota terutama Kota Bontang dan Balikpapan serta Kabupaten Berau dan Penajam Paser Utara. Sementara itu, di tengah membaiknya penyaluran kredit UMKM, risiko kredit UMKM juga semakin membaik.

4.2. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Daerah

4.2.1. Perkembangan Penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga di Kalimantan Timur

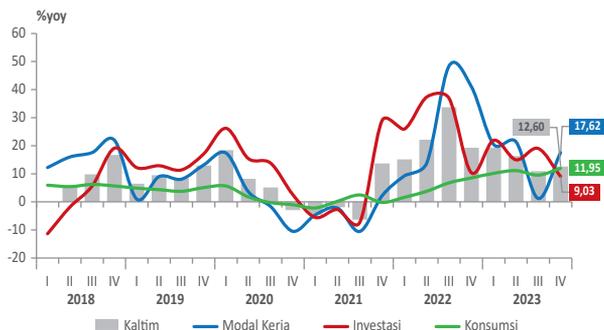
Stabilitas sistem Keuangan relatif terjaga seiring membaiknya kinerja penyaluran kredit dengan risiko kredit yang terjaga. Pada triwulan IV 2023, penyaluran kredit tumbuh 12,60% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan kredit nasional sebesar 10,29% (yoy) (Grafik IV.1). Berdasarkan penggunaannya, pertumbuhan kredit bersumber dari peningkatan kredit modal kerja dan konsumsi di tengah kredit investasi yang melambat (Grafik IV.2). Peningkatan kredit modal kerja terutama disebabkan membaiknya aktivitas perekonomian



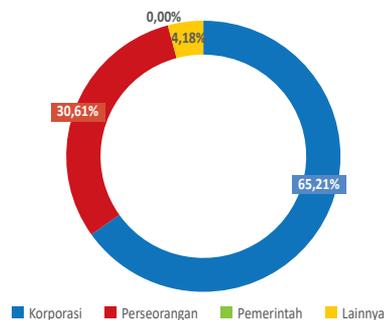
Grafik IV.1 Perkembangan Kredit Kaltim dan Nasional

oleh korporasi dan rumah tangga. Sementara itu, peningkatan kredit konsumsi terutama bersumber dari peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat. Berdasarkan golongan debitur, korporasi mendominasi pangsa penyaluran kredit yang mencapai 65,21% dari total kredit yang disalurkan (Grafik IV.3).

Peningkatan penyaluran kredit juga diiringi dengan risiko kredit yang membaik. Pada triwulan IV 2023, *non performing loan* (NPL) tercatat sebesar 1,11%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. NPL yang relatif rendah tersebut tidak terlepas dari upaya *monitoring* dan penagihan yang lebih baik oleh pihak perbankan. NPL untuk beberapa jenis kredit melanjutkan tren perbaikan sebagaimana tercermin dari NPL kredit modal kerja dan konsumsi yang terus membaik (Grafik IV.4).



Grafik IV.2 Perkembangan Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaannya



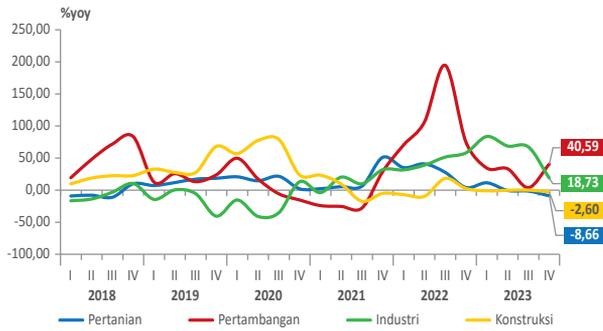
Grafik IV.3 Pangsa Penyaluran Kredit Berdasarkan Debitur

4.2.1.1. Kinerja Penyaluran Kredit Sektoral di Kaltim

Dari sisi sektoral, peningkatan kredit bersumber dari pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor pertambangan. Sejalan dengan meningkatnya pangsa pada PDRB Kaltim, pertumbuhan kredit pada triwulan IV 2023 terutama berasal dari lapangan usaha (LU) pertambangan (Grafik IV.5). Pangsa penyaluran kredit ke sektor pertambangan mencapai 24,73%, meningkat dibandingkan pangsa pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 19,21% (Grafik IV.6). Masih tingginya permintaan batu bara dari Tiongkok mendorong peningkatan kebutuhan modal kerja korporasi yang antara lain dipenuhi melalui kredit perbankan. Penyaluran kredit ke sejumlah sektor utama lainnya, seperti industri



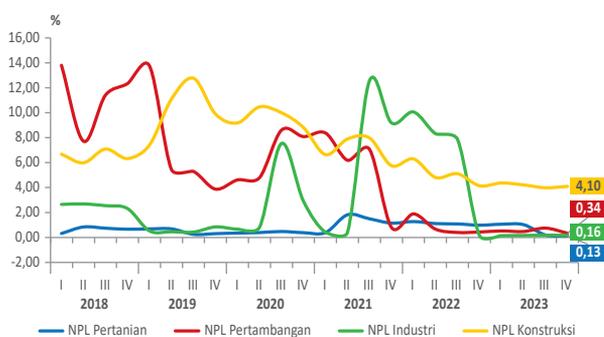
Grafik IV.4 Perkembangan NPL Berdasarkan Penggunaannya



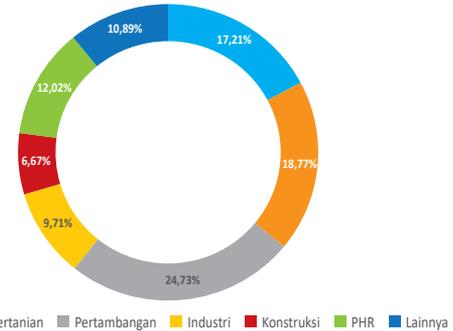
Grafik IV.5 Perkembangan Kredit Sektoral Kaltim

pengolahan, masih tumbuh positif meski sedikit melambat sejalan dengan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan yang melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan kredit secara sektoral diiringi oleh risiko kredit yang terjaga. Di tengah pertumbuhan kredit ke sektor pertambangan yang tinggi, *non performing loan* (NPL) di sektor tersebut masih relatif rendah pada level 0,34%. Sementara itu, NPL di sektor industri pengolahan juga menunjukkan tren perbaikan (Grafik IV.7) terutama didorong oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi.



Grafik IV.7 Perkembangan NPL Berdasarkan Sektor

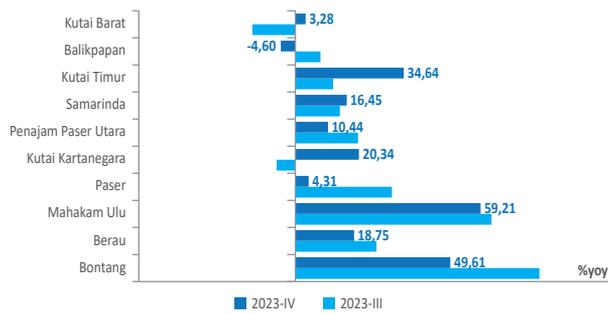


Grafik IV.6 Share Kredit Berdasarkan Sektor

4.2.1.2. Kinerja Penyaluran Kredit Spasial di Kaltim

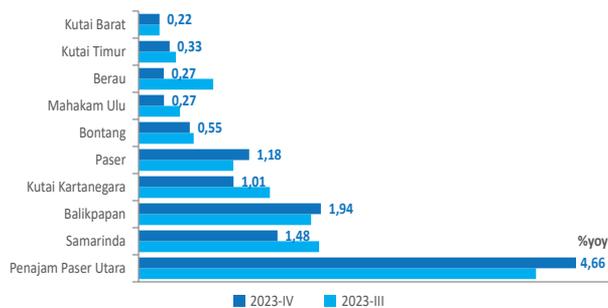
Secara spasial, peningkatan penyaluran kredit bersumber dari pertumbuhan penyaluran kredit di sebagian besar Kabupaten/Kota. Penyaluran kredit mengalami peningkatan terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Samarinda dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Beberapa kabupaten/kota lainnya juga mengalami pertumbuhan yang positif meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seperti Kabupaten Berau, Paser, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, dan Kota Bontang. Penyaluran kredit tertinggi dialami oleh Kabupaten Mahakam Ulu yang tumbuh sebesar 59,21% (yoy), sementara penyaluran kredit di Kota Balikpapan terkontraksi sebesar 4,60% (yoy) (Grafik IV.8).

Pertumbuhan positif penyaluran juga diiringi dengan NPL yang relatif rendah. Risiko kredit di kabupaten/kota tercatat relatif rendah dengan NPL terendah berada pada Kabupaten Berau. Beberapa kabupaten/kota lainnya mengalami perbaikan NPL dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kota Samarinda, dan Bontang (Grafik IV.9).

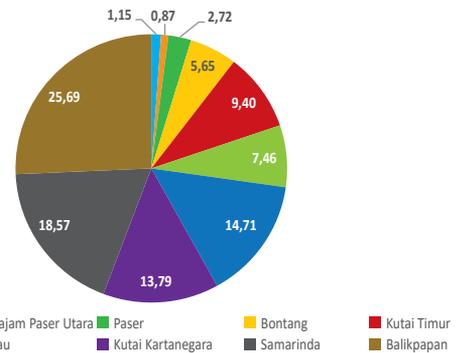


Grafik IV.8 Pertumbuhan Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim

Berdasarkan lokasinya, penyaluran kredit masih terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Kota Balikpapan dan Samarinda memiliki porsi penyaluran kredit tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dengan total *share* kedua kota tersebut mencapai 44,25% dari total penyaluran kredit. Besarnya pangsa penyaluran kredit di kedua Kota tersebut tidak terlepas dari peran kedua kota tersebut sebagai pusat kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur. Sebaliknya, Kabupaten Penajam Paser Utara menempati posisi terendah dalam porsi kredit Kaltim yakni sebesar 0,87% (Grafik IV.10).



Grafik IV.9 Perkembangan NPL Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim



Grafik IV.10 Pangsa Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim

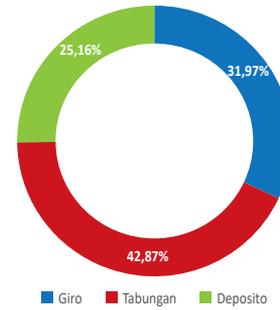
4.2.1.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Kalimantan Timur

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melanjutkan tren positif. Pada triwulan IV 2023, DPK tumbuh positif sebesar 6,45% (yoy) meski melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan DPK nasional yang meski tumbuh sebesar 3,82% (yoy) namun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,44% (yoy) (Grafik IV.11). Pertumbuhan DPK terutama bersumber dari peningkatan jumlah tabungan, diikuti giro dan deposito (Grafik IV.12). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok deposito sebesar 23,16% (yoy) dan disusul oleh tabungan sebesar 9,50% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan giro berkontraksi sebesar 6,95% (yoy), setelah triwulan sebelumnya tumbuh positif (Grafik IV.13).

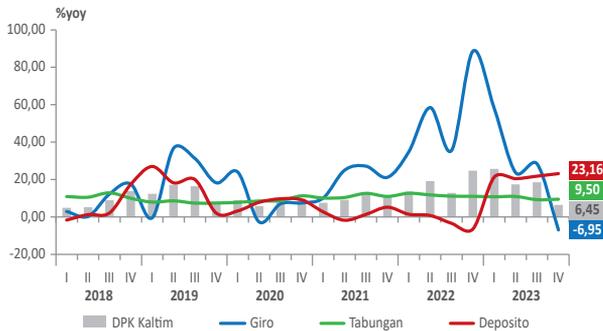
Berdasarkan golongan nasabah, DPK didominasi oleh nasabah perorangan. Pada triwulan IV 2023, pangsa DPK perseorangan mencapai 60,45% dari total DPK, disusul oleh korporasi dan pemerintah (Grafik IV.14). Tingginya DPK perseorangan terutama didorong oleh jumlah tabungan yang dimiliki perseorangan.



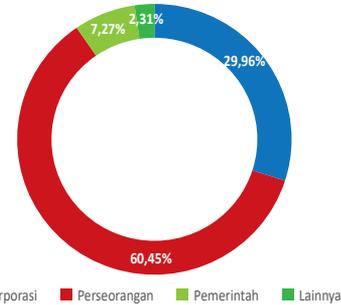
Grafik IV.11 Perkembangan DPK Kaltim dan Nasional



Grafik IV.12 Pangsa DPK Kaltim Berdasarkan Sumbernya



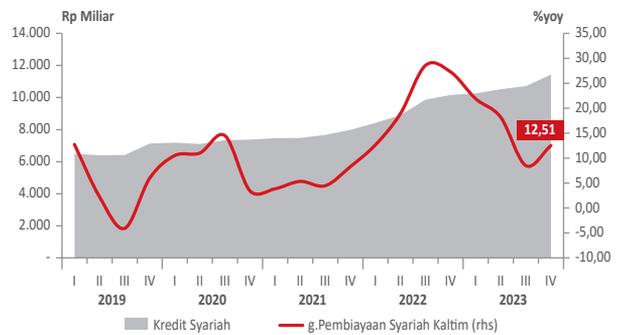
Grafik IV.13 Perkembangan DPK Kaltim Berdasarkan Sumber



Grafik IV.14 Pangsa DPK Kaltim Berdasarkan Golongan Nasabah

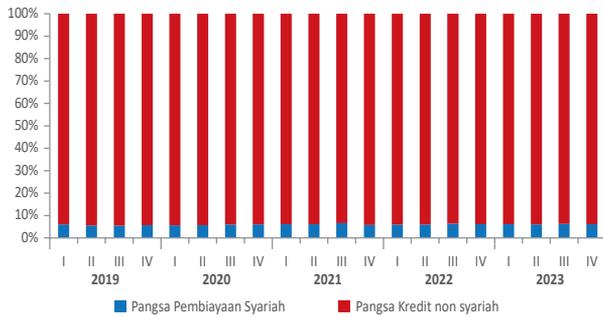
4.2.2. Perkembangan Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Syariah

Kinerja penyaluran pembiayaan syariah selama triwulan IV 2023 menunjukkan peningkatan. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 12,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik IV.15). Pangsa pembiayaan syariah tercatat sebesar 6,18% terhadap penyaluran kredit/pembiayaan (Grafik IV.16). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan pembiayaan syariah tertinggi berasal dari pembiayaan modal kerja, diikuti oleh pembiayaan investasi dan konsumsi (Grafik IV.17). Sementara itu, berdasarkan golongan

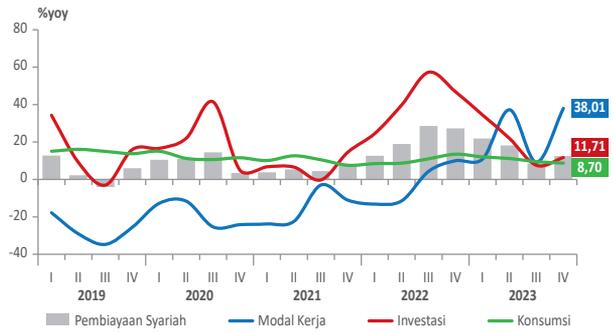


Grafik IV.15 Perkembangan Pembiayaan Syariah Kaltim

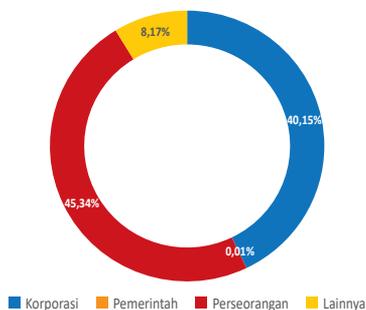
debitur, debitur dari golongan perseorangan mendominasi penyaluran pembiayaan syariah dengan pangsa sebesar 45,34% (Grafik IV.18).



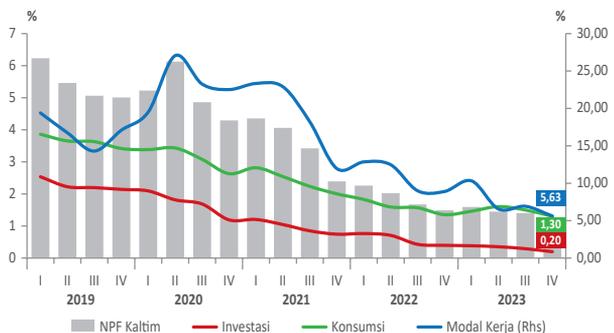
Grafik IV.16 Perkembangan Pangsa Pembiayaan Syariah Kaltim



Grafik IV.17 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan



Grafik IV.18 Pangsa Pembiayaan Syariah Kaltim Berdasarkan Debitur

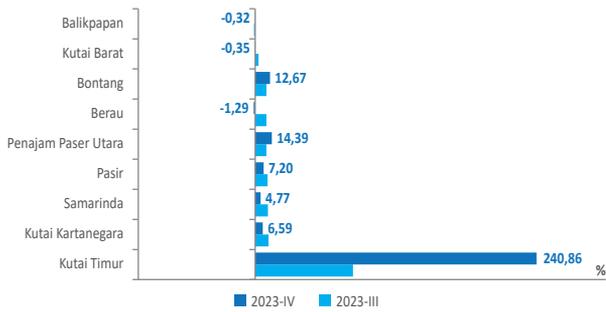


Grafik IV.19 Perkembangan NPF Kaltim Berdasarkan Penggunaannya

Kinerja baik dari pembiayaan syariah di Kaltim juga tercermin dari *non-performing financing* (NPF) yang relatif rendah. NPF Kaltim pada triwulan IV 2023 tercatat 1,19%, lebih rendah daripada triwulan sebelumnya. Penurunan NPF ini menggambarkan risiko pembiayaan syariah di Kaltim yang semakin terkendali. Jika ditinjau dari penggunaannya, penurunan NPF pembiayaan syariah secara umum juga diiringi oleh penurunan NPF pada pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi dengan NPF terendah berada pada pembiayaan untuk investasi (Grafik IV.19).

4.2.2.1. Kinerja Pembiayaan Syariah Spasial di Kaltim

Secara spasial, penyaluran pembiayaan syariah Kaltim tumbuh positif utamanya bersumber dari kinerja penyaluran pembiayaan syariah yang tetap terjaga pada beberapa Kabupaten/Kota. Penyaluran pembiayaan syariah Kaltim secara spasial mengalami peningkatan di beberapa kabupaten/kota, yakni Kabupaten Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang yang mengalami pertumbuhan penyaluran pembiayaan syariah yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, beberapa kabupaten/



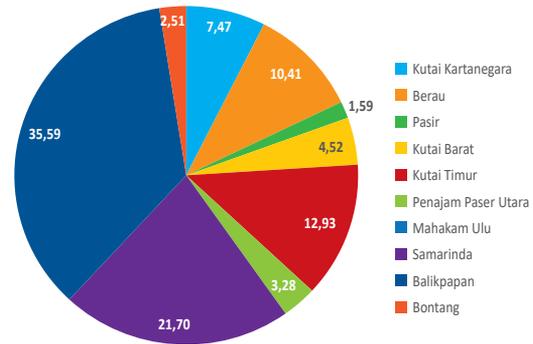
Grafik IV.20 Pertumbuhan Pembiayaan Syariah Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim

kota lainnya juga mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Paser, dan Kota Samarinda. Adapun kinerja penyaluran pembiayaan syariah spasial tertinggi tercatat pada Kabupaten Kutai Timur yang tumbuh sebesar 240,86% (yoy). Di sisi lain, penyaluran pembiayaan syariah di Kabupaten Kutai Barat, Berau, dan Kota Balikpapan mengalami kontraksi pada triwulan IV 2023 (Grafik IV.20).

Kinerja positif pembiayaan syariah spasial juga diiringi dengan NPF yang relatif rendah. Secara spasial, risiko pembiayaan syariah di kabupaten/kota di Kalimantan Timur tercatat relatif rendah,



Grafik IV.21 Perkembangan NPF Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim



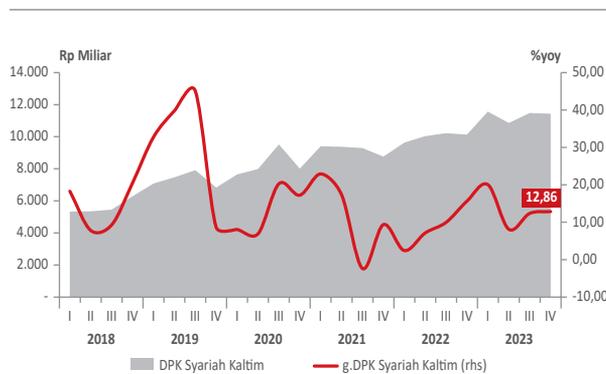
Grafik IV.22 Pangsa Pembiayaan Syariah Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim

dengan NPF terendah berada pada Kabupaten Berau. Lebih lanjut, di beberapa kabupaten/kota wilayah Kaltim mengalami perbaikan NPF dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seperti yang terjadi di Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, serta Kabupaten Kutai Kartanegara, Berau, dan Kutai Timur (Grafik IV.21).

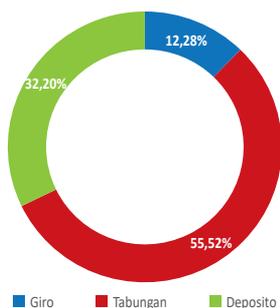
Berdasarkan pangsanya, penyaluran pembiayaan syariah masih terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Sejalan dengan pangsa penyaluran kredit spasial, Kota Balikpapan dan Samarinda juga memiliki porsi penyaluran pembiayaan syariah tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kaltim. Total pangsa penyaluran pembiayaan syariah di kedua kota tersebut tercatat sebesar 57,29% dari total penyaluran pembiayaan syariah di Kaltim. Selain dikarenakan kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur yang cenderung terpusat di Kota Samarinda dan Balikpapan, alasan lain dari terpusatnya pembiayaan syariah di kedua kota tersebut juga didorong oleh ketersediaan perbankan syariah yang lebih banyak di kedua kota tersebut dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kaltim. Adapun penyaluran pembiayaan syariah tidak terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu (Grafik IV.22).

4.2.2.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Syariah Kaltim

Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah Kaltim tumbuh meningkat. Pada triwulan IV 2023, DPK Kaltim tercatat tumbuh 12,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.23). Berdasarkan komponen pembentuk DPK syariah, giro dan tabungan syariah tumbuh meningkat pada triwulan IV 2023 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni masing-masing sebesar 30,00% (yoy) dan 12,44% (yoy). Adapun deposito syariah tumbuh positif sebesar 8,12% (yoy), namun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik IV.24). DPK syariah Kaltim utamanya bersumber dari tabungan syariah, yang memiliki pangsa sebesar 55,52%



Grafik IV.23 Perkembangan DPK Syariah Kaltim dan DPK Syariah Nasional

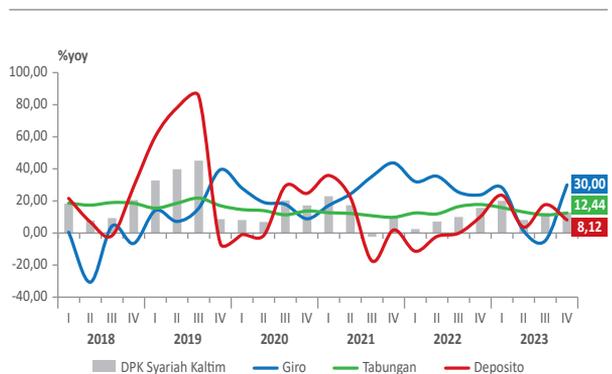


Grafik IV.25 Pangsa DPK Syariah Kaltim berdasarkan Komponen Pembentuk

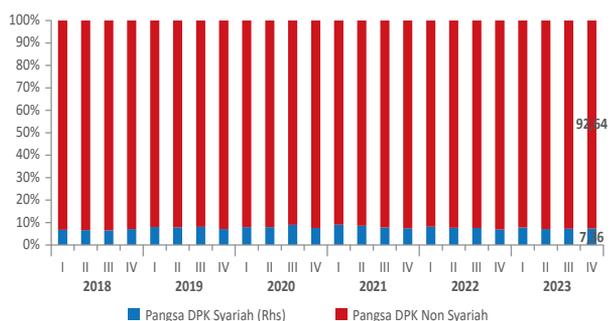
terhadap total DPK syariah Kaltim (Grafik IV.25). Meskipun demikian, pangsa DPK syariah Kaltim masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan DPK non-syariah, yakni hanya sebesar 7,36%, meskipun pangsa ini meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik IV.26).

4.2.3. Asesmen Stabilitas Keuangan Korporasi di Kaltim

Kinerja penyaluran kredit korporasi Kaltim meningkat diiringi risiko kredit yang semakin membaik. Sejalan dengan pertumbuhan positif penyaluran kredit secara umum, penyaluran kredit korporasi pada triwulan IV 2023 tumbuh positif sebesar 15,08% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

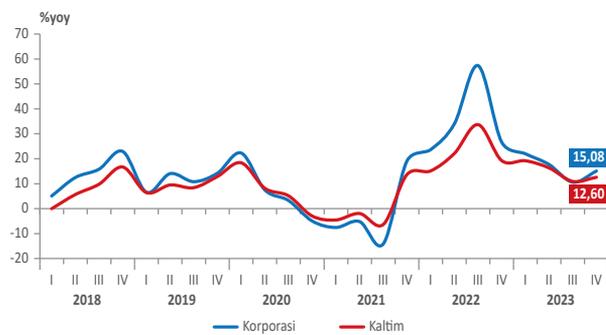


Grafik IV.24 Perkembangan DPK Syariah Kaltim berdasarkan Komponen Pembentuk



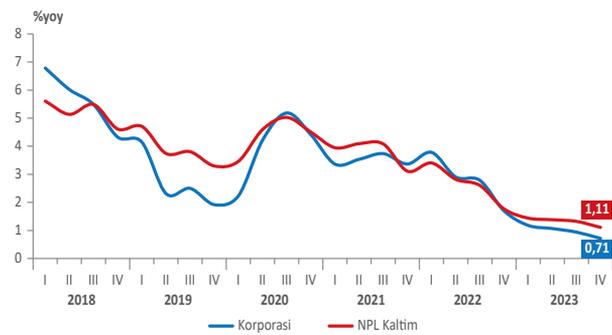
Grafik IV.26 Pangsa DPK Syariah Kaltim dan Non Syariah

(Grafik IV.27). Pertumbuhan ini terutama bersumber dari kinerja penyaluran modal kerja. Sementara itu, NPL kredit korporasi tercatat sebesar 0,71% pada triwulan IV 2023, lebih rendah daripada triwulan sebelumnya dan lebih rendah daripada NPL kredit Kaltim secara umum (Grafik IV.28). NPL yang lebih rendah tersebut menjadi indikator perbaikan risiko kredit korporasi yang terutama bersumber dari perbaikan risiko kredit modal kerja. Lebih lanjut, kinerja positif penyaluran kredit korporasi ini menjadi salah satu indikator penting dari kinerja penyaluran kredit di Kaltim secara umum, mengingat korporasi mendominasi penyaluran kredit di Kaltim.

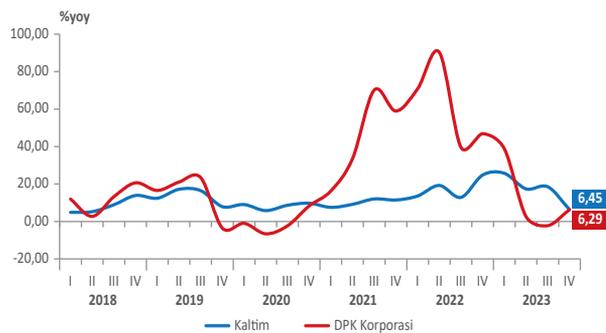


Grafik IV.27 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim

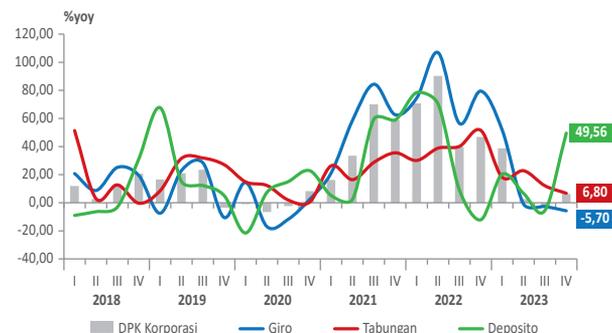
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari korporasi meningkat pada triwulan IV 2023. Pada triwulan IV 2023, DPK korporasi Kaltim tumbuh meningkat sebesar 6,29% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,24% (yoy) (Grafik IV.29). Peningkatan DPK korporasi tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan positif tabungan dan deposito, yakni masing-masing sebesar 6,80% (yoy) dan 49,56% (yoy). Di sisi lain, giro mengalami kontraksi sebesar 5,70% (yoy) (Grafik IV.30). Berdasarkan pangsa DPK korporasi, giro memiliki pangsa sebesar 64,04%, diikuti oleh tabungan dan deposito yang memiliki total pangsa sebesar 35,96% (Grafik IV.31).



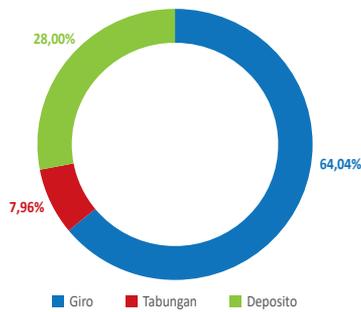
Grafik IV.28 Perkembangan NPL Korporasi Kaltim



Grafik IV.29 Perkembangan DPK Korporasi Kaltim



Grafik IV.30 Perkembangan DPK Korporasi Kaltim Berdasarkan Komponennya



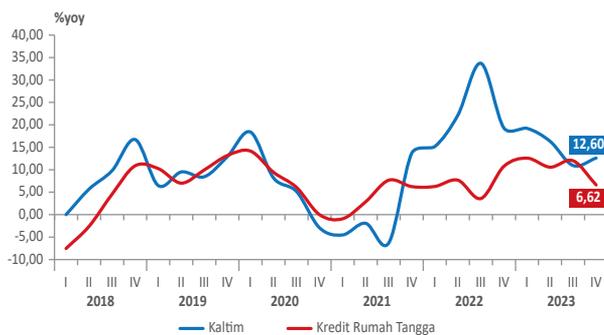
Grafik IV.31 Pangsa DPK Korporasi Kaltim

4.2.4. Asesmen Stabilitas Keuangan Rumah Tangga

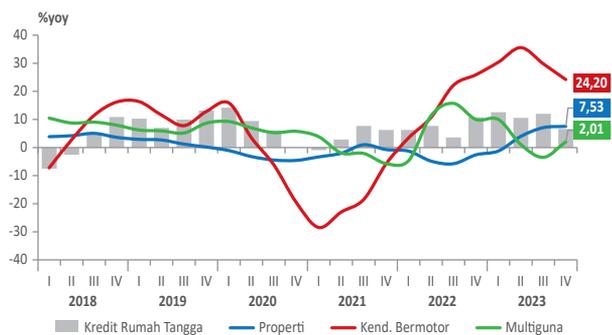
Penyaluran kredit rumah tangga tumbuh positif sejalan berbagai pelonggaran kebijakan makroprudensial. Kredit rumah tangga triwulan IV 2023 tercatat tumbuh positif sebesar 6,62% (yoy), namun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik IV.32). Kinerja penyaluran kredit rumah tangga tetap terjaga, utamanya bersumber dari pertumbuhan kredit properti dan kendaraan bermotor. Pada triwulan IV 2023, kredit properti tercatat tumbuh sebesar 7,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kredit kendaraan bermotor tercatat tumbuh sebesar 24,20% (yoy), namun melambat dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya. Pertumbuhan penyaluran kredit properti dan kendaraan bermotor ini tidak terlepas dari pelonggaran kebijakan makroprudensial dengan berbagai instrumen, a.l. kebijakan rasio pembiayaan (*Loan to Value/ Financing to Value*, LTV/FTV 100% untuk semua jenis properti (termasuk perumahan rakyat) dan pelonggaran ketentuan uang muka 0% untuk penyaluran kredit/pembiayaan kendaraan bermotor, yang semula berakhir pada 31 Desember 2023 diperpanjang hingga 31 Desember 2024. Lebih lanjut, kredit multiguna turut mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,01% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi (Grafik IV.33).

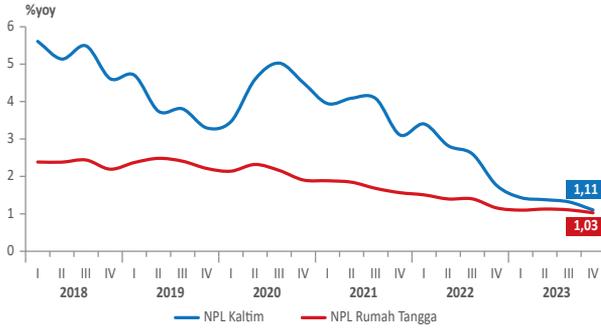
Perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga juga tercermin diiringi oleh risiko kredit yang rendah. NPL kredit rumah tangga Kaltim pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 1,03%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dan lebih rendah dibandingkan dengan NPL kredit Kaltim secara umum (Grafik IV.34). Jika ditinjau berdasarkan penggunaannya, penurunan NPL kredit rumah tangga terutama bersumber dari perbaikan risiko kredit properti, kendaraan bermotor dan kredit multiguna yang secara berturut-turut tercatat sebesar 3,30%, 1,00%, dan 1,33%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik IV.35).



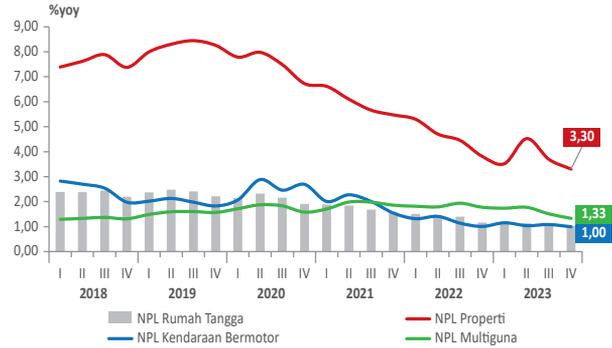
Grafik IV.32 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim



Grafik IV.33 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaannya



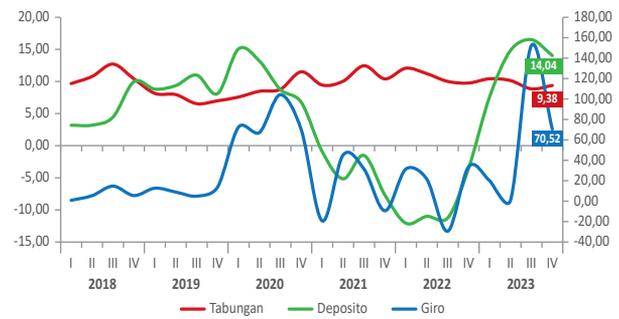
Grafik IV.34 NPL Kredit Rumah Tangga Kaltim



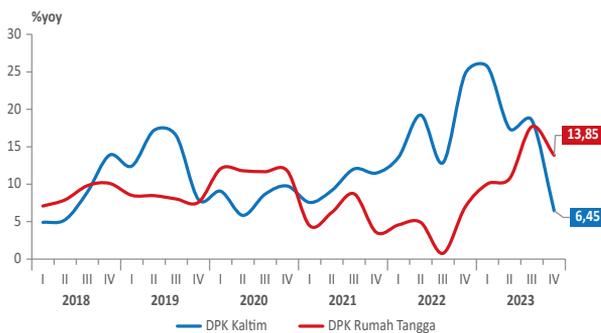
Grafik IV.35 NPL Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaannya

Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga Kaltim periode triwulan IV 2023 tumbuh positif. Pada triwulan IV 2023, DPK rumah tangga di Kaltim tercatat tumbuh 13,85% (yoy), namun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik IV.36). Berdasarkan komponen pembentuknya, pertumbuhan positif DPK rumah tangga Kaltim utamanya bersumber dari tabungan, giro, dan deposito. Tabungan rumah tangga di Kaltim tercatat tumbuh sebesar 9,38% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 8,85% (yoy). Adapun giro dan deposito rumah tangga Kaltim tumbuh positif masing-masing sebesar 70,52% (yoy) dan 14,04% (yoy), namun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik IV.37). Adapun berdasarkan pangsaanya, DPK tabungan

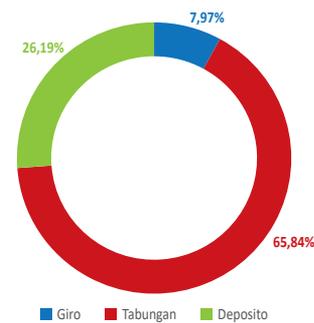
memiliki porsi paling besar yakni 65,84%, diikuti oleh deposito dan giro masing-masing sebesar 26,19% dan 7,97% (Grafik IV.38).



Grafik IV.37 Perkembangan Komponen DPK Rumah Tangga Kaltim



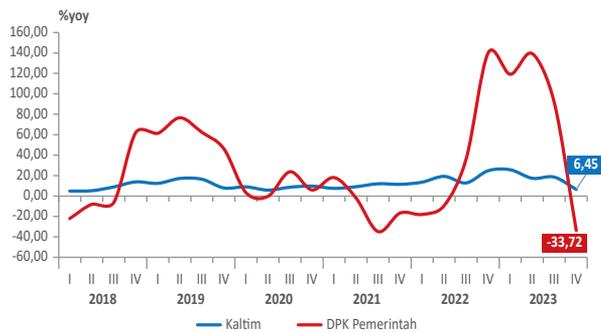
Grafik IV.36 Perkembangan DPK Rumah Tangga Kaltim



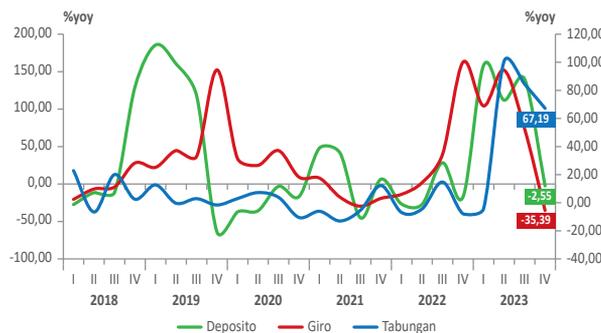
Grafik IV.38 Pangsa DPK Rumah Tangga Kaltim

4.2.5. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Pemerintah Daerah

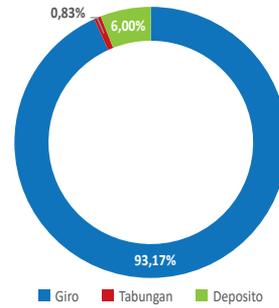
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari pemerintah daerah mengalami kontraksi pada triwulan IV 2023. Pada triwulan IV 2023, DPK pemerintah daerah Kaltim berkontraksi sebesar 33,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan positif (Grafik IV.39). Berdasarkan komponennya, kontraksi DPK pemerintah daerah Kaltim utamanya bersumber dari giro dan deposito, yang masing-masing berkontraksi sebesar 35,39% (yoy) dan 2,55% (yoy). Di sisi lain, komponen tabungan tumbuh positif sebesar 67,19% (yoy), namun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik IV.40). Adapun di antara ketiga komponen tersebut,



Grafik IV.39 Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Kaltim



Grafik IV.40 Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Kaltim Berdasarkan Komponennya

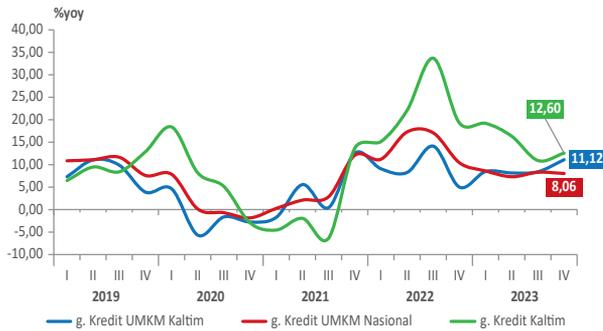


Grafik IV.41 Pangsa DPK Pemerintah Daerah Kaltim Berdasarkan Komponennya

dana pemerintah yang disimpan sebagian besar dalam bentuk giro dan deposito dengan pangsa gabungan kedua komponen tersebut sebesar 99,17% (Grafik IV.41).

4.3. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Kinerja penyaluran kredit UMKM Kaltim tumbuh meningkat. Pada triwulan IV 2023, penyaluran kredit UMKM Kaltim menunjukkan pertumbuhan positif, yakni sebesar 11,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan berada di atas nasional (Grafik IV.42). Jika dilihat dari jenis penggunaannya, peningkatan kredit UMKM Kaltim utamanya didorong oleh penyaluran kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 6,81% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar 11,59% (yoy). Kredit investasi UMKM Kaltim juga tercatat tumbuh positif sebesar 17,51% (yoy), namun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik IV.43). Kredit UMKM meningkat karena dorongan pemerintah untuk peningkatan ketentuan porsi kredit UMKM yang disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas PBI No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.



Grafik IV.42 Perkembangan Kredit UMKM Kaltim dan Nasional

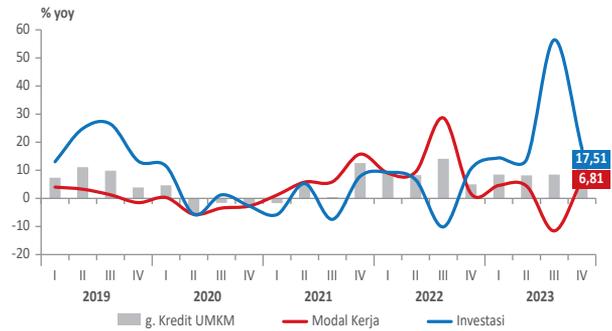
Kinerja positif penyaluran kredit UMKM di Kaltim juga tercermin melalui risiko kredit UMKM yang semakin membaik. Pada triwulan IV 2023, NPL UMKM Kaltim tercatat sebesar 3,42%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik IV.44). Jika dilihat berdasarkan jenis penggunaannya, NPL kredit investasi UMKM tercatat lebih rendah dibandingkan dengan NPL kredit modal kerja UMKM (Grafik IV.45).

4.3.1. Perkembangan Kredit UMKM Spasial

Secara spasial, peningkatan kinerja kredit UMKM Kaltim bersumber dari perbaikan penyaluran kredit yang terjadi pada sebagian besar kabupaten/kota di Kaltim. Penyaluran



Grafik IV.44 Perkembangan NPL UMKM Kaltim



Grafik IV.43 Perkembangan Kredit UMKM Kaltim berdasarkan Jenis Penggunaan

kredit UMKM Kaltim secara spasial mengalami peningkatan pada sebagian besar kabupaten/kota, terutama Kota Bontang, Balikpapan, dan Samarinda serta Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara yang mengalami pertumbuhan kredit UMKM yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, beberapa kabupaten/kota lainnya juga mengalami pertumbuhan positif, namun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seperti Kabupaten Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu (Grafik IV.46). Adapun pertumbuhan penyaluran kredit spasial tertinggi tercatat pada Kabupaten Mahakam Ulu yang tumbuh sebesar 57,70% (yoy).

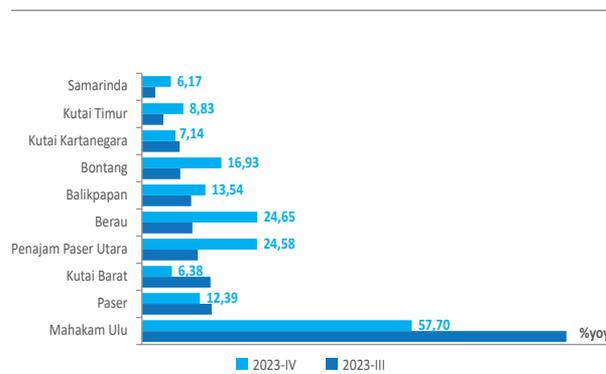


Grafik IV.45 Perkembangan NPL UMKM Kaltim berdasarkan Jenis Penggunaan

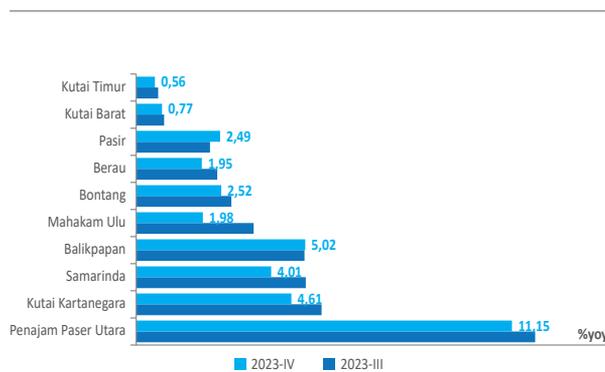
Kinerja positif kredit UMKM spasial juga diiringi dengan NPL UMKM yang relatif rendah. Secara spasial, risiko kredit UMKM di kabupaten/kota di Kalimantan Timur tercatat relatif rendah, dengan NPL UMKM terendah berada pada Kabupaten Kutai Timur. Lebih lanjut, di beberapa kabupaten/kota wilayah Kaltim mengalami perbaikan risiko kredit UMKM di triwulan IV 2023 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, serta Kota Samarinda dan Bontang (Grafik IV.47).

Berdasarkan porsinya, penyaluran kredit UMKM masih terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Kota Balikpapan dan

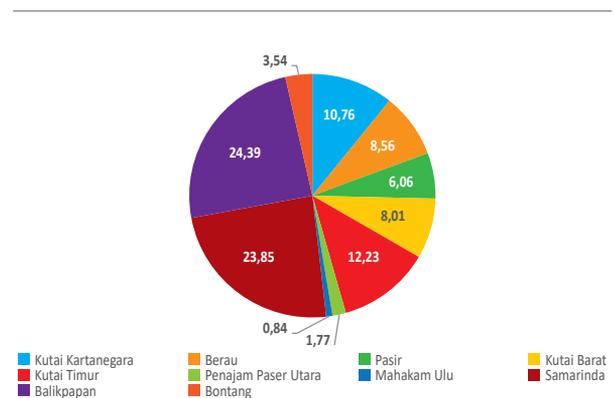
Samarinda memiliki porsi penyaluran kredit UMKM tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kaltim dengan total *share* kedua kota tersebut yang tercatat sebesar 48,23% terhadap penyaluran kredit UMKM di Kaltim. Besarnya *share* penyaluran kredit pada kedua Kota tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa kedua Kota tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur yang memiliki jumlah UMKM yang lebih banyak. Adapun Kabupaten Mahakam Ulu menempati posisi terendah dalam porsi kredit UMKM Kaltim yakni sebesar 0,84% (Grafik IV.48).



Grafik IV.46 Pertumbuhan Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim



Grafik IV.47 Perkembangan NPL UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim



Grafik IV.48 Pangsa Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 5

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOLAAN UANG RUPIAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Pada Triwulan IV tahun 2023 kinerja transaksi sistem pembayaran melalui Bank Indonesia mengalami pertumbuhan positif.
- Pembayaran nontunai retail melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Uang Elektronik, dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mengalami pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun volume Transaksi.
- Aliran uang kartal berada pada posisi net outflow sejalan dengan momen libur natal dan tahun baru yang meningkatkan mobilitas masyarakat

5.1. Transaksi Nontunai di Provinsi Kaltim

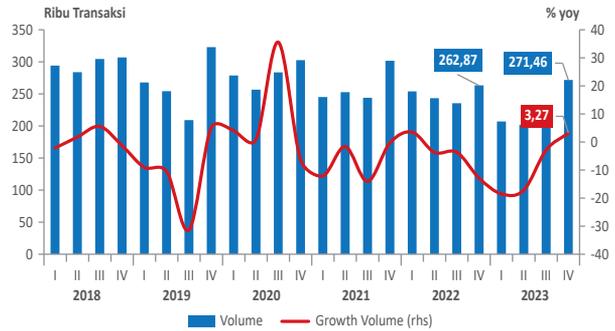
Transaksi nontunai secara umum berasal dari sistem pembayaran Bank Indonesia antara lain *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), uang elektronik, dan kanal QRIS menjadi alternatif transaksi nontunai di masyarakat untuk transaksi retail.

5.1.1. Transaksi Sistem Pembayaran melalui Bank Indonesia

Pada Triwulan IV tahun 2023, transaksi sistem pembayaran melalui Bank Indonesia mengalami pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Secara nominal transaksi sistem pembayaran tumbuh 27,55% (yoy) atau sebesar Rp72,18 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp56,59 triliun (Grafik V.1). Pertumbuhan nominal transaksi sistem pembayaran tersebut sejalan dengan pertumbuhan di seluruh lapangan usaha di Kaltim. Jika dilihat berdasarkan volume, transaksi sistem pembayaran pada triwulan IV tahun 2023 tumbuh sebesar 3,27% (yoy), atau mencapai 271,46 ribu transaksi, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar 262,87 ribu transaksi (Grafik



Grafik V.1 Perkembangan Nominal Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Kaltim



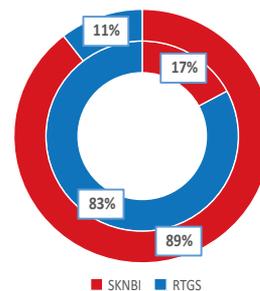
Grafik V.2 Perkembangan Volume Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Kaltim (% yoy)

V.2). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan membaiknya aktivitas di seluruh lapangan usaha dan semakin meningkatnya indeks keyakinan konsumen.

Transaksi melalui sistem pembayaran secara nominal didominasi oleh transaksi RTGS, sedangkan secara volume didominasi oleh SKNBI. Nominal transaksi melalui RTGS mencapai Rp59,79 triliun atau 83% dari total transaksi. Sementara itu, volume transaksi didominasi oleh SKNBI yang mencapai 242,96 ribu transaksi atau 89% dari total transaksi (Grafik V.3).

Transaksi RTGS mengalami pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun volume. Pertumbuhan nominal transaksi RTGS mencapai 31,44% (yoy) sementara nominal transaksi tercatat sebesar

*Bagian dalam menggambarkan Nominal
*Bagian luar menggambarkan Volume



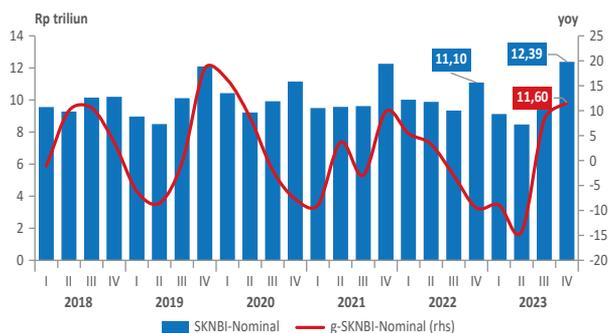
Grafik V.3 Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Kaltim Berdasarkan Infrastruktur



Grafik V.4 Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Kaltim

Rp59,79 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp45,49 triliun (Grafik V.4). Volume transaksi RTGS juga mengalami pertumbuhan sebesar 16,11% (yoy) yang mencapai 28,51 ribu transaksi, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2022 sebanyak 24,55 ribu transaksi (Grafik V.5).

Transaksi SKNBI mengalami pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun volume. Nominal transaksi mengalami pertumbuhan 11,60% (yoy) atau sebesar Rp12,39 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp11,10 triliun (Grafik V.6). Volume transaksi SKNBI juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,95% (yoy) dan mencapai 242,96 ribu transaksi, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 sebanyak 238,32 ribu transaksi (Grafik V.7).



Grafik V.6 Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI di Kaltim



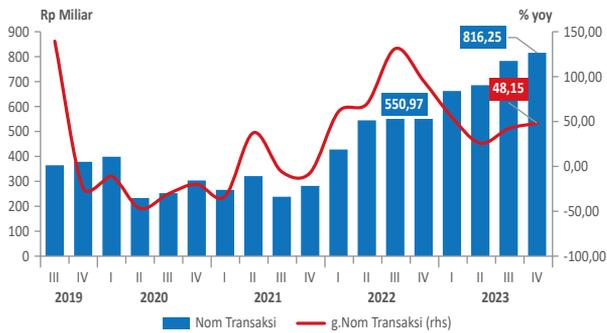
Grafik V.5 Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Kaltim

5.1.2. Transaksi Menggunakan APMK

Transaksi kartu kredit mengalami pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun volume. Transaksi kartu kredit dari sisi nominal mengalami pertumbuhan sebesar 48,15% (yoy) dengan nilai nominal transaksi mencapai Rp816,25 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp550,97 miliar (Grafik V.8). Volume transaksi juga mengalami pertumbuhan sebesar 27,95% (yoy) dengan jumlah transaksi mencapai 695,55 ribu, atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 yang mencapai 543,59 ribu transaksi (Grafik V.9).



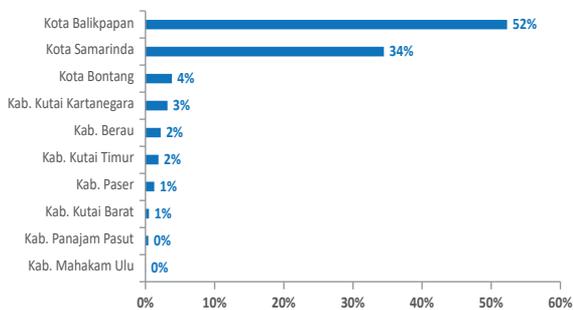
Grafik V.7 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Kaltim



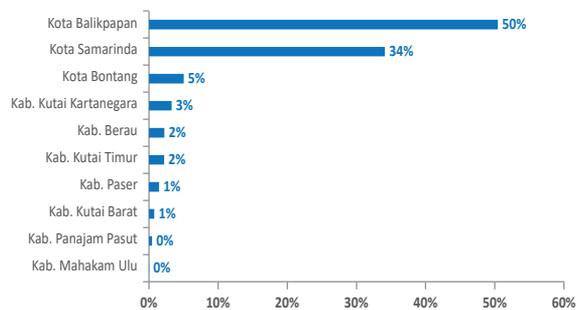
Grafik V.8 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Kaltim



Grafik V.9 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Kaltim



Grafik V.10 Porsi Nominal Transaksi Kartu Kredit secara spasial di Wilayah Kaltim Tw IV 2023



Grafik V.11 Porsi Volume Transaksi Kartu Kredit secara spasial di Wilayah Kaltim Tw IV 2023

Kota Balikpapan dan Kota Samarinda menjadi penggerak utama pertumbuhan transaksi kartu kredit di Provinsi Kaltim. Berdasarkan nominal transaksi, Kota Balikpapan memiliki porsi sebesar 52% sementara Kota Samarinda sebesar 34%, disusul oleh Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara masing-masing sebesar 4% dan 3% (Grafik V.10). Berdasarkan volume transaksi, Kota Balikpapan memiliki porsi 50% sementara Kota Samarinda sebesar 34%, disusul oleh Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara masing-masing sebesar 5% dan 3% (Grafik V.11).

Transaksi kartu ATM/Debit mengalami pertumbuhan dari sisi volume. Transaksi kartu ATM/Debit secara nominal mengalami kontraksi sebesar 7,78% (yoy) dengan nilai sebesar Rp2,69 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan

triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp2,92 triliun (Grafik V.12). Namun dari sisi volume transaksi kartu ATM/Debit mengalami pertumbuhan sebesar 42,65% (yoy), atau sebanyak 5,13 juta transaksi, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 sebanyak 3,59 juta transaksi (Grafik V.13).

Secara spasial, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda menjadi penggerak utama pertumbuhan transaksi ATM/Debit. Berdasarkan nominal transaksi, Kota Balikpapan memiliki porsi sebesar 38%, sementara Kota Samarinda sebesar 35%, disusul oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur masing-masing sebesar 9% dan 6% (Grafik V.14). Jika dilihat dari sisi volume transaksi, Kota



Grafik V.12 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit di Kaltim

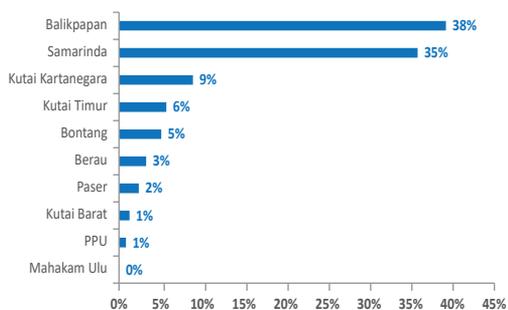
Balikpapan memiliki porsi 41%, sedangkan Kota Samarinda sebesar 34%, di susul Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang masing-masing sebesar 8% dan 5% (Grafik V.15).

Transaksi Uang Elektronik (UE) mengalami pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun volume. Transaksi UE secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar 24,50% (yoy) atau mencapai Rp1,45 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp1,17 triliun (Grafik V.16). Sementara itu, volume transaksi UE mengalami pertumbuhan sebesar 28,68% (yoy) atau sebanyak 12,39 juta transaksi,

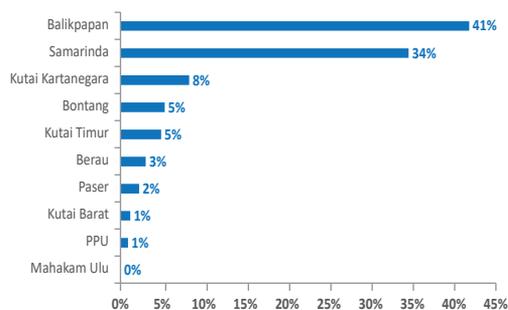


Grafik V.13 Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit di Kaltim

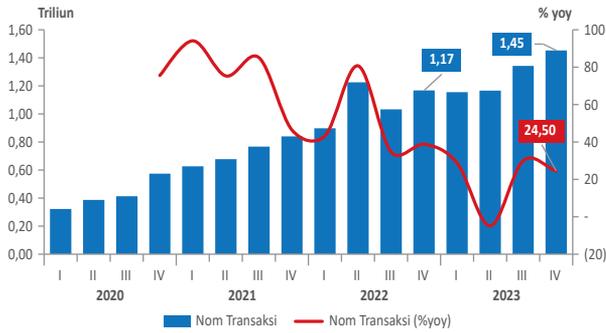
lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 sebanyak 9,63 juta transaksi (Grafik V.17). Pertumbuhan dari sisi nominal dan volume transaksi juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah akun UE sebesar 20,11% (yoy) atau mencapai 3,90 juta akun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 sebanyak 3,25 juta akun (Grafik V.18). Pertumbuhan transaksi dan jumlah akun UE sejalan dengan gencarnya sosialisasi dan edukasi kebijakan transaksi nontunai yang berdampak pada peningkatan literasi penggunaan transaksi nontunai oleh masyarakat.



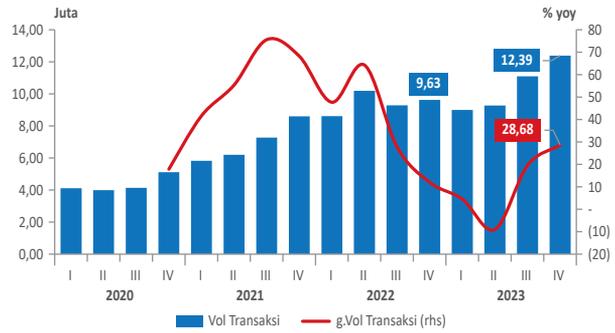
Grafik V.14 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit di Kaltim Tw IV 2023



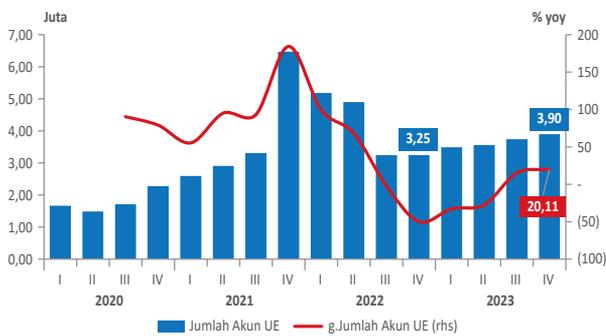
Grafik V.15 Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit di Kaltim Tw IV 2023



Grafik V.16 Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik di Kaltim



Grafik V.17 Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik di Kaltim



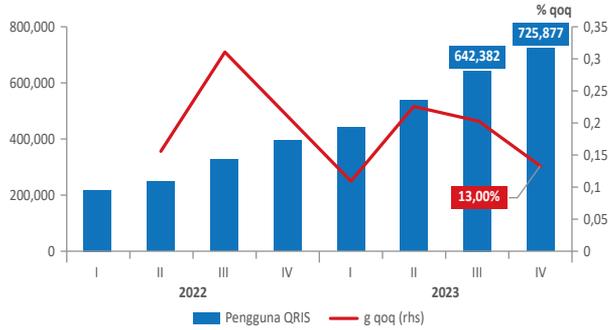
Grafik V.18 Perkembangan Jumlah Akun Uang Elektronik di Kaltim

5.1.3. Perkembangan Transaksi Nontunai Melalui Kanal QRIS

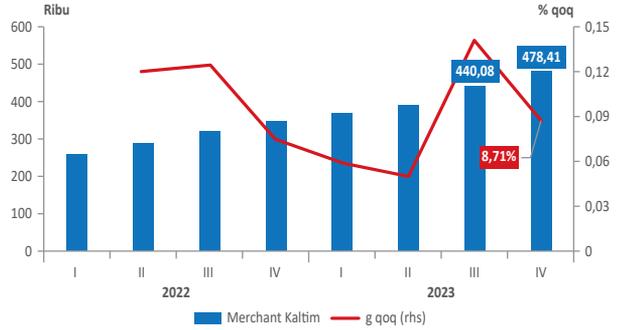
Jumlah pengguna baru dan *merchant* QRIS terus mengalami pertumbuhan. Jumlah pengguna QRIS tumbuh sebesar 13% (qoq). Pada triwulan IV tahun 2023 jumlah pengguna QRIS sebanyak 725.877 pengguna, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 sebanyak

624.382 pengguna (Grafik V.19). Jumlah *merchant* QRIS juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,71% (qoq) menjadi sebanyak 478,41 ribu *merchant*, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 sebanyak 440,08 ribu *merchant* (Grafik V.20). Pertumbuhan jumlah pengguna QRIS yang tinggi tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang gencar dilakukan untuk meningkatkan *awareness* dan minat masyarakat dalam menggunakan kanal QRIS.

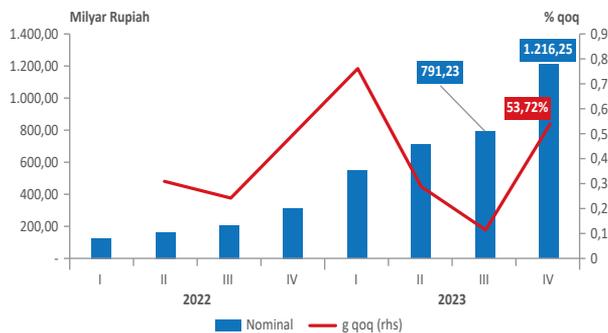
Transaksi QRIS baik dari sisi nominal maupun volume terus mengalami pertumbuhan. Nominal transaksi QRIS tumbuh sebesar 53,72% (qoq) atau mencapai Rp1,22 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 yang mencapai Rp642,38 milyar (Grafik V.21). Volume transaksi QRIS juga mengalami pertumbuhan sebesar 41,07% (qoq) atau sebanyak 7,41 juta transaksi, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 yang mencapai 5,25 juta transaksi (Grafik V.22).



Grafik V.19 Jumlah Pengguna QRIS di Kaltim



Grafik V.20 Jumlah Merchant QRIS di Kaltim



Grafik V.21 Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Kaltim

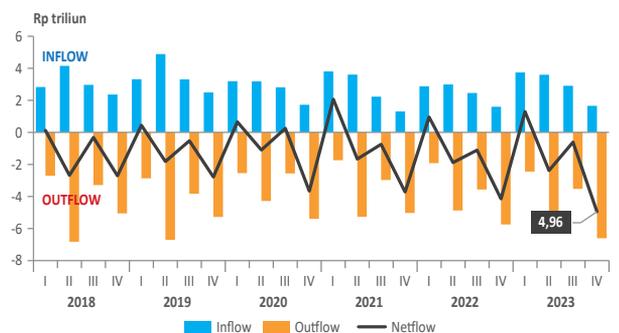


Grafik V.22 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Kaltim

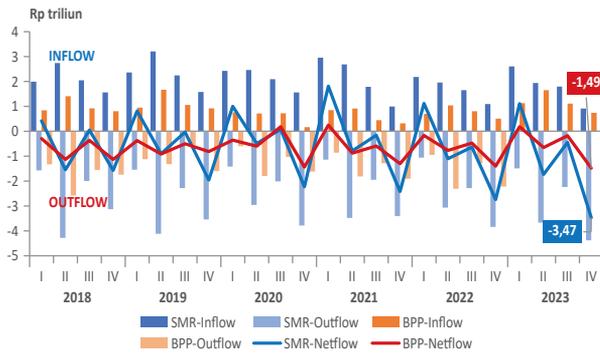
5.2. Pengelolaan Uang Rupiah

Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal pada triwulan IV tahun 2023 mencatat posisi **net outflow**. Secara nominal, nilai uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) tercatat sebesar Rp1,65 triliun, sementara nilai uang kartal yang diedarkan oleh Bank Indonesia (*outflow*) sebesar Rp6,61 triliun. Dengan kondisi tersebut, aliran uang kartal berada pada posisi *net outflow* sebesar Rp4,96 triliun (Grafik V.23) sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat dan industri terutama pada saat libur hari natal dan tahun baru. Secara spasial, *net outflow* terbesar bersumber dari wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim sebesar Rp3,47

triliun, sementara *net outflow* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan tercatat sebesar Rp1,49 triliun (Grafik V.24).



Grafik V.23 Penedaran Uang Kartal di Kaltim

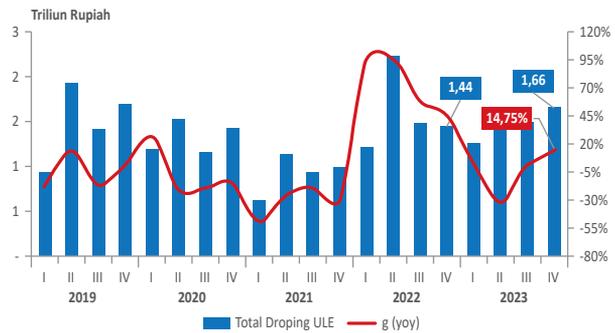


Grafik V.24 Uang Kartal di Kaltim – Spasial

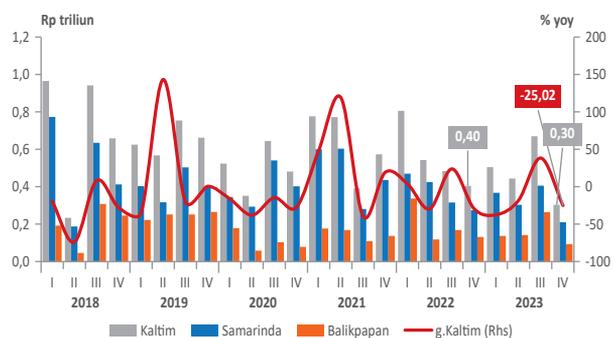
Dropping Uang Layak Edar (ULE) mengalami peningkatan secara yoy. *Dropping* ULE mengalami peningkatan 14,75% (yoy) atau mencapai Rp1,66 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp1,44 triliun (Grafik V.25). Peningkatan *dropping* ULE tersebut sejalan dengan momen libur natal dan tahun baru yang meningkatkan mobilitas masyarakat.

Jumlah Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang ditarik dari masyarakat mengalami penurunan. Dalam rangka menjaga kualitas uang kartal yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan kebijakan *Clean Money Policy* (CMP). Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) secara rutin. Nominal penyerapan UTLE selama periode laporan mengalami penurunan sebesar 25,02% (yoy) atau sebesar Rp0,3 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 Rp0,4 triliun (Grafik V.26).

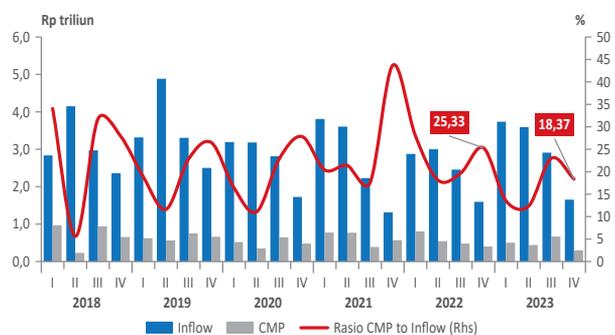
Rasio penarikan UTLE terhadap inflow di Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan. Rasio penarikan UTLE terhadap inflow tercatat sebesar 18,37%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar 25,33%. Membatkannya tingkat literasi masyarakat terhadap Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah ditengarai berkontribusi positif terhadap terjaganya kondisi uang yang layak edar di Kaltim (Grafik V.27).



Grafik V.25 Dropping ULE dan inflow UTLE



Grafik V.26 Penarikan Uang Tidak Layak Edar di Kaltim



Grafik V.27 Penarikan Uang Tidak Layak Edar terhadap Inflow di Kaltim

BOKS V.1

Potensi QRIS TUNTAS di Kalimantan Timur

“QRIS TUNTAS: Mendorong Inklusi, Interoperabilitas, dan Efisiensi Transaksi Ritel di Kalimantan Timur”

Inovasi kanal pembayaran QRIS yang diinisiasikan oleh Bank Indonesia (BI) terus berkembang. Sejak awal peluncurannya pada tanggal 17 Agustus 2019, kanal QRIS terus mengalami perkembangan fitur seperti QRIS Merchant Presented Mode (MPM), QRIS Customer Presented Mode (CPM), QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM), dan QRIS Cross Border. Inovasi fitur QRIS terbaru yang dikembangkan QRIS tarik tunai, transfer, dan setor tunai atau QRIS TUNTAS yang di-launching pada tanggal 17 Agustus 2023.

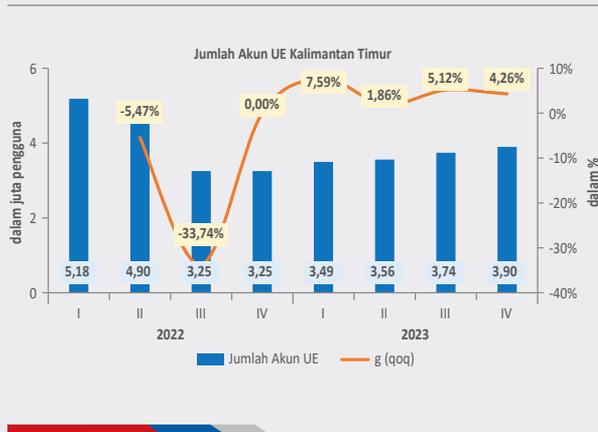
Kanal pembayaran QRIS sangat diminati oleh masyarakat untuk melakukan transaksi nontunai. Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah pengguna kanal QRIS nasional terus mengalami pertumbuhan. Pada triwulan IV 2023 jumlah pengguna QRIS secara nasional mencapai 45,78 juta pengguna. Sejalan dengan pertumbuhan pengguna QRIS nasional, jumlah

pengguna QRIS di Kalimantan Timur juga terus tumbuh. Jumlah pengguna QRIS pada triwulan IV 2023 di Kalimantan Timur mencapai 725,88 ribu pengguna. Pertumbuhan pengguna QRIS khususnya di Kalimantan Timur sejalan dengan berbagai implementasi dan kolaborasi kebijakan sistem pembayaran KPwBI Provinsi Kalimantan Timur dan KPwBI Kota Balikpapan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kebijakan inovasi QRIS TUNTAS dapat menjadi pengayaan entry point masyarakat Kalimantan Timur untuk masuk ke ekosistem ekonomi keuangan digital. Layanan Uang Elektronik (UE) berbasis server melalui dompet digital selama ini menjadi alternatif masyarakat dalam menggunakan transaksi nontunai khususnya untuk masyarakat unbanked. Pada triwulan IV tahun 2023, jumlah akun UE di Kalimantan Timur mencapai 3,90 juta akun atau meningkat 4,26% (yoy). Transaksi instrumen pembayaran



Gambar BOKS V.1 Jumlah Pengguna QRIS Nasional dan Kalimantan Timur



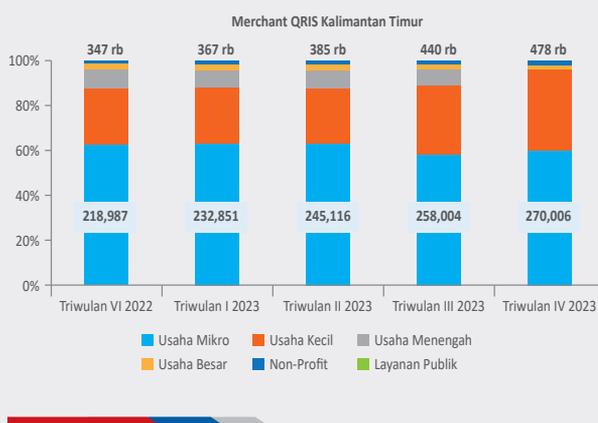
Gambar BOKS V.2 Jumlah Akun dan Transaksi UE di Kalimantan Timur

UE dengan kanal pembayaran QRIS TUNTAS tentu akan semakin memfasilitasi masyarakat dalam melakukan transaksi ritel, sejalan dengan rata-rata nominal transaksi pada instrumen pembayaran UE di Kalimantan Timur di angka Rp104 ribu s.d. Rp128 ribu.

QRIS TUNTAS diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi biaya transaksi ritel oleh masyarakat. Fitur tarik tunai, transfer, dan setor tunai pada QRIS TUNTAS akan mentransformasi model bisnis PJSP dan usaha mikro di Kalimantan Timur dalam memberikan layanan transaksi nontunai sebagai agen QRIS TUNTAS. Pada triwulan IV 2023, jumlah *merchant* QRIS usaha mikro di

Kalimantan Timur mencapai 270 ribu *merchant* atau 56% dari total *merchant* di Kalimantan Timur. QRIS TUNTAS juga memberikan skema harga layanan yang lebih efisien dan tentunya membuka peluang baru bagi agen QRIS TUNTAS dan PJSP bank maupun non perbankan.

QRIS TUNTAS melengkapi kanal pembayaran nontunai yang ada saat ini dalam mendukung interoperabilitas sistem pembayaran. Kepesertaan fitur QRIS TUNTAS oleh PJSP di Kalimantan Timur meliputi BCA, BNI, BRI, CIMB Niaga, Bank Mega, Bank OCBS NISP, DANA, Speedcash, Maybank, Bank Sinarmas, dan Shopee. Transaksi ritel *peer to peer* (p2p) di Kalimantan Timur akan semakin terhubung



TARIK TUNAI Rp6.500	Berlaku untuk transaksi <i>on us</i> melalui agen dan transaksi <i>off us</i> .
TRANSFER - Rp 100.000 : Rp 2.000 - Rp 100.000 : Rp 2.500	Berlaku untuk transaksi <i>off us</i> , sedangkan transaksi <i>on us</i> tidak dikenakan biaya.
SETOR TUNAI Rp5.000	Berlaku untuk transaksi <i>on us</i> melalui agen dan transaksi <i>off us</i> .

Gambar BOKS V.3 Merchant QRIS di Kalimantan Timur dan Skema Harga QRIS TUNTAS

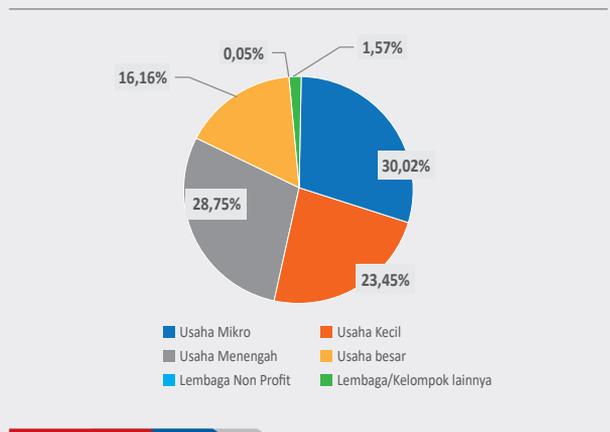


Gambar BOKS V.4 Skema Interoperabilitas QRIS TUNTAS antar PJSP

dengan QRIS TUNTAS. Masyarakat dapat melakukan tarik tunai, setor tunai, dan transfer melalui berbagai PJSP baik bank maupun non bank termasuk transaksi *off us* dan *on us*.

Dengan adanya inovasi fitur QRIS TUNTAS, transaksi nontunai melalui kanal QRIS akan terus tumbuh di berbagai lapangan usaha/kelompok Kalimantan Timur. Usaha mikro di Kalimantan Timur menjadi kelompok terbesar penyumbang transaksi QRIS. Usaha mikro tersebut mencakup Pasar SIAP QRIS yang berada di Kalimantan Timur antara lain Pasar Sanggam Adji Dilayas (Kab. Berau), Pasar Mangkurawang (Kab. Kukar), Pasar Lok Baru (Kota Samarinda), Pasar Palaran (Kota Samarinda), Pasar Merdeka (Samarinda), Pasar Induk Sangatta (Kab. Kutim), Pasar Rawa Indah (Kota Bontang), Pasar Olah Bebaya (Kab.

Kubar). QRIS TUNTAS juga akan mendorong transaksi nontunai di pusat perbelanjaan modern seperti Big Mall di Kota Samarinda serta berbagai usaha lainnya seperti usaha kecil, menengah, dan besar. Lebih lanjut, dengan masuknya masyarakat ke ekosistem transaksi nontunai melalui kanal QRIS, diharapkan juga akan menambah minat masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dan juga retribusi melalui berbagai kanal nontunai, salah satunya kanal QRIS dengan nominal maksimal Rp10.000.000 per transaksi. Dimana saat ini jumlah nominal transaksi pembayaran pajak dan retribusi di Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebesar Rp29,21 milyar dan diperkirakan akan semakin besar ke depannya mealalui kemudahan fitur QRIS TUNTAS.



Gambar BOKS V.5 Nominal, Volume, dan Distribusi Transaksi QRIS Kalimantan Timur



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 6

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Kondisi ketenagakerjaan mengindikasikan perbaikan sebagaimana tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat menurun tipis.
- Kondisi kesejahteraan di Kaltim membaik yang tercermin dari penurunan derajat ketimpangan yang diindikasikan oleh penurunan rasio gini.
- Kesejahteraan petani menunjukkan angka positif dan tumbuh dibandingkan dengan triwulan IV 2022 maupun triwulan III 2023.

6.1. Gambaran Umum

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan secara umum menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan ditunjukkan oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sejalan dengan hal tersebut, kondisi kesejahteraan juga membaik yang tercermin dari penurunan derajat ketimpangan yang diindikasikan oleh penurunan rasio gini. Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2023 juga lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

6.2. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data BPS, sampai dengan bulan Agustus 2023, kondisi ketenagakerjaan mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut ditandai dengan TPT yang menurun dari 5,71% menjadi 5,31% didorong oleh membaiknya kinerja perekonomian serta sejumlah lapangan usaha khususnya konstruksi

yang sedang membutuhkan pasokan tenaga kerja yang tinggi seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan berbagai proyek nasional lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, TPAK pada periode yang sama tumbuh dari 64,73% pada tahun sebelumnya menjadi sebesar 65,57%. Berdasarkan angka pertumbuhan, jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 5,29% (yoy) menjadi 1,95 juta jiwa terutama bersumber dari peningkatan jumlah orang yang bekerja sebesar 5,27% (yoy) atau menjadi 1,8 juta jiwa (Tabel VI.1).

TPT Kaltim berada di atas TPT wilayah Kalimantan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim tidak setinggi provinsi lain di Kalimantan. TPT Kaltim pada bulan Agustus 2023 sebesar 5,31% atau berada di posisi paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya di wilayah Kalimantan maupun nasional (Tabel VI.2).

Tenaga kerja di Kaltim didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor formal. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kaltim,

Tabel VI.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran Kaltim

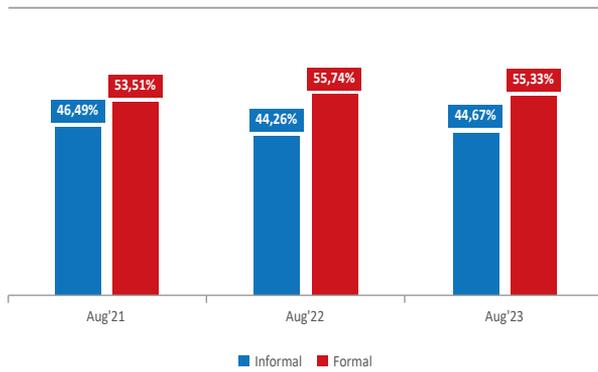
Kondisi Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Pertumbuhan	
			Orang	%
A. Jumlah Penduduk 15+	2.862.390	2.975.137	112.747	3,94
B. Jumlah Angkatan Kerja	1.852.800	1.950.860	98.060	5,29
B.1. Jumlah Bekerja	1.746.920	1.847.295	100.375	5,75
B.2. Jumlah Penganggur	105.880	103.565	(2.315)	-2,19
C. Bukan Angkatan Kerja	1.009.590	1.024.277	14.687	1,45
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK= [B/A]X100%)	64,73	65,57		↓
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT=[B.2/B]X100%)	5,71	5,31		↓

Sumber : BPS, diolah

Tabel VI.2 TPT Provinsi di Kalimantan dan Nasional

No.	Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka		Urutan Nasional
		Agustus 2022	Agustus 2023	
1	Kalimantan Barat	5,11	5,05	13
2	Kalimantan Tengah	4,26	4,10	23
3	Kalimantan Selatan	4,74	4,31	18
4	Kalimantan Timur	5,71	5,31	11
5	Kalimantan Utara	4,33	4,01	24
6	Nasional	5,86	5,32	-

Sumber : BPS, diolah



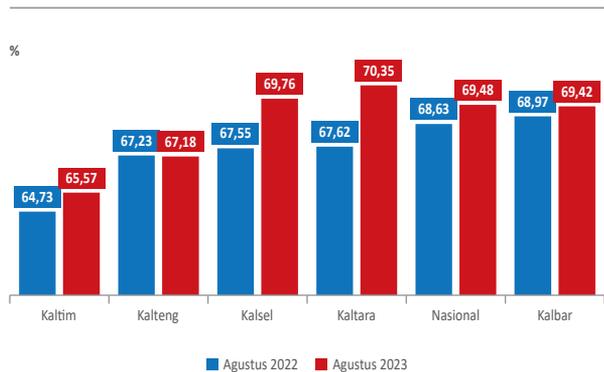
Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.1 Tenaga Kerja Kaltim Berdasarkan Sektor Formal dan Informal

persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal pada bulan Agustus 2023 mencapai 55,33%, lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang bekerja di sektor informal sebesar 44,67% (Grafik VI.1). Meski sektor formal masih mendominasi namun jumlah pekerja di sektor informal mengalami peningkatan, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 44,26%. Peningkatan tersebut sejalan dengan perbaikan kinerja berbagai lapangan usaha sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak.

TPAK bulan Agustus 2023 menempati posisi terendah untuk wilayah Kalimantan dan berada di bawah level TPAK Nasional. Provinsi Kalimantan Timur berada di peringkat terbawah untuk capaian TPAK sebesar 65,57% untuk wilayah Kalimantan dan juga berada di bawah level TPAK nasional sebesar 69,48% (Grafik VI.2). Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan perekonomian Kaltim lebih banyak didorong oleh sektor primer yang padat modal sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi kurang optimal.

Peningkatan TPAK sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja dan terjadi pada seluruh tingkat pendidikan. Jumlah penduduk Kaltim tamatan Diploma, dan Universitas yang bekerja masing-masing tumbuh sebesar



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.2 Perbandingan TPAK Provinsi se- Kalimantan

19,70% (yoy), dan 6,36% (yoy), menjadi 68.139 jiwa dan 229.953 jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan lainnya juga mengalami pertumbuhan dengan rincian Pendidikan SD tumbuh 2,49% (yoy), SMP tumbuh 7,70% (yoy), dan SMA tumbuh 5,80% (yoy) (Tabel VI.3).

Berdasarkan pangsa, sebagian besar penduduk yang bekerja merupakan pekerja dengan pendidikan terakhir SMA/SMK. Jumlah penduduk yang bekerja didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebesar 43,54%. Sementara itu, pangsa penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan diploma ke atas, termasuk universitas, masih relatif rendah sebesar 16,14% dari total penduduk yang bekerja. Kondisi ini mencerminkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat masih didominasi oleh pekerjaan yang belum mengutamakan kompetensi dan keahlian yang tinggi (Tabel VI.3).

Berdasarkan status usaha, peningkatan penduduk bekerja terutama bersumber dari peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan bertambah sejumlah 46.759 jiwa atau meningkat sebesar 5,11% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk

Tabel VI.3 Perbandingan Jumlah Penduduk yang Bekerja berdasarkan Pendidikan

Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan	Agustus 2022	Agustus 2023	Pertumbuhan		Pangsa
			Orang	%	%
<SD	453.853	465.175	11.322	2,49	25,18%
SMTP	259.693	279.689	19.996	7,70	15,14%
SMTA (SMA dan SMK)	760.250	804.339	44.089	5,80	43,54%
Diploma I/II/III/Akademi	56.923	68.139	11.216	19,70	3,69%
Universitas	216.201	229.953	13.752	6,36	12,45%
Total	1.746.920	1.847.295	100.375	5,75	100%

Sumber : BPS, diolah

yang berusaha mandiri dan penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga juga meningkat masing-masing sebanyak 23.939 orang atau naik sebesar 5,72% (yoy), dan 14.620 orang atau naik sebesar 10,47% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat penurunan jumlah penduduk yang bekerja bebas pada bidang non pertanian sebesar 2,59% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel VI.4).

Pangsa penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan mencapai 52,07% dari keseluruhan penduduk yang bekerja. Angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 52,39%. Penduduk yang berusaha mandiri menempati posisi kedua terbanyak dengan pangsa sebesar 23,93%. Sementara itu, porsi terendah ditempati oleh pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non-pertanian, masing-masing sebesar 1,40% dan 2,49% dari total penduduk bekerja di Kaltim (Tabel VI.4).

Berdasarkan lapangan usaha, peningkatan jumlah penduduk yang bekerja bersumber dari perbaikan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian serta Konstruksi. Tenaga kerja pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian pada periode bulan Agustus 2023 meningkat sebanyak 23.564 orang atau tumbuh 18,05% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah tenaga kerja juga dialami oleh LU konstruksi yang bertambah sebanyak 13.263 orang atau tumbuh 12,58% (yoy) dibandingkan tahun lalu. Peningkatan yang lebih tinggi untuk penduduk yang bekerja tertahan oleh penurunan jumlah penduduk yang bekerja di LU Industri Pengolahan sebanyak 7.047 atau berkontraksi 5,36% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel VI.5).

Berdasarkan pangsa LU, LU Perdagangan Besar, Eceran, Akomodasi dan Makan Minum masih menjadi LU yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada bulan Agustus 2023 LU Perdagangan Besar, Eceran, Akomodasi dan

Tabel VI.4 Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Status Usaha Kaltim

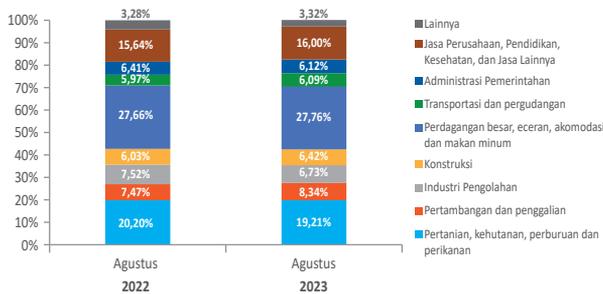
Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Usaha	Agustus 2022	Agustus 2023	Pertumbuhan		Pangsa
			Orang	%	%
Berusaha Sendiri	418.152,00	442.091,00	23.939	5,72	23,93%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	147.138,00	156.872,00	9.734	6,62	8,49%
Berusaha dibantu buruh tetap	58.511,00	60.189,00	1.678	2,87	3,26%
Buruh/Karyawan	915.189,00	961.948,00	46.759	5,11	52,07%
Pekerja bebas di pertanian	20.943,00	25.812,00	4.869	23,25	1,40%
Pekerja bebas di non pertanian	47.312,00	46.088,00	(1.224)	-2,59	2,49%
Pekerja keluarga/tak dibayar	139.675,00	154.295,00	14.620	10,47	8,35%
Total	1.746.920	1.847.295,00	100.375	5,75	100,0%

Sumber : BPS, diolah

Tabel VI.5 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim

Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	Agustus 2022	Agustus 2023	Pertumbuhan		Pangsa
			Orang	%	%
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	349.451	354.868	5.417	1,55	19,21%
Pertambangan dan Penggalian	130.564	154.128	23.564	18,05	8,34%
Industri Pengolahan	131.400	124.353	(7.047)	-5,36	6,73%
Konstruksi	105.395	118.658	13.263	12,58	6,42%
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	483.227	512.849	29.622	6,13	27,76%
Transportasi dan Pergudangan	104.347	112.540	8.193	7,85	6,09%
Administrasi Pemerintahan	111.964	113.037	1.073	0,96	6,12%
Jasa Perusahaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Jasa Lainnya	273.186	295.587	22.401	8,20	16,00%
Lainnya	57.386	61.275	3.889	6,78	3,32%
Total	1.746.920	1.847.295	100.375	5,75	100,00%

Sumber : BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.3 Pangsa Tenaga Kerja Sektoral Kaltim

Makan Minum memiliki pangsa sebesar 27,76%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 27,66%. Posisi berikutnya ditempati oleh LU Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 19,21%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,00%; dan LU Jasa Perusahaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Jasa Lainnya dengan pangsa sebesar 16,00% (Grafik VI.3).

6.3. Kesejahteraan

Jumlah penduduk miskin baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan menurun dari 6,31% pada bulan Maret 2022 menjadi 6,11% pada bulan Maret 2023, atau menurun dari dari 236,25 ribu (Maret 2022) menjadi 231,07 ribu jiwa



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.4 Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur

(Maret 2023) atau turun sebesar 2,19% (yoy). Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan berkurang dari 123,59 ribu jiwa pada bulan Maret 2022 menjadi 122,43 ribu jiwa pada bulan Maret 2023. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan yang menunjukkan penurunan dari 112,66 ribu jiwa pada bulan Maret 2022 menjadi 108,64 ribu jiwa pada bulan Maret 2023 (Grafik VI.4).

Secara spasial, wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kondisi tersebut tidak banyak berubah dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, terdapat 62,87 ribu jiwa penduduk miskin di Kukar dengan pangsa sebesar 26,61% dari total penduduk miskin Kaltim, diikuti oleh kota Samarinda sebanyak 41,95 ribu jiwa dengan pangsa

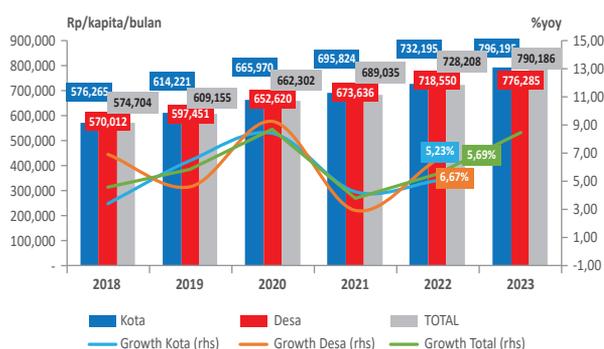
Tabel VI.6 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Ribu Jiwa)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%
Paser	25.30	25.14	25.45	26.77	27.56	27.02	11.44
Kutai Barat	12.80	13.49	13.45	13,78	15.38	15.38	6.51
Kutai Kartanegara	56.57	56.56	56.34	58,42	62.36	62.87	26.61
Kutai Timur	31.95	33.02	35.31	36,98	37.78	36.84	15.59
Berau	11.86	11.33	11.62	12,30	13.62	13.31	5.63
PPU	12.00	11.76	11.52	11,93	12.13	11.59	4.91
Mahakam Ulu	3.07	3.25	3.19	3,26	3.18	3.10	1.31
Balikpapan	17.86	17.01	15.78	17,02	18.53	15.83	6.70
Samarinda	40.01	39.23	39.80	41,92	42.84	41.95	17.76
Bontang	8.75	8.10	7.46	7,91	8.41	8.39	3.55
Kalimantan Timur	220.17	218.90	219.92	230,27	241.77	236.25	100.00

Sumber: BPS, diolah

17,76%. Sementara itu, kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terendah sebanyak 3,10 ribu jiwa atau 1,31% dari total penduduk miskin pada tahun 2022 (Tabel VI.6).

Di sisi lain, peningkatan Garis Kemiskinan (GK) mengalami peningkatan dengan GK di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan. GK meningkat dari Rp728.208/kapita/bulan pada bulan Maret 2022 menjadi Rp790.186/kapita/bulan pada bulan Maret 2023. Peningkatan garis kemiskinan tersebut terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Peningkatan GK di wilayah perkotaan mencapai sebesar 8,74% (yoy), lebih besar dibandingkan wilayah pedesaan yang meningkat sebesar 8,03% (yoy) (Grafik VI.5).

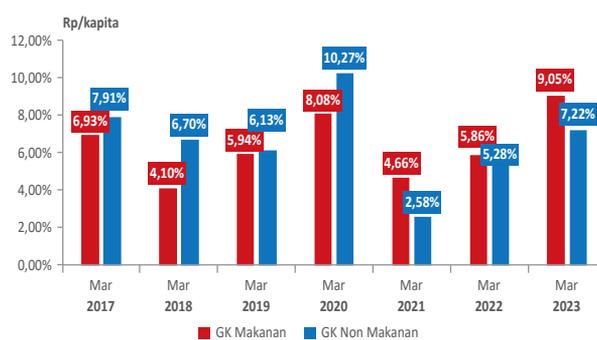


Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.5 Garis Kemiskinan Kalimantan Timur

Peningkatan GK pada bulan Maret 2023 bersumber dari kenaikan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM meningkat sebesar 9,05% (yoy), naik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 5,86% (yoy), sementara GKNM juga meningkat sebesar 7,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,28% (yoy) (Grafik VI.6).

Komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKM di perkotaan dan pedesaan adalah komoditas beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras. Sementara itu, perumahan, listrik dan bensin menjadi komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKNM di perkotaan



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.6 Pertumbuhan GKM dan GKNM

Tabel VI.7 Persentase Komoditas Makanan terhadap GKM

Perkotaan		Pedesaan	
Komoditi	%	Komoditi	%
Beras	14,88	Beras	17,41
Rokok kretek filter	11,14	Rokok kretek filter	14,24
Daging ayam ras	5,01	Telur ayam ras	4,35
Telur ayam ras	4,66	Tongkol/tuna/cakalang	3,3
Mie instan	3,5	Mie instan	3,19
Tongkol/tuna/cakalang	2,94	Daging ayam ras	2,99
Gula Pasir	2,18	Gula Pasir	2,61
Bawang merah	1,92	Bawang merah	2,29
Cabe Rawit	1,84	Kembung	1,92
Tempe	1,65	Cabe Rawit	1,85

Sumber: BPS, diolah

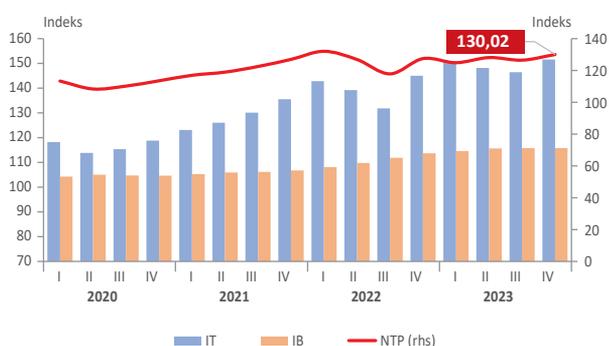
dan pedesaan. Komoditas beras merupakan penyumbang terhadap GKM di perkotaan dan pedesaan masing-masing sebesar 14,88% dan 17,41% diikuti oleh rokok kretek filter masing-masing sebesar 11,14% di perkotaan dan 14,24% di pedesaan. Komoditas daging ayam ras menjadi penyumbang terbesar berikutnya sebesar 5,01% di perkotaan dan 4,35% di pedesaan. Komoditas lainnya yang memberi sumbangan GKM adalah telur ayam ras, mie instan, gula pasir, ikan tongkol, ikan kembung, bawang merah, cabai rawit, dan tempe (Tabel VI.7). Sementara itu, komoditas utama penyumbang GKNM adalah perumahan sebesar 11,96% di perkotaan dan 12,02% di pedesaan, diikuti oleh listrik, bensin, pendidikan, perlengkapan mandi, air, sabun cuci, perawatan kulit, pajak kendaraan bermotor, dan pakaian jadi perempuan (Tabel VI.8).

Tingkat kesejahteraan petani membaik yang ditandai dengan NTP dan IT yang meningkat, di tengah IB yang stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. NTP Kaltim pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 130,02, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 127,48 dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 126,49. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks yang Diterima Petani (IT) pada triwulan IV tahun 2023 tercatat sebesar 151,59, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 146,47% (yoy). Peningkatan NTP dan IT tersebut tidak

Tabel VI.8 Persentase Komoditas Non Makanan terhadap GKNM

Perkotaan		Pedesaan	
Komoditi	%	Komoditi	%
Perumahan	11,96	Perumahan	12,02
Listrik	4,05	Listrik	2,75
Bensin	2,85	Bensin	2,44
Pendidikan	2,01	Perlengkapan Mandi	1,42
Air	1,8	Pendidikan	1,08
Perlengkapan Mandi	1,62	Air	0,82
Pajak Kendaraan Bermotor	0,70	Sabun Cuci	0,8
Perawatan Kulit, Muka, Kuku, Rambut	0,63	Pakaian Jadi Perempuan Dewasa	0,58
Pakaian Jadi Perempuan	0,56	Perawatan Kulit, Muka, Kuku, Rambut	0,57

Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.7 Perkembangan NTP, IT, dan IB Kaltim

terlepas dari dampak El-Nino yang semakin termoderasi yang diperkirakan berdampak pada kualitas produksi pertanian yang semakin baik. Di sisi lain, Indeks yang Dibayar Petani (IB), tercatat stabil sejak triwulan III 2023 di angka 115,80 (Grafik VI.7).

Jika ditinjau NTP di sub-lapangan usaha, peningkatan NTP terutama bersumber dari peningkatan NTP pada sub-lapangan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. NTP pada sub-lapangan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada triwulan IV 2023 secara berturut-turut tercatat sebesar 101,31, 114,86, dan 167,11. NTP pada ketiga sub-lapangan usaha tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang secara berurut-turut sebesar

99,38, 109,42, 159,92 (Grafik VI.8). Di sisi lain, NTP pada sub-lapangan Peternakan tercatat sebesar 107,23, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 108,87. Selain itu, penurunan NTP juga terjadi pada sub-lapangan usaha perikanan yang diperkirakan terjadi seiring curah hujan dan gelombang yang tinggi menjelang akhir tahun 2023.



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI. 8 Perkembangan NTP Sub-Lapangan Usaha

BOKS VI.1

DAMPAK IKN TERHADAP KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN DI KALTIM

“ Spillover IKN Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan di wilayah penyangga IKN terutama Balikpapan dan Penajam Paser Utara ”

Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan dampak positif terhadap kondisi ketenagakerjaan di wilayah penyangga khususnya Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hal ini terindikasi dari penurunan tingkat pengangguran terbuka sejak proyek IKN mulai dibangun. Tingkat pengangguran terbuka Kota Balikpapan dan Kab. PPU masing-masing sebesar 6,09% dan 2,07% pada 2023 dimana keduanya berada dalam tren menurun. Faktor pendukung seperti perbaikan iklim usaha dan meningkatnya mobilitas Masyarakat pasca Covid-19 juga turut mengakselerasi penyerapan tenaga kerja yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja.

Sektor konstruksi menjadi sektor kunci dalam peningkatan ketenagakerjaan terutama di Kab. PPU seiring dengan gencarnya fase percepatan pembangunan IKN yang direncanakan mulai beroperasi di tahun 2024. Geliat sektor konstruksi ini tercermin dari peningkatan laju PDRB sektor konstruksi Kab. PPU yang tumbuh signifikan sebesar 89,82% (yoy) pada 2022. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang hanya tumbuh 25,20% (yoy) dan sekaligus menjadi pertumbuhan tertinggi dari keseluruhan sektor di tahun 2022. Kinerja sektor konstruksi yang tinggi tersebut juga tercermin dari lonjakan pangsa sektor konstruksi dari 14,74% di tahun 2021 menjadi 24,11% di tahun 2022.

Sementara efek rambat IKN terhadap peningkatan kondisi ketenagakerjaan Kota Balikpapan didorong oleh sektor industri pengolahan, transportasi dan perdagangan. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Kota Balikpapan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,69% (yoy). Pertumbuhan industri pengolahan tersebut didorong oleh akselerasi proyek kilang minyak yaitu *Refinery Development Master Plan* (RDMP) sebagai upaya untuk mendukung kemandirian energi nasional di wilayah Timur Indonesia, termasuk di IKN. Proyek RDMP tersebut diperkirakan memberikan dampak penyerapan tenaga kerja sebanyak 20 ribu orang. Selain itu, proyek ini juga berkontribusi dalam *upgrading* keahlian tenaga kerja di sektor industri minyak dan gas. Merujuk informasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan, sekitar 30% pekerja yang dilibatkan dalam proyek RDMP berasal dari Kota Balikpapan. Adapun sisanya didatangkan dari luar Kalimantan Timur, di antaranya pulau Jawa.

Selanjutnya, dampak positif IKN pada sektor sektor transportasi dan pergudangan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) juga berkontribusi positif dalam meningkatkan kondisi ketenagakerjaan di Balikpapan. Laju pertumbuhan PDRB di sektor transportasi dan pergudangan dan sektor PHR tercatat masing-masing sebesar 15,91% (yoy) dan 8,42% (yoy). Pangsa PDRB kedua sektor tersebut juga terus

mengalami peningkatan. Capaian tersebut tidak terlepas dari faktor letak Kota Balikpapan yang strategis dan berada di beranda IKN sebagai pintu gerbang IKN.

Dalam hal serapan tenaga kerja, dampak *spillover* pembangunan IKN lebih besar berkontribusi terhadap Kabupaten PPU dibanding di Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Tenaga Kerja di Kota Balikpapan, dampak IKN terhadap peningkatan serapan tenaga kerja di Balikpapan, selain karena faktor pembangunan proyek RDMP, dapat dikatakan relatif terbatas. Hal ini disebabkan dampak IKN terhadap perekonomian Kota Balikpapan lebih condong pada peningkatan faktor produksi/penjualan di beberapa sektor, namun tidak serta-merta diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Hal ini misalnya terlihat pada sektor perhotelan. Berdasarkan hasil survei Properti Komersial yang dilakukan oleh Bank Indonesia di Kota Balikpapan, indeks permintaan properti komersial khususnya hotel diperkirakan meningkat menjadi 142,58 atau tumbuh 3,21% (qtq) dibanding indeks permintaan pada periode sebelumnya. Selain itu, tingkat okupansi perhotelan berdasarkan hasil survei tersebut turut diperkirakan meningkat pada triwulan IV-2023 menjadi sebesar 71,8%. Berdasarkan hasil liaison di sektor perhotelan, peningkatan tersebut terkonfirmasi karena faktor IKN khususnya dari lini *government* dan *corporate*. Meskipun demikian, berbagai pelatihan dan program kerja guna meningkatkan kapasitas SDM terus dilaksanakan untuk semakin meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Balikpapan yang saat ini sudah masuk kategori sangat tinggi.

Kondisi ini berbeda dengan kondisi ketenagakerjaan di Kab. PPU yang terdongkrak cukup tinggi seiring dengan akselerasi konstruksi IKN. Mengacu pada data Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten PPU, dari kurang lebih 14 perusahaan besar yang terlibat dalam pembangunan IKN, serapan tenaga kerja dari Kab. PPU tercatat sebanyak 1.151 tenaga kerja tambahan di tahun 2023. Angka tersebut diyakini belum memperhitungkan serapan tenaga kerja dari berbagai sub-vendor yang terlibat dalam keseluruhan *value chain* dari perusahaan besar tersebut. Dengan demikian serapan tenaga kerja riil dari faktro IKN diprediksi lebih besar lagi. Salah satu faktor pendorong realisasi serapan tenaga kerja tersebut yaitu adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Perda tersebut mengatur bahwa perusahaan wajib mengupayakan pengisian lowongan pekerjaan oleh tenaga kerja lokal paling sedikit 80% sesuai dengan syarat kualifikasi yang dibutuhkan.

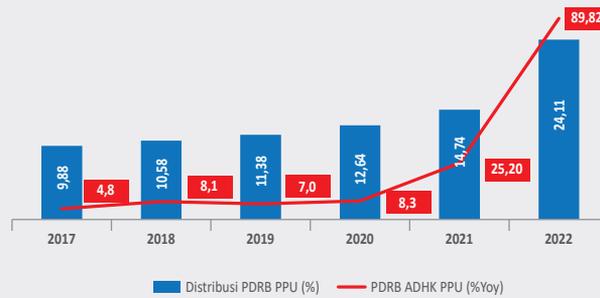
Agar dapat mengoptimalkan potensi IKN, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten PPU masih menghadapi beberapa tantangan.

Tantangan yang dihadapi antara lain perlunya peningkatan tenaga kerja yang tersertifikasi. Persyaratan rekrutment tenaga kerja terkait proyek IKN cukup ketat dimana salah satunya wajib memiliki sertifikasi keahlian yang memadai. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten PPU, jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi keahlian di Kabupaten PPU saat ini masih sangat jauh apabila dibandingkan data jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten PPU sebanyak 80.915. Berdasarkan umur, jumlah pencari kerja di Kabupaten PPU didominasi oleh pekerja kelompok umur 20-29 tahun yang mencapai 62,64% pada tahun 2023.

Ke depan, perlu dilakukan akselerasi peningkatan sertifikasi keahlian dari tenaga kerja sebagai bagian dari reformasi struktural di Kabupaten PPU. Hal ini guna meningkatkan

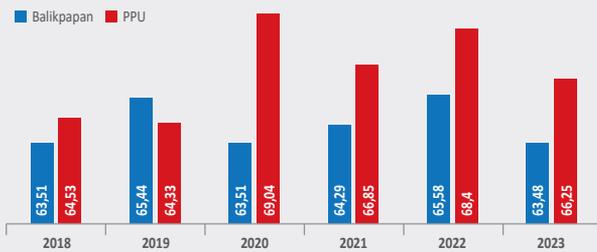
rasio tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten PPU yang saat ini baru tercatat sebesar 66,25% di tahun 2023. Merujuk informasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten PPU,

anggaran ketenagakerjaan 2024 meningkat sebesar 50% dibanding periode 2023 guna meningkatkan kesiapan tenaga kerja lokal terkait proyek IKN.



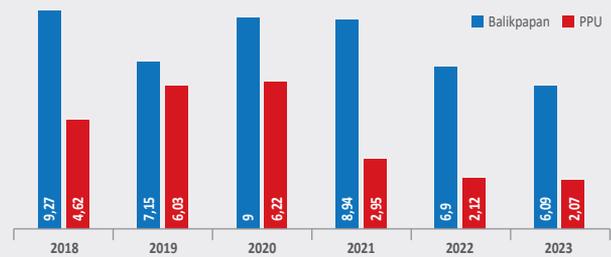
Sumber: BPS

Gambar BOKS VI.1 Perkembangan Laju dan Distribusi Sektor Konstruksi di Kab. PPU



Sumber: BPS

Gambar BOKS VI.1 Perbandingan TPAK



Sumber: BPS

Gambar BOKS VI.1 Perbandingan TPT



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 7

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Di tengah masih terjadinya gangguan terhadap rantai pasok global, perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 4,80% - 5,60% (yoy). Prakiraan pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh LU Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan seiring akselerasi pembangunan infrastruktur IKN dan kenaikan permintaan konsumsi secara musiman menjelang akhir tahun.
- Inflasi tahunan Kaltim di 2024 diperkirakan masih berada dalam rentang target dikisaran $2,5\pm 1\%$ (yoy) di tengah masih tingginya tekanan inflasi global dan meningkatnya permintaan menjelang HBKN. Hal ini antara lain disebabkan efek El-Nino yang semakin termoderasi, terkendalinya ekspektasi masyarakat serta upaya sosialisasi belanja bijak yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Prospek Perekonomian Global

Meski masih diliputi oleh ketidakpastian yang tinggi, pertumbuhan ekonomi dunia di 2024 diprakirakan lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya. Perekonomian global diprakirakan akan tumbuh sebesar 3,1% pada 2023 dan 3,0% pada 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya masing-masing sebesar 3,0% dan 2,8%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh optimisme terhadap pemulihan ekonomi negara-negara Eropa dan negara berkembang, terutama India, meski terjadi stagnansi pertumbuhan ekonomi beberapa negara maju (Tabel VII.1). Namun demikian, sentimen positif tersebut sangat rentan terimbas oleh ketidakpastian di pasar keuangan yang merupakan *tail risk* dari kenaikan suku bunga bank sentral di beberapa negara maju. Ditambah lagi normalisasi dan tren penurunan harga energi dunia khususnya batu bara yang masih terus berlanjut hingga triwulan IV 2023 turut memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara eksportir komoditas tersebut.

Tekanan inflasi meski diprakirakan akan menurun namun masih rentan terimbas oleh gangguan rantai pasok komoditas pangan dunia. Inflasi global berpotensi akan kembali

tinggi jika konflik geopolitik di Eropa dan di Timur Tengah menyebar ke kawasan lain yang akan berdampak terhadap perdagangan global. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap nilai tukar dan memberikan *asymmetric effect* terhadap perdagangan dunia dan aliran modal ke negara-negara berkembang.

Prospek Perekonomian Domestik

Perekonomian domestik diprakirakan masih optimis untuk tumbuh pada kisaran 4,70% s.d 5,50% (yoy) ditopang oleh permintaan domestik yang masih kuat meski terjadi pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Masih kuatnya permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan Pemerintah, serta peningkatan investasi di tengah melemahnya kinerja ekspor menjadi penopang utama optimisme terhadap kinerja perekonomian domestik. Kondisi tersebut juga ditopang oleh membaiknya kinerja hampir semua lapangan usaha sebagaimana tercermin dari perkembangan penjualan eceran, *Prompt Manufacturing Index* (PMI) dan indeks ekspektasi konsumen.

Tabel VII.1 Proyeksi Pertumbuhan Global dan Domestik

Negara	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Dunia	2.8	-2.8	6.3	3.5	3.1	3.0
Negara Maju	1.7	-4.2	5.6	2.6	1.6	1.6
Amerika Serikat	2.3	-2.8	5.9	1.9	2.5	1.9
Kawasan Eropa	1.6	-6.1	5.6	3.4	0.5	0.8
Jepang	-0.4	-4.2	2.2	1.0	1.9	1.1
Negara Berkembang	3.6	-1.8	6.9	4.1	4.1	3.9
Tiongkok	6.0	2.2	8.4	3.0	5.2	4.5
India	4.8	-6.6	8.3	6.8	6.8	5.9
ASEAN-5	4.3	-4.4	4.0	5.5	4.4	4.6
Amerika Latin	0.2	-7.0	7.4	4.2	2.5	2.0
Negara Berkembang Eropa	2.5	-1.6	7.3	1.2	2.7	2.7
Timur Tengah & Asia Tengah	1.6	-2.6	4.3	5.5	2.0	3.0

Institutions	GDP growth 2024
2024 Budget	5.2
Bank Indonesia	4.7 - 5.5
Consensus Forecast (January 2024)	4.9
World Bank (GEP, January 2024)	4.9
IMF (WEO, October 2023)	5.0
ADB (Asian Development Outlook, December 2023)	5.0

*) IMF menggunakan negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam untuk mewakili ASEAN. Sementara itu, Consensus Forecast menggunakan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Sumber: IMF (diolah), Tinjauan Kebijakan Moneter BI

Prospek Perekonomian Kaltim

Lapangan Usaha pertambangan diperkirakan masih tetap tumbuh di tengah tren penurunan harga bahan bakar dunia. LU Pertambangan masih menjadi sektor ekonomi utama di Kaltim dengan pangsa sebesar 43,19% di tahun 2023. Pada triwulan I 2024, tren penurunan harga batu bara diperkirakan mereda seiring membaiknya permintaan dari Tiongkok dan India yang akan memasuki musim dingin. Pada tahun 2024, produksi batu bara diperkirakan akan meningkat sejalan dengan target DMO batu bara 2024 oleh Kementerian ESDM sebesar 220 juta ton, naik 7 juta ton (3,2% yoy) dari 2023 sebesar 213 juta ton. Namun demikian, pertumbuhan LU Pertambangan masih dihadapkan pada beberapa tantangan yang antara lain berasal dari disrupsi rantai pasok, curah hujan yang meningkat, serta keterbatasan ketersediaan alat berat.

Kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh menguat didorong oleh peningkatan konsumsi global dan nasional. Industri pengolahan di Kaltim masih didominasi oleh migas dengan pangsa sebesar 54,60% dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Normalisasi aktivitas ekonomi baik global maupun domestik akan mendorong peningkatan permintaan komoditas industri pengolahan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah turut mendorong pengembangan industri di Kaltim antara lain pembangunan pabrik amonium nitrat PT. Kaltim Amonium Nitrat (KAN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) patungan dari PT. Pupuk Kaltim dan PT. Dahana. Kapasitas produksi pabrik KAN mencapai 75.000 dan diproyeksikan dapat mengurangi 8% impor. Nilai investasi proyek ini mencapai sebesar Rp1,2 triliun dengan lokasi seluas 6 hektare di Kawasan Industrial Estate (KIE) Bontang. Selain itu, pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26 triliun untuk pupuk subsidi atau

sebesar 4,7 juta ton guna memenuhi kebutuhan pupuk pada musim tanam pertama sehingga diharapkan dapat mendorong produksi pupuk dan hasil pertanian.

LU konstruksi diperkirakan masih tumbuh seiring dengan pembangunan infrastruktur. Sejak triwulan terakhir 2023, kinerja LU Konstruksi menunjukkan pertumbuhan yang tinggi didorong oleh pembangunan proyek-proyek strategis tahun jamak meliputi *Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V*, Pabrik Amonium Nitrat Bontang, Bendungan Sepaku – Semoi, pembangunan berbagai ruas jalan nasional, belanja infrastruktur pemerintah daerah dan proyek strategis nasional IKN. Pembangunan IKN yang ditargetkan pada 2024 diperkirakan masih akan terus berlangsung dan akan mendorong belanja infrastruktur pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pembangunan bandara VVIP dan penciptaan sentra ekonomi di kawasan sekitar IKN. Potensi pertumbuhan juga bersumber dari percepatan pembangunan KIPP untuk menarik investor baru. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh korporasi seperti penambahan/pembangunan pabrik pengolahan dan infrastruktur perusahaan tambang diperkirakan juga akan berkontribusi positif terhadap kinerja LU Konstruksi.

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diperkirakan akan tetap tumbuh positif sejalan dengan perbaikan iklim investasi dan akselerasi pembangunan. Peningkatan Konsumsi Pemerintah dan PMTB didorong oleh berlanjutnya investasi jangka panjang pemerintah pusat maupun daerah maupun belanja tahun berjalan yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, belanja investasi swasta baik infrastruktur maupun barang modal diperkirakan juga akan mengalami peningkatan seiring dengan kondisi perekonomian daerah dan nasional yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa perusahaan berencana

untuk melakukan ekspansi usaha dalam bentuk penambahan kapasitas produksi dan perbaikan infrastruktur untuk memenuhi permintaan domestik maupun global. Sebagai proyek strategis nasional tahun jamak dengan alokasi anggaran yang cukup besar, pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN) juga turut mendorong kinerja PMTB dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2024.

Peningkatan kinerja perekonomian juga ditopang oleh masih tingginya konsumsi rumah tangga seiring peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan konsumsi diperkirakan akan terjadi menjelang akhir tahun serta adanya penambahan jumlah penduduk imbas dari mulai beroperasinya kegiatan pemerintahan dari IKN. Kondisi tersebut juga akan berdampak terhadap kegiatan dunia usaha khususnya terkait *Meetings, Incentives, Conferences* dan *Exhibitions* (MICE) di Kaltim.

Seiring dengan optimisme terhadap kinerja ekonomi domestik, perekonomian Kaltim tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada rentang 4,80% – 5,60% (yoy). Kinerja ekonomi tersebut diperkirakan masih ditopang oleh LU Pertambangan dan Konstruksi sejalan dengan masih tingginya potensi permintaan ekspor dari negara-negara mitra dagang, pelaksanaan proyek strategis nasional khususnya IKN yang turut mendorong pembentukan modal tetap bruto dan belanja pemerintah, serta akselerasi



Grafik VII.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2024

pengembangan LU industri pengolahan di wilayah Kaltim. Hal tersebut didukung oleh prakiraan terjaganya permintaan komoditas utama di pasar global dan peningkatan kegiatan pembangunan proyek strategis khususnya IKN disertai semakin kondusifnya dunia usaha pasca pemilu.

7.2. Prospek Inflasi

Tekanan inflasi global diperkirakan masih tinggi seiring masih berlanjutnya konflik geopolitik dan melemahnya perekonomian negara-negara maju. Tekanan inflasi global diperkirakan masih tinggi dipengaruhi oleh disrupsi rantai pasok komoditas pangan dan energi dunia. Berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter terutama di Amerika Serikat mendorong penguatan mata uang dolar yang berdampak terhadap meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun demikian, Bank Indonesia masih optimis dengan menerapkan langkah *pre-emptive*, *front loaded*, dan *forward looking* untuk menahan tekanan global lebih lanjut terhadap perekonomian domestik.

Inflasi di provinsi Kaltim pada tahun 2024 diperkirakan masih terkendali pada kisaran target 2,5+1% (yoy). Tekanan inflasi nasional diperkirakan mereda didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat di tengah *tail risk* dampak El Nino terhadap komoditas pangan serta melemahnya nilai tukar terimbas oleh ketidakpastian di pasar keuangan global. Tekanan inflasi khususnya yang berasal dari komoditas pangan diharapkan dapat dimitigasi antara lain melalui penguatan rantai pasok dan sentra produksi nasional disertai pelaksanaan program pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh TPIP dan TPID dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian inflasi nasional diharapkan dapat

berkontribusi signifikan untuk membawa inflasi nasional pada kisaran target 2,5±1% (yoy).

Prakiraan inflasi di Kaltim pada tahun 2024 pada kisaran 2,5±1% (yoy) sejalan dengan target inflasi nasional. Tekanan inflasi pada tahun 2024 memiliki kecenderungan melandai menuju target inflasi nasional. Pada triwulan I 2024, inflasi Kaltim diprakirakan akan meningkat terutama menjelang HBKN Ramadan dipicu oleh peningkatan permintaan komoditas pangan terutama komoditas beras. Potensi meningkatnya konsumsi masyarakat disebabkan membaiknya daya beli Rumah Tangga dan penambahan jumlah penduduk sebagai imbas dari mulai beroperasinya IKN sebagai pusat pemerintahan. Naiknya tekanan inflasi juga bersumber pada kenaikan beberapa komoditas *administered price* oleh pemerintah dan kondisi cuaca yang tidak kondusif sehingga menyebabkan gangguan produksi dan rantai pasok pada komoditas kebutuhan masyarakat. Namun demikian, peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan seiring dengan upaya pengendalian inflasi pangan, seperti subsidi bahan pangan, pengembangan sentra produksi, dan penguatan TPID melalui GNPIP.

Untuk mencapai sasaran inflasi 2024, berbagai inovasi dan kebijakan pengendalian inflasi di daerah terus dilakukan oleh TPID Kaltim. Beberapa program kerja TPID yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kestabilan inflasi yang rendah dan stabil terutama bahan pangan strategis dalam kerangka GNPIP diantaranya sebagai berikut:

i. **Keterjangkauan harga.** TPID di wilayah Kalimantan Timur telah membentuk tim khusus untuk monitoring secara aktif pergerakan harga komoditas utama secara mingguan melalui Tim *Early Warning System* (EWS) Inflasi Kaltim sebagai bentuk tindak lanjut dari kajian yang dihasilkan oleh BI Kaltim pada tahun sebelumnya.

Hasil pemantauan harga dari EWS menjadi pertimbangan dalam merumuskan rencana tindak lanjut oleh setiap perangkat daerah TPID, misalnya dalam bentuk inspeksi mendadak (Sidak)/operasi pasar dan gelar pasar murah untuk komoditas utama penyumbang inflasi, perluasan *outlet* dan sarana untuk operasi pasar, serta penerapan insentif fiskal tepat sasaran berupa subsidi ongkos angkut.

ii. **Kelancaran distribusi.** Untuk menjaga kelancaran distribusi, program TPID Kalimantan Timur dilakukan dalam bentuk subsidi fiskal dan penguatan aksesibilitas. Gangguan yang muncul akibat faktor cuaca berpotensi mengganggu jalur distribusi dan mendorong lonjakan biaya angkut. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah telah memberikan subsidi fiskal terukur berupa subsidi bahan bakar dengan memperkuat aspek pengawasan untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Penguatan aksesibilitas juga dilakukan melalui perbaikan dan perluasan infrastruktur transportasi berupa jalan, dermaga, dan bandara serta alat transportasi baik udara, darat, dan air.

iii. **Ketersediaan pasokan.** Untuk menjamin ketersediaan pasokan maka TPID Kalimantan Timur melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya: (i) Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) melalui optimalisasi peran Perusda sebagai stabilisator harga; (ii) Program intensifikasi dan ekstensifikasi untuk daerah sentra produksi termasuk bantuan alat dan mesin pertanian; (iii) Gerakan tanam komoditas inflasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk forkompinda; serta (iv) Penguatan cadangan beras pemerintah dan Bulog serta infrastruktur pergudangan.

iv. **Komunikasi yang efektif.** TPID se-Kaltim secara konsisten melaksanakan koordinasi dan komunikasi melalui: (i) Pelaksanaan rakor TPID secara berkala, *High Level Meeting* (HLM) dan rapat teknis; (ii) Forum koordinasi distributor utama dan perusahaan daerah pendukung stabilisasi harga; (iii) Forum

komunikasi pimpinan daerah, pemuka agama, dan tokoh masyarakat; serta (iv) Himbauan belanja bijak dan mencegah *panic buying* terutama menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) bulan Ramadan di pertengahan Maret 2024.

DAFTAR ISTILAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Clean Money Policy

Kebijakan Bank Indonesia untuk menarik uang tidak layak edar dan memusnahkannya serta menyediakan uang layak edar bagi masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada Pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan

memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.

Ekspor-Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Month to Month (mtm)

Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Non Performing Loan (NPL)

Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau nonlancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

Purchasing Managers Index (PMI)

Merupakan indeks gabungan dari berbagai indikator bertujuan untuk mengukur tingkat produksi, mendeteksi tekanan inflasi dan aktivitas perindustrian.

Year on Year (yoy)

Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN LAPORAN

Penanggung Jawab :

Budi Widihartanto - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim

Editor :

- **Bayuadi Hardiyanto** - Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
- **Iwan Kurniawan H.** - Ekonom Senior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

Tim Penulis:

- **Bab I – Perkembangan Makro Ekonomi Daerah**
Raisa Adilla – *Ekonom Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim*
- **Bab II – Keuangan Pemerintah Daerah**
Fathia Nisa – *Analisis Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim*
- **Bab III – Perkembangan Inflasi Daerah**
Shindy Almandasari – *Ekonom Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim*
- **Bab IV – Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM**
Arya Kandrasyah – *Ekonom Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim*
- **Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**
Bangun Permaedhy – *Analisis Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim*
BOKS V.1 – QRIS TUNTAS: Mendorong Inklusi, Interoperabilitas, dan Efisiensi Transaksi Ritel di Kalimantan Timur
Bangun Permaedhy – *Analisis Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim*
- **Bab VI – Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan**
Aris Rudianto – *Analisis Kantor Perwakilan BI Balikpapan*
BOKS VI.1 – Spillover IKN Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan di Wilayah Penyangga IKN
Aris Rudianto – *Analisis Kantor Perwakilan BI Balikpapan*
- **Bab VII – Prospek Perekonomian Daerah**
Faizal Rahman – *Ekonom Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim*

Tim Pengolah Data:

- Raisa Adilla – *Ekonom Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim*
- Arya Kandrasyah – *Ekonom Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim*
- Shindy Almandasari – *Ekonom Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim*
- Fathia Nisa - *Analisis Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim*
- Desy Sofita – *Pelaksana Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim*



Halaman ini sengaja dikosongkan



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FEBRUARI 2024

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Gajah Mada No. 1 SAMARINDA 75122 | Telp. 0541 - 741022, Fax. 0541 - 732644
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>